



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022



## LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah  
Daerah

Tahun Anggaran 2021



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga dapat tersusun Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021, yang secara teknis mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) maka LPPD ini disusun dalam rangka melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan, yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), selain substansi tersebut LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Lamongan ini dibuat, untuk menjadi pemeriksaan dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Lamongan                      Maret 2021

BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	13
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	68
 <b>BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN</b>	
<b>PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>73</b>
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO .....	73
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN .....	74
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	74
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	74
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	74
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH .....	74
 <b>BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS</b>	
<b>PEMBANTUAN .....</b>	<b>112</b>
1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	112
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	112
3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	126
3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN .....	138
3.1.1 Target Kinerja .....	138
3.1.2 Realisasi .....	157
3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN .....	169



3.2.1 Target Kinerja.....	169
3.2.2 Realisasi .....	173
3.3 PERMASALAHAN DAN KENDALA .....	178
3.4 SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	182

#### **BAB IV : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN**

<b>MINIMAL .....</b>	<b>186</b>
4.1 URUSAN PENDIDIKAN .....	186
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	186
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	186
4.1.3 Realisasi .....	187
4.1.4 Alokasi Anggaran .....	188
4.1.5 Realisasi Anggaran .....	189
4.1.6 Dukungan Personil .....	190
4.1.7 Permasalahan dan Solusi .....	191
4.2 URUSAN KESEHATAN .....	192
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	192
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	194
4.2.3 Realisasi .....	196
4.2.4 Alokasi Anggaran .....	198
4.2.5 Realisasi Anggaran .....	201
4.2.6 Dukungan Personil .....	203
4.2.7 Permasalahan dan Solusi .....	204
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM .....	207
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	207
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	207
4.3.3 Realisasi .....	208
4.3.4 Alokasi Anggaran .....	208
4.3.5 Realisasi Anggaran .....	209
4.3.6 Dukungan Personil .....	210
4.3.7 Permasalahan dan Solusi .....	210
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT .....	211
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	211



4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	212
4.4.3	Realisasi .....	213
4.4.4	Alokasi Anggaran .....	214
4.4.5	Realisasi Anggaran .....	215
4.4.6	Dukungan Personil .....	216
4.4.7	Permasalahan dan Solusi .....	216
4.5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT .....	217
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	217
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	219
4.5.3	Realisasi .....	220
4.5.4	Alokasi Anggaran .....	221
4.5.5	Realisasi Anggaran .....	223
4.5.6	Dukungan Personil .....	224
4.5.7	Permasalahan dan Solusi .....	224
4.6	URUSAN SOSIAL .....	225
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	225
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	226
4.6.3	Realisasi .....	227
4.6.4	Alokasi Anggaran .....	228
4.6.5	Realisasi Anggaran .....	230
4.6.6	Dukungan Personil .....	232
4.6.7	Permasalahan dan Solusi .....	233
4.7	PROGRAM DAN KEGIATAN .....	234
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>		<b>247</b>

---

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1. PENJELASAN UMUM**

##### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Dasar Hukum Pembentukan Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

---

---

**BAB I**

---

---





8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Surat Menteri Dalam Negeri RI Tanggal 26 Januari 2022 Nomor. 120.04/926/OTDA Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020;

---

**BAB I**

---

**2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021****Pemerintah Kabupaten Lamongan**

---



16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 ;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

## **b. Data Geografis Wilayah**

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" lintang selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4' 4" sampai dengan 112° 33' 12" yang memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 km<sup>2</sup> setara 181.280 ha atau ±3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, panjang pantai 47 Km dan panjang sungai Bengawan Solo yang melintas sepanjang 68 Km dan secara administratif dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

- Bagian Tengah-Selatan merupakan dataran rendah yang relatif

## BAB I



subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu dan Sugio

- Bagian Selatan dan Utara merupakan daerah pegunungan kapur berbatuan dengan tingkat kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokoro.
- Bagian Tengah-Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah produktif namun rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0 – 25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25 – 100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut bila dihitung 4 mil dari garis pantai ke arah laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 302,5 km<sup>2</sup>.

Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,45% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0 – 2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku sawah (PU) 44.08 Hektar, Baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 Hektar, sawah tadah hujan 25.407,80 Hektar, Tegalan 32.844,33 Hektar, pemukiman 12.418,89 Hektar, Tambak / kolam / waduk 3.497,72 Hektar, kawasan hutan 32.224,00 Hektar, kebun Campuran 212,00 Hektar, Rawa 1.340,00 Hektar, Tanah tandus / kritis 889,00 Hektar dan lain-lain 15.092,51 Hektar.

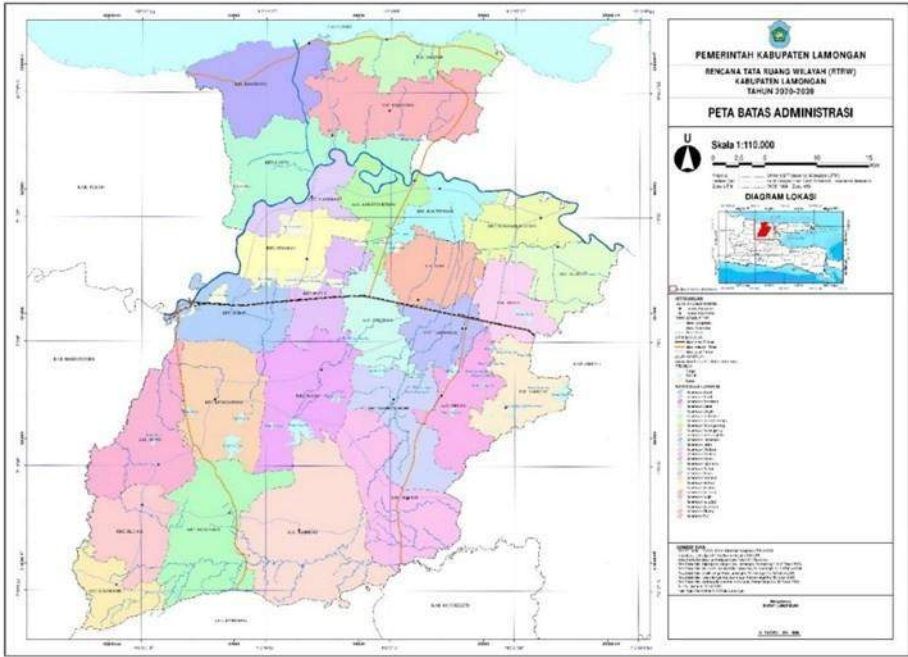
---

---

**BAB I****4 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021****Pemerintah Kabupaten Lamongan**

---

Peta Wilayah Kabupaten Lamongan



c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebesar 1.380.145, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SUKORAME	10,837	10,854	21,691
2	BLULUK	11,477	11,778	23,255
3	MODO	25,665	25,728	51,393
4	NGIMBANG	24,472	24,456	48,928
5	BABAT	46,454	45,228	91,682
6	KEDUNGPRING	31,216	30,931	62,147
7	BRONDONG	39,067	38,343	77,410
8	LAREN	25,672	25,542	51,214
9	SEKARAN	24,196	23,658	47,854
10	MADURAN	18,127	18,054	36,181
11	SAMBENG	26,328	26,145	52,473
12	SUGIO	31,572	31,545	63,117
13	PUCUK	24,976	24,698	49,674
14	PACIRAN	49,448	48,690	98,138
15	SOLOKURO	24,137	24,211	48,348
16	MANTUP	23,172	23,575	46,747
17	SUKODADI	28,976	29,299	58,275
18	KARANGGENENG	21,892	21,972	43,864
19	KEMBANGBAHU	25,142	25,053	50,195
20	KALITENGAH	17,969	18,059	36,028
21	TURI	27,586	26,997	54,583

BAB I



			LPPD TA 2021	
22	LAMONGAN	34,455	35,180	69,635
23	TIKUNG	23,030	23,294	46,324
24	KARANGBINANGUN	20,286	20,190	40,476
25	DEKET	22,038	21,953	43,991
26	GLAGAH	20,760	20,611	41,371
27	SARIREJO	12,461	12,690	25,151
TOTAL		691,411	688,734	1,380,145

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2021, DISDUKCAPIL Lamongan

**d. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan**

Wilayah Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 wilayah kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun
1	Sukorame	9	38
2	Bluluk	9	41
3	Ngimbang	19	77
4	Sambeng	22	86
5	Mantup	15	72
6	Kembangbahu	18	77
7	Sugio	21	86
8	Kedungpring	23	74
9	Modo	17	76
10	Babat	23	47
11	Pucuk	17	34
12	Sukodadi	20	77
13	Lamongan	20	30
14	Tikung	13	68
15	Sarirejo	9	32
16	Deket	17	55
17	Glagah	29	87
18	Karangbinangun	21	71
19	Turi	19	53
20	Kalitengah	20	44
21	Karanggeneng	18	35
22	Sekaran	21	29
23	Maduran	17	31
24	Laren	20	38
25	Solokuro	10	20



No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun
26	Paciran	17	30
27	Brondong	10	23
Jumlah		474	1.431

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah  
Dan Pegawai Pemerintah

Tabel 1.3  
Rekapitulasi Perangkat Daerah / Pegawai Pemerintah (PNS) di  
Kabupaten Lamongan Tahun 2021

NO	UNIT ORGANISASI	MENURUT JABATAN											MENURUT JENIS KELAMIN		
		ESELON								STAF	FUNGSI ONAL	JUML AH	PRIA	WANI TA	JUML AH
		I		II		III		IV							
		a	B	a	b	a	B	a	B						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
1	Sekretariat Daerah	0	0	1	3	12	0	34	0	87	6	143	83	60	143
2	Sekretariat Dprd	0	0	0	1	4	0	12	0	5	1	23	17	6	23
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	1	4	14	0	21	5	45	24	21	45
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0	0	0	1	1	2	8	0	8	0	20	15	5	20
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	1	0	4	7	0	9	0	21	17	4	21
6	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	1	1	3	11	3	20	0	39	31	8	39
7	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0	0	0	0	1	2	11	0	3	0	17	9	8	17
8	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0	0	0	0	1	4	13	0	17	1	36	17	19	36
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	1	1	4	11	0	20	3	40	20	20	40
10	Dinas Kearsipan Daerah	0	0	0	1	1	2	10	0	3	5	22	13	9	22
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0	0	0	1	1	4	14	0	12	2	34	21	13	34
12	Dinas Kesehatan	0	0	0	1	1	4	13	2	138	1.101	1.260	330	930	1.260
13	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	0	0	1	2	7	0	2	2	14	6	8	14
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0	0	0	1	1	3	9	0	10	2	26	20	6	26

BAB I



15	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	0	0	0	1	1	4	15	0	7	1	<u>29</u>	18	11	<u>29</u>
16	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	1	1	4	15	0	57	0	<u>78</u>	65	13	<u>78</u>
17	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0	0	0	1	1	3	11	1	22	0	<u>39</u>	27	12	<u>39</u>
18	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	0	0	0	1	1	3	9	0	31	0	<u>45</u>	36	9	<u>45</u>
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	0	0	1	1	4	15	0	5	0	<u>26</u>	22	4	<u>26</u>
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0	0	0	1	0	2	10	0	5	1	<u>19</u>	11	8	<u>19</u>
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	0	0	0	1	1	3	12	0	14	0	<u>31</u>	22	9	<u>31</u>
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	1	1	3	11	0	11	1	<u>28</u>	15	13	<u>28</u>
23	Dinas Pendidikan	0	0	0	1	1	4	11	0	286	4.693	<u>4.996</u>	2.310	2.686	<u>4.996</u>
24	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0	0	0	1	1	4	11	0	35	1	<u>53</u>	38	15	<u>53</u>
25	Dinas Perhubungan	0	0	0	1	1	3	11	2	39	1	<u>58</u>	50	8	<u>58</u>
26	Dinas Perikanan	0	0	0	0	1	4	14	2	21	0	<u>42</u>	26	16	<u>42</u>
27	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0	0	0	1	1	4	13	0	7	2	<u>28</u>	16	12	<u>28</u>
28	Dinas Perpustakaan Daerah	0	0	0	0	1	4	11	0	6	3	<u>25</u>	12	13	<u>25</u>
29	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	0	0	0	0	1	3	11	1	16	7	<u>39</u>	25	14	<u>39</u>
30	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	0	0	0	1	1	3	12	1	40	11	<u>69</u>	45	24	<u>69</u>
31	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	0	0	0	1	0	3	12	0	43	4	<u>63</u>	60	3	<u>63</u>
32	Dinas Sosial	0	0	0	1	1	3	8	0	5	0	<u>18</u>	8	10	<u>18</u>
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	0	0	0	1	1	4	14	1	33	166	<u>220</u>	135	85	<u>220</u>
34	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0	1	1	4	11	0	6	4	<u>27</u>	18	9	<u>27</u>
35	Inspektorat	0	0	0	1	3	0	3	0	12	25	<u>44</u>	22	22	<u>44</u>
36	Kecamatan Babat	0	0	0	0	1	1	5	9	38	0	<u>54</u>	40	14	<u>54</u>
37	Kecamatan Bluluk	0	0	0	0	1	0	3	0	8	0	<u>12</u>	12	0	<u>12</u>

BAB I



38	Kecamatan Brondong	0	0	0	0	1	1	3	4	13	0	<u>22</u>	18	4	<u>22</u>
39	Kecamatan Deket	0	0	0	0	1	1	2	2	15	0	<u>21</u>	19	2	<u>21</u>
40	Kecamatan Glagah	0	0	0	0	1	1	2	2	11	0	<u>17</u>	17	0	<u>17</u>
41	Kecamatan Kalitengah	0	0	0	0	1	1	4	1	7	0	<u>14</u>	11	3	<u>14</u>
42	Kecamatan Karangbinangun	0	0	0	0	1	1	2	1	8	0	<u>13</u>	12	1	<u>13</u>
43	Kecamatan Karanggeneng	0	0	0	0	1	1	3	1	12	0	<u>18</u>	14	4	<u>18</u>
44	Kecamatan Kedungpring	0	0	0	0	1	1	4	2	12	0	<u>20</u>	17	3	<u>20</u>
45	Kecamatan Kembangbahu	0	0	0	0	1	1	3	2	11	0	<u>18</u>	15	3	<u>18</u>
46	Kecamatan Lamongan	0	0	0	0	1	1	12	33	26	0	<u>73</u>	47	26	<u>73</u>
47	Kecamatan Laren	0	0	0	0	1	0	4	2	8	0	<u>15</u>	13	2	<u>15</u>
48	Kecamatan Maduran	0	0	0	0	1	2	3	0	12	0	<u>18</u>	15	3	<u>18</u>
49	Kecamatan Mantup	0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	<u>9</u>	8	1	<u>9</u>
50	Kecamatan Modo	0	0	0	0	1	1	3	2	15	0	<u>22</u>	17	5	<u>22</u>
51	Kecamatan Ngimbang	0	0	0	0	1	1	3	2	10	0	<u>17</u>	16	1	<u>17</u>
52	Kecamatan Paciran	0	0	0	0	1	1	2	6	12	0	<u>22</u>	16	6	<u>22</u>
53	Kecamatan Pucuk	0	0	0	0	1	1	4	2	16	0	<u>24</u>	19	5	<u>24</u>
54	Kecamatan Sambeng	0	0	0	0	1	1	4	1	10	0	<u>17</u>	16	1	<u>17</u>
55	Kecamatan Sarirejo	0	0	0	0	1	1	4	1	10	0	<u>17</u>	14	3	<u>17</u>
56	Kecamatan Sekaran	0	0	0	0	0	1	3	2	8	0	<u>14</u>	11	3	<u>14</u>
57	Kecamatan Solokuro	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0	<u>8</u>	6	2	<u>8</u>
58	Kecamatan Sugio	0	0	0	0	1	1	4	2	12	0	<u>20</u>	15	5	<u>20</u>
59	Kecamatan Sukodadi	0	0	0	0	1	1	4	1	5	0	<u>12</u>	9	3	<u>12</u>
60	Kecamatan Sukorame	0	0	0	0	1	1	3	2	7	0	<u>14</u>	13	1	<u>14</u>
61	Kecamatan Tikung	0	0	0	0	1	1	4	1	8	0	<u>15</u>	13	2	<u>15</u>
62	Kecamatan Turi	0	0	0	0	1	1	4	2	10	0	<u>18</u>	14	4	<u>18</u>
63	Rsud Dr. Soegiri	0	0	0	1	2	5	11	0	63	308	<u>390</u>	141	249	<u>390</u>

BAB I





												LPPD TA 2021			
64	Rsud Ngimbang	0	0	0	0	1	3	7	0	7	66	84	37	47	84
65	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	1	4	14	0	37	0	56	54	2	56
JUMLAH		0	0	1	31	77	145	544	99	1.472	6.422	8.791	4.273	4.518	8.791

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021

### f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

**Tabel 1.4**  
 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
 Daerah Tahun Anggaran 2021  
 Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nomor Urut	Uraian	JUMLAH ( Rp )		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>477.998.311.040,00</b>	<b>604.588.137.655,78</b>	<b>126.589.826.615,78</b>	<b>126,48%</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	137.595.722.312,00	134.404.544.416,00	(3.191.177.896,00)	97,68%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.669.687.900,00	14.295.774.860,00	(2.373.913.040,00)	85,76%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.029.376.958,00	19.176.236.923,05	(853.140.034,95)	95,74%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	303.703.523.870,00	436.711.581.456,73	133.008.057.586,73	143,80%
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.329.340.517.358,00</b>	<b>2.249.492.084.740,00</b>	<b>(79.848.432.618,00)</b>	<b>96,57%</b>
1.2.1	<b>Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah</b>	<b>2.329.340.517.358,00</b>	<b>2.249.492.084.740,00</b>	<b>(79.848.432.618,00)</b>	<b>96,57%</b>
1.2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.028.734.081.396,00	2.021.549.509.887,00	(7.184.571.509,00)	99,65%
1.2.1.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	300.606.435.962,00	227.942.574.853,00	(72.663.861.109,00)	75,83%
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>165.408.817.106,00</b>	<b>120.584.444.375,00</b>	<b>(44.824.372.731,00)</b>	<b>72,90%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	52.944.338.106,00	14.431.221.275,00	(38.513.116.831,00)	27,26%
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	12.285.000.000,00	5.973.744.100,00	(6.311.255.900,00)	48,63%



LPPD TA 2021					
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.179.479.000,00	100.179.479.000,00	0,00	100,00%
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.972.747.645.504,00</b>	<b>2.974.664.666.770,78</b>	<b>1.917.021.266,78</b>	<b>100,06%</b>
<b>2</b>	<b><u>BELANJA</u></b>				
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>2.023.363.766.515,00</b>	<b>1.911.393.399.289,07</b>	<b>(111.970.367.225,93)</b>	<b>94,47%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.016.297.086.133,00	980.281.672.747,00	(36.015.413.386,00)	96,46%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	777.126.626.809,00	706.802.770.145,07	(70.323.856.663,93)	90,95%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	217.794.386.573,00	212.397.406.497,00	(5.396.980.076,00)	97,52%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.145.667.000,00	11.911.549.900,00	(234.117.100,00)	98,07%
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>356.325.074.428,00</b>	<b>327.391.789.305,51</b>	<b>(28.933.285.122,49)</b>	<b>91,88%</b>
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	122.307.087.115,00	117.818.225.581,72	(4.488.861.533,28)	96,33%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	65.872.096.337,00	58.426.028.679,90	(7.446.067.657,10)	88,70%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	151.337.491.956,00	135.958.909.722,89	(15.378.582.233,11)	89,84%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.150.553.528,00	12.149.605.228,00	(948.300,00)	99,99%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	4.657.845.492,00	3.039.020.093,00	(1.618.825.399,00)	65,25%
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>19.385.935.437,28</b>	<b>(10.614.064.562,72)</b>	<b>64,62%</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	19.385.935.437,28	(10.614.064.562,72)	64,62%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.409.688.840.943,00</b>	<b>2.258.171.124.031,86</b>	<b>(151.517.716.911,14)</b>	<b>93,71%</b>
<b>2.4</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>612.983.251.167,00</b>	<b>612.891.459.166,70</b>	<b>(91.792.000,30)</b>	<b>99,99%</b>
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten	15.961.299.527,00	15.934.507.526,70	(26.792.000,30)	99,83%
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%

BAB I



				LPPD TA 2021	
2.4.4	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.5	Bantuan Keuangan ke Desa	597.021.951.640,00	596.956.951.640,00	(65.000.000,00)	99,99%
2.4.6	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>3.022.672.092.110,00</b>	<b>2.871.062.583.198,56</b>	<b>(151.609.508.911,44)</b>	<b>94,98%</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(49.924.446.606,00)</b>	<b>103.602.083.572,22</b>	<b>153.526.530.178,22</b>	<b>-207,52%</b>
<b>3</b>	<b><u>PEMBIAYAAN</u></b>				
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	51.424.446.606,00	51.429.558.606,49	5.112.000,49	100,01%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	2.151.000.000,00	1.151.000.000,00	215,10%
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>52.424.446.606,00</b>	<b>53.580.558.606,49</b>	<b>1.156.112.000,49</b>	<b>102,21%</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>49.924.446.606,00</b>	<b>51.080.558.606,49</b>	<b>1.156.112.000,49</b>	<b>102,32%</b>
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	154.682.642.178,71	154.682.642.178,71	0,00%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2021

## 1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan mendasar yang merupakan isu daerah untuk dijadikan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu pondasi dalam menopang kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan menjadi bagian penting dari sasaran pembangunan, sehingga pemerintah daerah menaruh perhatian yang serius terhadap permasalahan.

Beberapa permasalahan pokok di bidang pendidikan yaitu : Belum meratanya kualitas pendidikan, terutama disebabkan distribusi tenaga pendidik/guru yang tidak merata dan kurangnya tenaga administrasi di lembaga sekolah; Permasalahan terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas dan mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi dikarenakan beberapa hal, misalnya karena usia bangunan yang sudah tua, bencana alam dan sebagainya; Permasalahan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Kemampuan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan akan mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di Kabupaten Lamongan, perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya meningkatkan daya saing sumberdaya manusia.

#### 2. Kesehatan

Bidang kesehatan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas SDM yang baik akan menunjang peningkatan daya saing daerah di masa yang akan datang. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Masih tingginya/meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); Masih tingginya penderita yang datang ke layanan dalam kondisi AIDS; Masih tingginya penderita DBD di masyarakat yang disebabkan masih rendah kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan belum optimalnya Gerakan Pembrantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat masih belum optimal; Masih tingginya kasus Tuberkulosis (TB); Ketersediaan

tenaga medis terutama Dokter Spesialis masih terbatas, sehingga pelayanan spesialis masih belum optimal; Kekurangan sarana prasarana (peralatan kedokteran sesuai standar Rumah Sakit kelas B dan perkembangan IPTEK); Belum meratanya pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamongan. Meski jumlah fasilitas kesehatan sudah terdistribusi diseluruh wilayah kecamatan, tetapi sebagian masyarakat masih mengeluhkan minimnya peralatan yang dimiliki; Percepatan pemulihan penderita gizi buruk belum optimal.

### 3. Kemiskinan

Keadaan Perekonomian khususnya di Indonesia kini terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Khususnya masyarakat menengah kebawah. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih relatif sehingga upaya-upaya pendampingan, bantuan dan pemberdayaan perlu dilakukan untuk memutus lingkaran siklus kemiskinan guna menurunkan angka kemiskinan.

### 4. Lingkungan Hidup

Begitu juga dengan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup terkendala oleh masih rendahnya capaian pelayanan dan terbatasnya sarana dan prasarana persampahan; Menurunnya kuantitas dan kualitas air permukaan yang disebabkan meningkatnya kawasan permukiman, industri dan kegiatan usaha lainnya; Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan; Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berkurangnya daerah tangkapan air.

## BAB I



## 5. Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Permasalahan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan umumnya berkaitan dengan turunnya kapasitas fungsi infrastruktur penampung air. Hampir sebagian besar waduk di Kabupaten Lamongan memiliki sedimentasi yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap penyediaan air baku yang dibutuhkan oleh masyarakat umum maupun petani. Tingginya sedimentasi yang terjadi daerah penangkap air menyebabkan menurunnya kapasitas air baku yang ada di Kabupaten Lamongan dan menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air.

Terbatasnya jumlah saluran irigasi yang masih belum permanen/pasangan sehingga mengakibatkan tidak optimalnya layanan kebutuhan air terhadap petani; Keterbatasan alokasi pembiayaan penanganan infrastruktur jalan dan irigasi. Meskipun tren peningkatan jalan di Kabupaten Lamongan sangat baik, tetapi struktur tanah yang sebagian besar berupa tanah lempung/clay dengan sifat fisik yang buruk dan elastis sehingga mengakibatkan tingkat usia jalan menjadi pendek selain itu masih rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi batas maximum tonase yang diijinkan sehingga butuh alokasi pendanaan yang besar di tiap tahunnya;

Jumlah waduk di Kabupaten Lamongan hampir sebagian besar sudah mengalami pendangkalan sehingga perlu adanya normalisasi waduk agar mempunyai tangkapan air baku seperti semula. Namun tingginya biaya yang harus dialokasikan untuk kegiatan normalisasi tersebut, menjadi kendala tersendiri.

Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air. Jumlah cakupan layanan air bersih di Kabupaten Lamongan masih sangat rendah dikarenakan kebutuhan air bersih di Kabupaten Lamongan masih bergantung dengan air permukaan selain itu masih terbatasnya kapasitas produksi Instalasi Pengelolaan Air/IPA dan infrastruktur jaringan perpipaan

Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan. Cakupan Layanan air limbah masih rendah di

## BAB I



karenakan di Kabupaten Lamongan baru membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT di tahun 2016 dengan dana APBN dan masih minimnya jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah/IPAL yang ada di permukiman. Di sisi lain belum semua rumah tangga memiliki jamban

Belum optimalnya ketersediaan drainase lingkungan permukiman. Salah satu faktor utama penyebab banjir di permukiman adalah belum tersedianya saluran drainase yang memadai, terjadinya pendangkalan pada saluran dan penyempitan saluran yang mengakibatkan ketidak lancar saluran drainase permukiman dalam mengalirkan air ke saluran pembuang.

Belum meratanya ketersediaan Penerangan Jalan Umum/PJU. Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lamongan masih belum merata dan masih berpusat pada perkotaan.

## **6. Tenaga Kerja dan Pengembangan Dunia Usaha**

Permasalahan Tenaga Kerja yang nampak di Kabupaten Lamongan adalah masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kompetensi daya saing, baik di sektor formal maupun informal terlebih ketika dikaitkan dengan kebijakan integrasi ekonomi dan sosial dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi. Dalam situasi yang demikian, isu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing perlu disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pengembangan dunia usaha di Kabupaten Lamongan terus menggeliat. Lamongan telah menjadi incaran investor untuk melakukan investasi, mengingat daerah yang selama ini menjadi lokasi investasi telah overload dan timbul permasalahan dengan buruh. Dari tahun ke tahun realisasi investasi terus meningkat, namun demikian masih ada permasalahan yang harus dicari solusi, antara lain: Besarnya minat investasi belum diikuti oleh realisasi investasi, sehingga belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; Infrastruktur belum mendukung, mengingat banyak jalan dan jembatan yang kondisinya masih belum lebar; Meningkatnya persaingan antar daerah dan negara untuk menarik investor, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan harus meningkatkan kualitas perijinan serta diringi oleh promosi investasi.

---

---

**BAB I**

---

---





## 7. Pengamanan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan data estimasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Bidang pertanian memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Lamongan, namun masih ada beberapa permasalahan yang terus diupayakan penyelesaiannya, yaitu :

Pupuk anorganik masih banyak digunakan oleh petani, sehingga berdampak pada tingkat kesuburan tanah dan lingkungan; Petani masih banyak yang menggunakan peralatan tradisional, sehingga memerlukan sarana produksi yang lebih modern untuk meningkatkan produktifitas; Terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian terutama untuk wilayah tadah hujan, sehingga menghambat peningkatan produksi; Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang diakibatkan oleh besarnya biaya produksi, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan petani masih relatif belum memadai, sehingga selisih antara biaya produksi dan pendapatan relatif sempit; Nilai tambah produk pertanian masih rendah, hal ini dikarenakan petani/masyarakat belum melakukan pengolahan hasil pertanian dan banyak dijual dalam kondisi bahan baku/mentah; Terbatasnya bibit ternak akibat dari belum intensif pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB); Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemotongan sapi betina produktif; Belum maksimalnya pengawasan produk pangan asal hewan (daging dan telur).

Potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Lamongan cukup signifikan baik berasal perikanan darat maupun laut meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan sektor perikanan lainnya. Agar terjadi peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap, maka dibutuhkan upaya konservasi terhadap ekosistem pesisir dan kelautan yang berdampak pada produktivitas hasil tangkapan pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, permasalahan yang lain juga mencakup belum terpenuhinya fasilitas untuk nelayan tradisional, penataan dan perlindungan ekosistem pesisir dan penyediaan benih berkualitas bagi pembudidaya. Berkurangnya jumlah populasi dan jenis ikan tangkapan nelayan disekitar pantai yang menyebabkan daerah penangkapan menjadi jauh sehingga memerlukan biaya operasional

### BAB I



kapal yang tinggi; Adanya penurunan tingkat kualitas lingkungan dengan berkurangnya lahan tanaman mangrove serta rusaknya terumbu karang yang mengakibatkan berkurangnya populasi ikan; Kondisi infrastruktur budidaya yang masih belum layak, sehingga menghambat distribusi sarana produksi maupun pemasaran; Kurangnya alokasi pupuk bagi pembudidaya ikan karena pupuk bersubsidi oleh pemerintah masih belum sesuai kebutuhan pembudidaya; Kurangnya persediaan stok benih ikan yang tersedia pada saat musim tebar ikan; Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah

Jumlah penduduk terus tumbuh, sehingga diperlukan makanan untuk penghidupannya. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang ketahanan pangan antara lain masih adanya desa yang rawan pangan; konsumsi pangan belum B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dan pola konsumsinya masih tergantung pada beras; pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap ketahanan dan keamanan pangan masih rendah. Sehingga beresiko terhadap terjadinya masyarakat yang rawan pangan.

## 8. Pelayanan Pemerintahan

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan aspek mendasar dalam mengimplementasikan pembangunan daerah. Sebagai subyek utama pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan clean government. Salah satu permasalahan tata kelola pemerintahan adalah berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan sudah memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan sudah baik.

## BAB I



Permasalahan lainnya adalah berkaitan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu juga perlu memfokuskan pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dievaluasi secara periodik dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat di beberapa unit layanan yang ada.

## **9. Ketenteraman**

Secara umum urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparaturnya lainnya. Namun demikian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan Ketenteraman,

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah yang dianggap membatasi kegiatan Warga dalam beraktifitas
2. Kurang optimalnya pelaksanaan monitoring bidang ideology, politik, ekonomi, Sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat

## **b. Visi Dan Misi Kepala Daerah**

### **a) Visi Kepala Daerah**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Konsep Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 2016-2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan terhadap arah pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

---

---

**BAB I**

---

---



Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, adalah:



***“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera  
dan Berdaya Saing “.***

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) Terwujudnya** terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
- 2) Lamongan** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
- 3) Lebih Sejahtera** dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya- agama masyarakat dan kearifan local Kabupaten Lamongan.
- 4) Lebih Berdaya saing** dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan

## BAB I



mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## b) Misi Kepala Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan **5 (lima) Misi Kabupaten Lamongan** Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

**Misi 2 : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah,** dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

## BAB I



**Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan,** dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Misi 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

**Misi 5 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

---

---

## BAB I

---

---



c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen  
Perencanaan Jangka Menengah

**Tabel 1.5**  
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen  
Perencanaan Jangka Menengah

No	Perangkat Daerah	Program
1	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat</li><li>- Program Pendidikan Sekolah Dasar</li><li>- Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li><li>- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li></ul>
2	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Sumber Daya Kesehatan</li><li>- Program Kesehatan Masyarakat</li><li>- Program Pelayanan Kesehatan</li><li>- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular</li><li>- Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</li></ul>
3	RSUD SOEGIRI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Rumah Saki Soegiri</li><li>- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Di Rumah Sakit Soegiri</li><li>- Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Di Rumah Sakit Soegiri</li></ul>
4	RSUD NGIMBANG	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit Ngimbang</li><li>- Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Ngimbang</li><li>- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata di Rumah Sakit Ngimbang</li><li>- Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di Rumah Sakit Ngimbang</li></ul>
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li><li>- Program Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li><li>- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan</li><li>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</li></ul>



6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>- Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>- Program Pengendalian Banjir</li> </ul>
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Perumahan</li> <li>- Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan</li> <li>- Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang</li> <li>- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</li> </ul>
8	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</li> <li>- Program Pemeliharaan Kantrantibmas</li> <li>- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</li> <li>- Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> </ul>
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</li> <li>- Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana</li> <li>- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</li> </ul>
10	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penanganan Fakir Miskin</li> <li>- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</li> <li>- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> </ul>
11	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</li> <li>- Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja</li> <li>- Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja</li> <li>- Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>- Program Transmigrasi Regional</li> </ul>
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</li> <li>- Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>- Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan</li> </ul>

## BAB I



13	Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Ketahanan Pangan</li> <li>- Program Pengembangan Keanekaragaman Pangan Konsumsi</li> <li>- Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah</li> </ul>
14	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3</li> <li>- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>- Program Peningkatan Pengendalian Polusi</li> <li>- Program Penataan Lingkungan</li> </ul>
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penataan Administrasi Kependudukan.</li> <li>- Program Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan</li> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Sipil</li> <li>- Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Tertib Administrasi Kependudukan</li> </ul>
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</li> <li>- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</li> <li>- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</li> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</li> <li>- Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan</li> </ul>
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penyuluhan dan Penggerakan</li> <li>- Program Keluarga Berencana</li> <li>- Program Pengendalian Penduduk</li> <li>- Program Pembinaan Keluarga</li> </ul>
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>- Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika</li> <li>- Program Pengembangan Data atau Informasi atau statistik daerah</li> <li>- Program Persandian Daerah</li> </ul>
19	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</li> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</li> <li>- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</li> <li>- Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</li> <li>- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</li> </ul>

## BAB I



20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro dan Koperasi Yang Kondusif</li> <li>- Program Pengembangan Produk Bagi Usaha Mikro dan Koperasi</li> <li>- Program Pengembangan Pemasaran Bagi Usaha Mikro dan Koperasi</li> <li>- Program Peningkatan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif</li> <li>- Program Peningkatan Kualitas Koperasi</li> </ul>
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</li> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Perijinan</li> </ul>
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</li> <li>- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</li> <li>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</li> </ul>
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> <li>- Program Pengembangan Nilai Seni Dan Budaya</li> <li>- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</li> <li>- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</li> </ul>
24	Dinas Perpustakaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca</li> <li>- Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan</li> <li>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan</li> <li>- Program Peningkatan Promosi Perpustakaan</li> </ul>
25	Dinas Kearsipan Daerah	<p>Program perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</p> <p>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah</p> <p>Program Peningkatan Pengawasan Kearsipan Daerah</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</p>
26	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</li> <li>- Program Pengembangan Budidaya Perikanan</li> <li>- Program Pengembangan Perikanan Tangkap</li> <li>- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</li> </ul>
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan</li> </ul>

**BAB I**

**26 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021**
**Pemerintah Kabupaten Lamongan**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan/Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)</li> <li>- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian</li> <li>- Program Pengembangan Data atau Informasi Pertanian</li> </ul>
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Kesehatan Ternak</li> <li>- Program Peningkatan Produksi hasil peternakan/ Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT)</li> <li>- Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan</li> <li>- Program Peningkatan Teknologi Peternakan Tepat Guna</li> </ul>
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan atau Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal (DBHCHT)</li> <li>- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</li> <li>- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> <li>- Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</li> <li>- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah atau Pembinaan Lingkungan Sosial dan Industri</li> <li>- Program Penataan Peningkatan Daya Saing Industri</li> </ul>
30	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</li> <li>- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</li> <li>- Peningkatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja</li> </ul>
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Data/Informasi</li> <li>- Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> <li>- Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan</li> <li>- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam</li> </ul>
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah</li> <li>- Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah</li> <li>- Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah</li> <li>- Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ul>
33	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan</li> </ul>

## BAB I



## 27 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021

Pemerintah Kabupaten Lamongan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan</li> <li>- Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah</li> </ul>
34	Badan Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pendidikan dan Pelatihan ASN</li> <li>- Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas ASN</li> <li>- Program Peningkatan pengelolaan pensiun dan kesejahteraan ASN</li> <li>- Program Penataan Jabatan dan Peningkatan Mutu Informasi Kepegawaian</li> </ul>
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan</li> <li>- Program Kelitbangan Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya</li> <li>- Program Kelitbangan Bidang Sumber Daya Alam Dan Teknologi</li> <li>- Program Pengembangan Inovasi Daerah</li> </ul>
36	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>- Program Pengembangan Publikasi Informasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</li> </ul>
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal</li> <li>- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>- Program Pendidikan Politik Masyarakat</li> </ul>
38	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>- Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan</li> <li>- Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah</li> <li>- Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Bidang Keorganisasian</li> <li>- Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehumasan dan Protokol</li> <li>- Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- Program Penanganan Kasus Hukum</li> <li>- Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Asset</li> <li>- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</li> </ul>
39	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan</li> </ul>

## BAB I



	Lamongan	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
40	Kecamatan Babat	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
41	Kecamatan paciran	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
42	Kecamatan Brondong	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
43	Kecamatan Turi	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
44	Kecamatan Pucuk	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
45	Kecamatan Sukodadi	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
46	Kecamatan Tikung	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
47	Kecamatan Deket	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
48	Kecamatan Kalitengah	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
49	Kecamatan Kembangbahu	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
50	Kecamatan Mantup	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
51	Kecamatan Modo	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
52	Kecamatan Bluluk	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
53	Kecamatan	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

## BAB I



## 29 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021

Pemerintah Kabupaten Lamongan

	Karangbinangun	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
54	Kecamatan Glagah	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
55	Kecamatan Ngimbang	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
56	Kecamatan Sugio	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
57	Kecamatan Karanggeneng	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
58	Kecamatan Sambeng	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
59	Kecamatan Iaren	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
60	Kecamatan Kedungpring	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
61	Kecamatan Sekaran	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
62	Kecamatan sarirejo	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
63	Kecamatan Solokuro	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
64	Kecamatan Maduran	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
65	Kecamatan Sukorame	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

BAB I





d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen  
Perencanaan Tahunan

**Tabel 1.6**  
Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen  
Perencanaan Tahunan (Tahun 2021)

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	<div><ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa PAUD</li><li>- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</li><li>- Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini</li><li>- Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah bagi Lembaga PAUD</li><li>- Implementasi Managemen Pendidikan Dalam Peningkatan Kemandirian Lembaga KB atau TK</li><li>- Pelaksanaan Hari Anak</li><li>- Pengadaan Pakaian Seragam Guru KB atau TK</li><li>- Fasilitasi Rintisan Desa Pintar</li><li>- Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI)</li><li>- Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah atau Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Madarasah Dan Guru Swasta (Bppdmgs)</li><li>- Fasilitasi Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu</li><li>- Peduli Keamanan Sekolah (PKS)</li><li>- Pengiriman Kontingen Olimpiade Olahraga SD,SDLB dan SMP</li><li>- Pengiriman POR SD Tingkat Provinsi</li><li>- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Beladiri atau Karate</li><li>- Peringatan HARDIKNAS</li><li>- Festifal Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)</li><li>- Pembinaan Olahraga Siswa Sejak Dini</li><li>- Sanggar Kegiatan Belajar (DAK)</li><li>- Rehabilitasi Sedang atau Berat Ruang Kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Taman Kanak Kanak (TK) (DAK)</li><li>- Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru (DAK)</li><li>- Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK)</li><li>- Pengadaan Buku Koleksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (DAK)</li><li>- Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah atau Bantuan Kepada Lembaga SD atau MI Swasta</li><li>- Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD</li></ul></div>

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu SD</li><li>- Fasilitasi Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu jenjang SD atau SMP</li><li>- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD atau MI atau SDLB dan SMP atau MTS</li><li>- Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD atau MI dan Pemanapan</li><li>- Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kesiswaan SD</li><li>- Pengembangan Kurikulum 2013 Jenjang SD</li><li>- Pengadaan Mebelair Sekolah Dasar</li><li>- Rehabilitasi Sedang atau Berat Bangunan Sekolah Dasar (DAK)</li><li>- Rehabilitasi Sarana Prasarana Sekolah Dasar</li><li>- Penyusunan Sistem dan Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS)</li><li>- Rehabilitasi Toilet Sekolah Dasar (DAK)</li><li>- Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (DAK)</li><li>- Pembangunan Toilet Sekolah Dasar (DAK)</li><li>- Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar (DAK)</li><li>- Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) Sekolah Dasar (DAK)</li><li>- Pengadaan Peralatan Seni Budaya Sekolah Dasar (DAK)</li><li>- Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Sekolah Dasar (DAK)</li><li>- Penbangunan Ruang Perpustakaan (DAK)</li><li>- Penbangunan Ruang UKS (DAK)</li><li>- Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA (DAK)</li><li>- Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK)</li><li>- Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia (DAK)</li><li>- Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika (DAK)</li><li>- Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DAK)</li><li>- Pengadaan Media Pendidikan (DAK)</li><li>- Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Berbasis Komputer (SD)</li><li>- Operasional Dana BOS</li><li>- Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bagi siswa Tidak Mampu SMP</li><li>- Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah Kepala Lembaga SMP atau MTS</li></ul>
--	--	--

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelenggaraan Ujian Tingkat SMP atau MTs dan Pemantapan</li><li>- Pelatihan Olimpiade Berprestasi Sampai Tingkat Internasional</li><li>- Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa</li><li>- Penyelenggaraan Akreditasi SMP</li><li>- Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa SMP</li><li>- Rehabilitasi Sedang atau Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama</li><li>- Pengadaan Mebelair SMP</li><li>- Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar</li><li>- Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik KB atau TK</li><li>- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik</li><li>- Penilaian Angka Kredit (PAK)</li><li>- Peningkatan Kompetensi Guru SMP</li><li>- Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)</li><li>- Forum Ilmiah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</li><li>- Seleksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi</li></ul>
2	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</li><li>- Setifikasi dan kalibrasi alat-alat Kesehatan</li><li>- Penyediaan atau Peningkatan atau Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan</li><li>- Peningkatan Pelayanan Instalasi Farmasi</li><li>- Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan</li><li>- Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan</li><li>- Peningkatan Mutu SDM Kesehatan</li><li>- Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif/Preventatif maupun Kuratif/Rehabilitatif (DBHCHT)</li><li>- BOK Dinas Kesehatan Kab Lamongan</li><li>- Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)</li><li>- Pembinaan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Makanan Air Minum</li><li>- Pengelolaan Limbah Medis Padat</li><li>- Pengembangan Program Kabupaten Sehat</li><li>- Peningkatan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Olahraga</li><li>- Peningkatan Kualitas Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)</li><li>- Peningkatan UKBM melalui Pendampingan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur)</li><li>- Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan</li></ul>

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitasi Penyelenggaraan STBM</li><li>- Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Usia Lanjut</li><li>- Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak</li><li>- Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat</li><li>- Pelayanan Rawat Jalan Gratis Di Puskesmas</li><li>- Pelayanan Rawat Inap Gratis Kelas III Di Puskesmas</li><li>- Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasoinal (PHBN)</li><li>- Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas</li><li>- Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan/ Orang Tidak Mampu</li><li>- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya (Dana Pajak Rokok)</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lamongan</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Babat</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Brondong</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Paciran</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bluluk</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sukorame</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngimbang</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambeng</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mantup</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembangbahu</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sugio</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kedungpring</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dradah</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Modo</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangpilang</li></ul>
--	--	---

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Moropelang</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sukodadi</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumberaji</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pucuk</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tikung</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dermolemahbang</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Deket</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Glagah</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangbinangun</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalitengah</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Turi</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karanggeneng</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekaran</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maduran</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Laren</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Payaman</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tlogosadang</li><li>- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangkembang</li><li>- Kunjungan Konseling Kesehatan oleh Tim Yang Terdiri Dari Bidan Dan Perawat Ponkesdes Dibantu Oleh Mitra Dari Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat (Bantuan Keuangan Provinsi Jatim)</li><li>- Pelayanan Kesehatan Masyarakat</li><li>- Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di FKTL/Sarkes</li><li>- Peningkatan Kesehatan bagi Masyarakat Terdampak</li><li>- Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional</li><li>- Peningkatan Kualitas Laboratorium Kesehatan</li></ul>
--	--	--

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan</li> <li>- Peningkatan Cakupan Imunisasi</li> <li>- Penanggulangan Penyakit Tidak Menular</li> <li>- Pengadaan Sarpras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> <li>- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</li> <li>- Peningkatan Pelayanan Surveilans dan Imunisasi</li> <li>- Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</li> <li>- Kegiatan Operasional Ruang Isolasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (Rusunawa dan Karangembang)</li> <li>- Pembangunan Ponkesdes</li> <li>- Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu</li> <li>- Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas</li> </ul>
3	RSUD SOEGIRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan atau Peningkatan atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan</li> <li>- Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas III di Rumah Sakit</li> <li>- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan)</li> <li>- Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur)</li> <li>- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit RSUD Soegiri</li> </ul>
4	RSUD NGIMBANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas III di Rumah Sakit</li> <li>- Penyediaan atau Peningkatan atau Pemeliharaan Sarana atau dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li> <li>- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit</li> <li>- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit RSUD Ngimbang</li> </ul>
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Jalan Dan Jembatan</li> <li>- Pembangunan Saluran atau Drainase Gorong- gorong</li> <li>- Pembangunan Turap atau Talud atau Bronjong</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jembatan</li> <li>- Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten</li> <li>- Peningkatan dan Pelebaran Jalan Kabupaten</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Jalan Poros Desa Strategis</li> <li>- Pembangunan Jembatan Poros Desa</li> <li>- Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan Alat-alat Berat</li> </ul>
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Pintu Air</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan Pintu Air</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana Alokasi Khusus)</li> <li>- Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan Rutin Bangunan atau Tempat Penampung Air Lainnya</li> <li>- Sosialisasi Pengelolaan Aset dan Perijinan SDA</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa yang Telah Dibangun</li> <li>- Operasional Komisi Irigasi</li> <li>- Pembinaan bagi GHIPPA</li> <li>- Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif secara terpadu (IPDMIP)</li> <li>- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir</li> <li>- Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan normalisasi saluran sungai</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan alat-Alat Berat</li> </ul>
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Program Nasional KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)</li> <li>- Penataan Kawasan Perumahan</li> <li>- Pembangunan Jalan Permukiman</li> <li>- Pembangunan Saluran drainase atau Gorong-gorong permukiman</li> <li>- Pemeliharaan rutin trotoar dan gorong-gorong permukiman</li> <li>- Rehabilitasi atau Pemeliharaan jalan Permukiman</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Rehabilitasi LPJU dan Lampu Hias Permukiman</li><li>- Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Permukiman</li><li>- Fasilitasi kegiatan perumahan lintas kabupaten</li><li>- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan</li><li>- Operasional Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT)</li><li>- Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Permukiman</li><li>- Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana Sanitasi</li><li>- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Dana Alokasi Khusus)</li><li>- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</li><li>- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan</li><li>- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)</li><li>- Pembangunan Gedung Kantor</li><li>- Pendataan Bangunan umum dan cagar Budaya Kabupaten Lamongan</li><li>- Pembinaan Jasa Konstruksi</li><li>- Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah</li><li>- Pemberkasan Aset-aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka kegiatan pensertifikatan</li></ul>
8	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penegakan Perda</li><li>- Proses Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda Atau Tipiring</li><li>- Operasi Pelanggaran Disiplin PNS</li><li>- Pembinaan Pelanggaran Perda</li><li>- Operasi Pemberantasan barang kena Cukai Illegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai</li><li>- Pembekalan Teknis Operasional Tenaga Linmas (Jambore Perlindungan Masyarakat)</li><li>- Pemantapan Tugas Linmas Desa Atau Kelurahan Se Kabupaten</li><li>- Kemitraan Pengembangan Pentas Seni dan Budaya</li><li>- Peringatan Hari Besar Nasional</li><li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan Terhadap Pemilihan Legislatif, Presiden, Gubernur, dan Bupati</li><li>- Monitoring dan Evaluasi Kejadian Atau Peristiwa di Masyarakat</li></ul>

BAB I





		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat</li> <li>- Operasi Yustisi</li> <li>- Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>- Kerjasama pemeliharaan kantrantibmas</li> <li>- Pengamanan Wilayah Terpadu</li> <li>- Patroli Wilayah</li> <li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran</li> <li>- Pembinaan Bagi Anggota Pemadam Kebakaran</li> <li>- Sosialisasi APAR</li> <li>- Operasional kebencanaan dalam rangka perlindungan masyarakat</li> <li>- Jambore Satpol PP Se Jawa Timur</li> <li>- Ketahanan Mental Anggota Satpol PP</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah</li> <li>- Pembekalan Teknis Anggota Trenggana</li> <li>- Peningkatan Kompetensi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran</li> </ul>
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana</li> <li>- Penguatan Kapasitas Mitigasi dan Pencegahan</li> <li>- Pengadaan EWS Atau System Peringatan Dini</li> <li>- Pengembangan dan Operasional Pusdalops Penanggulangan Bencana</li> <li>- Pengadaan sarana dan prasarana atau material bencana banjir dan kekeringan</li> <li>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat</li> <li>- Pengadaan bahan pangan, papan, sandang atau logistik dan sarana prasarana evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam</li> <li>- Operasional Tim Reaksi Cepat dalam keposkoan dan Penanganan Darurat Bencana</li> <li>- Optimalisasi Tim Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (DaLA)</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Bencana</li> </ul>
10	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan stimulan dan sarana penataan lingkungan sosial</li> <li>- Bantuan usaha kesejahteraan bagi masyarakat miskin</li> <li>- Operasional dan pendukung pelaksanaan bantuan sosial pangan</li> <li>- Pendataan dan Pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar</li> <li>- Pemulangan atau pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang terjaring razia</li> <li>- Operasional Pelayanan Penampungan Sementara bagi PMKS</li> <li>- Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Warga Disabilitas</li> <li>- Bimbingan dan Pelatihan Sosial Bagi Anak Bermasalah</li> <li>- Operasional pendampingan dan pendataan penerima bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat keluarga muda mandiri</li> <li>- Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBe PACA)</li> <li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Bantu Bagi Lanjut Usia Terlantar</li> <li>- Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)</li> <li>- Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</li> <li>- Tali Asih bagi para Veteran Pejuang Kemerdekaan, Janda Pahlawan dan Warakawuri</li> <li>- Pembinaan Family Care (FCU)</li> <li>- Operasional Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan dan HKS</li> <li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial ( Puskesos)</li> <li>- Pelatihan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</li> <li>- Operasional cadangan beras pemerintah dan barang bencana</li> <li>- Pendataan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</li> <li>- Penguatan Pelaksanaan PKH</li> <li>- Operasional Penanganan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial</li> <li>- Operasional dan penyewaan rumah singgah pasien rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya</li> <li>- Pemulangan orang terlantar, kehabisan bekal dan kecopetan</li> </ul>
11	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan, penetapan dan pengusulan upah minimum kabupaten (UMK) Lamongan</li> <li>- Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS-Tripartit)</li> <li>- Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja</li> <li>- Penyuluhan pembuatan PP atau PKB (Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama) dan pembentukan LKS (lembaga kerjasama) bipartit di perusahaan</li> <li>- Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaan pelatihan (Cukai)</li> <li>- Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Cukai)</li> <li>- Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja (Cukai)</li> <li>- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Balai Latihan Kerja ( Cukai )</li> <li>- Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaan pelatihan (DID Tambahan))</li> <li>- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat</li> <li>- Monitoring Keberadaan TKA dan penempatan tenaga kerja di Perusahaan</li> <li>- Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA)</li> <li>- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan CTKI bekerja di luar negeri</li> <li>- Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna</li> <li>- Penyebarluasan informasi lowongan kerja dalam negeri dan luar negeri</li> <li>- Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja Melalui Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja ( Cukai )</li> <li>- Bimbingan Konsultasi Managerial dan monev siswa eks BLK</li> <li>- Bimbingan dan Monev Peningkatan Produktivitas SDM dalam Perusahaan</li> <li>- Pengukuran produktivitas individu tenaga kerja perusahaan dan monitoring</li> <li>- Pendampingan Magang Kerja eks Siswa BLK</li> <li>- Pelatihan Transmigrasi Regional</li> <li>- Penempatan dan pemberangkatan transmigrasi</li> </ul>
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak</li> <li>- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sistem Data dan Informasi PUG dan Anak</li> <li>- Pengembangan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan</li> <li>- Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)</li> <li>- Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak</li> <li>- Pengembangan Sistem Pencegahan dan Fasilitas Pendampingan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi</li> <li>- Pengembangan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pembangunan</li> <li>- Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan</li> <li>- Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</li> <li>- Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak</li> <li>- Pembinaan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif</li> </ul>
13	Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan daerah rawan pangan</li> <li>- Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah</li> <li>- Pengembangan desa mandiri pangan</li> <li>- Pengembangan lumbung pangan desa</li> <li>- Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan</li> <li>- Cipta olahan pangan lokal</li> <li>- Promosi atau hasil produksi pertanian atau perkebunan unggulan daerah</li> <li>- Peningkatan mutu dan keamanan pangan</li> <li>- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan tanaman produktif keluarga</li> <li>- Pengembangan cadangan pangan</li> <li>- Pemantauan akses harga dan pasokan pangan</li> <li>- Fasilitas penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat</li> <li>- Fasilitas pembelian gabah oleh Lembaga Pembeli Gabah (LPG)</li> </ul>
14	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</li> <li>- Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan</li> <li>- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengembangan kinerja pengelolaan sampah</li><li>- Pembinaan pengelolaan Limbah B3</li><li>- Penyediaan Pengolahan Sampah (DAK)</li><li>- Penyediaan Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah (DAK)</li><li>- Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)</li><li>- Pengawasan pengelolaan Lingkungan Industri</li><li>- Pengawasan pengelolaan Lingkungan Kegiatan Layanan Jasa dan lainnya</li><li>- Fasilitasi penanganan pengaduan dan pelanggaran lingkungan</li><li>- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</li><li>- Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan</li><li>- Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air</li><li>- Pengelolaan Taman Pendidikan Lingkungan</li><li>- Pengujian kadar polusi limbah padat atau cair</li><li>- Pemantauan Kualitas Udara</li><li>- Pembinaan Adiwiyata</li><li>- Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan</li><li>- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan</li><li>- Koordinasi pembinaan Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL , UKL-UPL, SPPL)</li><li>- Penyusunan Kebijakan Bidang Penataan Lingkungan</li><li>- Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim</li><li>- Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah</li><li>- Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)</li><li>- Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Pemukiman</li></ul>
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</li><li>- Peningkatan Pelayanan Publik Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan</li><li>- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Stelsel aktif pemerintah</li><li>- Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)</li><li>- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu</li><li>- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)</li></ul>

BAB I



		<p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan</p> <p>Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil</li><li>- Peningkatan Pelayanan Jemput Bola dokumen Akta Kelahiran + kematian</li><li>- Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perubahan Akta Pencatatan Sipil</li><li>- Peningkatan Kerja Sama dengan Instansi Terkait dalam Bidang Administrasi Kependudukan</li><li>- Pengembangan Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan</li><li>- Penyebarluasan Informasi Administrasi Kependudukan</li></ul>
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitasi dan Pembinaan Dana Desa</li><li>- Fasilitasi Bagi Hasil Pajak atau Retribusi</li><li>- Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin</li><li>- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa</li><li>- Fasilitasi Peningkatan Tehnologi Tepat Guna</li><li>- Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BUMDes</li><li>- Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Pasar Desa</li><li>- Pemberian Stimulan Pembangunan Desa</li><li>- Pembinaan Dan Lomba Potensi atau Tingkat Perkembangan Desa</li><li>- Pembinaan Lembaga HIPPAM</li><li>- Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa</li><li>- Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd)</li><li>- Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat</li><li>- Pengumpulan, Updating Dan Analisis Data Swadaya Masyarakat</li><li>- Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, Tradisi Dan Budaya Masyarakat</li><li>- Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Perempuan JATIM PUSPA (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur)</li><li>- Fasilitasi Alokasi Dana Desa</li><li>- Fasilitasi Indeks Desa Membangun (IDM)</li><li>- Penyusunan Profil Desa</li><li>- Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan desa (SISKEUDES) APBDes</li><li>- Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan</li></ul>

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembinaan Kader PKK</li><li>- Fasilitasi Pembinaan Taman Posyandu</li><li>- Fasilitasi Perguliran simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</li></ul>
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan Peralatan Pelayanan KB</li><li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB</li><li>- Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana</li><li>- Pembinaan Keluarga Berencana</li><li>- Dukungan Operasional Bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana</li><li>- Pendistribusian Alat Kontrasepsi Bagi Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana</li><li>- Pembinaan dan Penyuluhan Program KKBPK</li><li>- Pembinaan dan Peningkatan Jaringan Mitra Kerja Program KB</li><li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)</li><li>- Dukungan operasional untuk kader</li><li>- Pembinaan pendayagunaan PKB atau PLKB dan Kader</li><li>- Peringatan Momentum Hari Keluarga Nasional</li><li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB</li><li>- Dukungan Media KIE untuk Balai Penyuluhan KB</li><li>- Sosialisasi Pelaporan Dan Evaluasi Serta Hasil Analisis Pendataan Program KB dan Kependudukan</li><li>- Forum Analisis Data Kependudukan dan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan</li><li>- Pembentukan Kampung KB</li><li>- Dukungan Operasional Program KKBPK Serta Pembangunan Lainnya di Kampung KB</li><li>- Pembentukan Pojok kependudukan di kampung KB</li><li>- Penyediaan Sarana Prasarana Rumah Data Kependudukan</li><li>- Pencatatan Pelaporan Data Program Kependudukan, Keluarga Berencana , Pembangunan Keluarga. (BOKB)</li><li>- Pelatihan Teknis Ketrampilan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Operasional PUSYANGATRA</li><li>- Pembinaan dan Pendampingan Bina Ketahanan Remaja dan Kesehatan Reproduksi</li><li>- Pembinaan dan Pendampingan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia</li><li>- Penyediaan Sarana Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia (BKL)</li></ul>

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Operasional Pembinaan Keluarga</li><li>- Penyediaan Sarana Media Lini Lapangan Bina Keluarga (DAK KB)</li></ul>
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"><li>- Manajemen Informasi Publik</li><li>- Optimalisasi Media Komunikasi Publik sebagai pendukung KIP</li><li>- Optimalisasi Sumber Daya Komunikasi Publik</li><li>- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur TIK</li><li>- Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi</li><li>- Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK</li><li>- Pengolahan Data Statistik Sektor</li><li>- Tata kelola persandian</li><li>- Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah</li></ul>
19	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rehabilitasi dan pemeliharaan halte, terminal dan cargo</li><li>- Rehabilitasi dan pemeliharaan alat perlengkapan jalan</li><li>- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Centre</li><li>- Survey Sarana Prasarana Jalan</li><li>- Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir atau juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang</li><li>- Pembinaan Petugas Pengamanan Perlindungan sebidang</li><li>- Monitoring dan Evaluasi Lokasi Pengamanan Sebidang</li><li>- Pengadaan Sarana Prasarana Alat Pengamanan Petugas Perlindungan Sebidang</li><li>- Survey angkutan Umum</li><li>- Pembangunan halte terminal dan cargo</li><li>- Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan</li><li>- Pengadaan Traffic Management Centre (TMC)</li><li>- Pengadaan Dan Pemasangan Alat Perlengkapan Jalan</li><li>- Pengaturan Penertiban Lalu Lintas</li><li>- Operasional Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas</li><li>- Survey Lalu Lintas</li><li>- Monitoring dan Intensifikasi Parkir</li><li>- Manajemen dan Rekayasa Potensi Andalalin</li><li>- Fasilitas Forum Lalu Lintas</li><li>- Pembinaan Dasar Kelalulintasan</li><li>- Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan</li><li>- Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor</li><li>- Pemeliharaan prasarana pengujian kendaraan bermotor</li></ul>

BAB I





		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor</li></ul>
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peringatan Hari Koperasi</li><li>- Pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro</li><li>- Bimtek standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SDM Koperasi dan UMKM</li><li>- Fasilitasi Perijinan Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro</li><li>- Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi</li><li>- Penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi</li><li>- Pendataan Tahunan Koperasi dan UMK</li><li>- Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) (DAK) Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi</li><li>- Fasilitasi peningkatan kualitas design, kemasan dan packaging produk</li><li>- Penumbuhan Wirausaha Baru</li><li>- Pembinaan atau Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Usaha Mikro</li><li>- Pelatihan Tentang Kualitas Mutu Produk</li><li>- Penyelenggaraan Pameran Koperasi dan Usaha Mikro</li><li>- Pengembangan Rumah Kreatif bagi Koperasi dan Usaha Mikro</li><li>- Temu Usaha Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dunia Usaha</li><li>- Pengembangan kerjasama investasi pembiayaan mitra usaha</li><li>- Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro</li><li>- Bintek Perencanaan Usaha Bagi Wirausaha Pemula</li><li>- Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi</li><li>- Penilaian Kesehatan KSP atau USP</li><li>- Pemantauan Pelaksanaan Sanksi dan Rehabilitasi Kelembagaan dan Usaha</li><li>- Pembinaan teknis penyusunan administrasi KSP atau USP</li></ul>
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi</li><li>- Penyelenggaraan pameran investasi</li><li>- Gathering antara pemerintah dan Dunia Usaha di Kabupaten Lamongan</li><li>- Penyusunan buku profil investasi kabupaten lamongan</li><li>- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal</li><li>- Penyusunan Database Investasi di Kab.Lamongan</li></ul>

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi penyusunan laporan kegiatan penanaman modal</li> <li>- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</li> <li>- Fasilitasi program inovasi pembangunan daerah</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap ijin yang dikeluarkan</li> <li>- Peningkatan Pengelolaan Kearsipan</li> <li>- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perijinan</li> <li>- Peningkatan Pelayanan Perijinan</li> <li>- Survey Lapangan Terhadap Permohonan Ijin</li> <li>- Fasilitasi program peningkatan kualitas PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu)</li> <li>- Pemeliharaan Sertifikasi ISO</li> <li>- Intensifikasi PAD IMB dan HO</li> </ul>
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seleksi dan Pembinaan Paskibraka</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda</li> <li>- Pengembangan Pendidikan Kepramukaan di Sekolah</li> <li>- Fasilitasi dan Pembinaan Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kepemudaan</li> <li>- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kepemudaan yang Berbasis Kreatifitas dan Bakat</li> <li>- Pembinaan Perlindungan Pemuda dari Tindak Kekerasan dan Kriminalitas</li> <li>- Seleksi Evaluasi Kepeloporan Kepemudaan Dan Penghargaan Lainnya</li> <li>- Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi</li> <li>- Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Praktisi Olahraga</li> <li>- Mengikuti Kejuaraan di Tingkat Propinsi</li> <li>- Penyelenggaraan Lomba atau Kejuaraan Tingkat Kabupaten</li> <li>- Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah)</li> <li>- Penyelenggaraan Lomba atau Kejuaraan Tingkat Pelajar</li> <li>- Balap Sepeda Tour The Gondang Lamongan</li> <li>- Kejuaraan bola voli junior antar pemuda atau Karang Taruna Desa Se-Kabupaten Lamongan</li> <li>- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga</li> <li>- Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Olahraga</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Lapangan Bola Voly dan Futsal</li> <li>- Pendataan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga</li> <li>- Fasilitasi Penyelenggaraan Senam Kebugaran Jumat Pagi dan Minggu Ceria</li> <li>- Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan Napak Tilas Mayangkara dan Lomba Gerak Jalan Perjuangan Kadet Suwoko</li> <li>- Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Olah Raga Disabilitas</li> <li>- Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola Deket</li> <li>- Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga</li> <li>- Pembangunan Gedung Olahraga (DAK)</li> </ul>
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala</li> <li>- Pengelolaan dan pengembangan museum daerah</li> <li>- Pembinaan adat budaya daerah</li> <li>- Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah (Dana Alokasi Non Fisik)</li> <li>- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah</li> <li>- Gelar Kekayaan Kesenian Daerah</li> <li>- Pembinaan Dewan Kesenian Lamongan (DKL)</li> <li>- Pelatihan pelatih tari tradisional dan modern</li> <li>- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata</li> <li>- Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata</li> <li>- Penyelenggaraan Promosi pariwisata</li> <li>- Pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif</li> <li>- Pengembangan objek pariwisata unggulan</li> <li>- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata</li> <li>- Pengembangan paket wisata</li> <li>- Festival Pariwisata</li> <li>- Monitoring dan evaluasi usaha pariwisata</li> <li>- Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata</li> </ul>
24	Dinas Perpustakaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasarakatan minat baca dan budaya baca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran</li> <li>- Pengembangan minat dan budaya baca</li> <li>- Otomasi perpustakaan</li> <li>- Preservasi bahan pustaka</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervise, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum , perpustakaan desa atau kelurahan, perpustakaan khusus, perpustakaan masyarakat</li> <li>- Pengembangan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan sesuai standar</li> <li>- Monitoring dan evaluasi perpustakaan</li> <li>- Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah</li> <li>- Pengolahan bahan pustaka</li> <li>- Penyusunan Bibliografi</li> <li>- Gerakan Lamongan membaca</li> <li>- Penelusuran local konten atau muatan local Kabupaten Lamongan</li> <li>- Penyebarluasan informasi perpustakaan dan dokumentasi</li> </ul>
25	Dinas Kearsipan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan atau Orientasi Tata Kelola Kearsipan</li> <li>- Sosialisasi atau Penyuluhan atau Pembinaan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah</li> <li>- Sosialisasi peraturan perundang-undangan kearsipan</li> <li>- Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah</li> <li>- Peningkatan pengembangan sarana penyimpanan kearsipan</li> <li>- Peningkatan pemeliharaan kearsipan</li> <li>- Peningkatan Monitoring dan Audit OPD</li> <li>- Peningkatan Monitoring dan Audit Desa atau Kelurahan</li> <li>- Peningkatan Monitoring dan Audit Ormas dan Orpol</li> <li>- Layanan Pemanfaatan Arsip</li> <li>- Penyebarluasan informasi kearsipan dan dokumentasi</li> <li>- Peningkatan pemeliharaan peralatan jaringan informasi</li> <li>- Wisata Layanan Arsip</li> </ul>
26	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir</li> <li>- Pengadaan Sarana Prasarana Produksi Garam</li> <li>- Pembinaan Kelompok Masyarakat Konservasi</li> <li>- Pembinaan Kelompok Pengawas Sumberdaya Perikanan</li> <li>- Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya</li> <li>- Pembinaan dan pendampingan kelompok perikanan budidaya</li> <li>- Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan</li> <li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan</li> <li>- Bantuan Alat dan Benih Perikanan untuk Masyarakat atau Kelompok Masyarakat</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Jalan Produksi Budidaya</li> <li>- Fasilitasi Nelayan Perikanan Tangkap</li> <li>- Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kapal Nelayan</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan KUB</li> <li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan</li> <li>- Restocking Sumberdaya Perikanan</li> <li>- Sosialisasi dan Promosi Gerakan Gemar Makan Ikan (GemarIkan)</li> <li>- Fasilitasi permodalan usaha perikanan</li> <li>- Pembinaan TPI</li> <li>- Fasilitasi Pameran Produk Olahan Perikanan</li> <li>- Pengadaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana TPI</li> <li>- Peningkatan mutu nilai tambah produk perikanan</li> </ul>
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- promosi atas hasil produksi pertanian atau perkebunan</li> <li>- Panen Raya Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Bimtek Pengolahan hasil produk tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>- Pengembangan tanaman pangan</li> <li>- Pengembangan hortikultura dan akabi</li> <li>- Penguatan kelembagaan Kelompok Tani dan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) serta Lembaga Ekonomi Pertanian</li> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi pertemuan Penyuluh pertanian Tk Kabupaten dan Kecamatan</li> <li>- Bimtek peningkatan kapasitas petani dan penyuluh</li> <li>- Pendampingan penyuluh dalam rangka Pengembangan kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan</li> <li>- penyediaan sarana prasarana penyuluhan</li> <li>- Fasilitasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian</li> <li>- Fasilitasi Taman Teknologi Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)</li> <li>- Fasilitasi dan Bimtek Kelompok Petani Kecil KPK (P4K)</li> <li>- Fasilitasi IPDMIP (integrated Participatory Development Management Of Irrigation Project)</li> <li>- Pembangunan / Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya</li> <li>- Fasilitasi PMI Perkebunan</li> <li>- Pembinaan dan Demplot Pengembangan komoditas tebu</li> <li>- Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau</li> <li>- Penanganan panen dan pasca panen</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan</li><li>- Pengembangan Tanaman Perkebunan</li><li>- pengembangan agen hayati dan pengendalian hama penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura</li><li>- Pendampingan Pembiayaan Usaha Pertanian</li><li>- Pendampingan Pengelolaan Alsintan dan UPJA</li><li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian atau Perkebunan Tepat Guna</li><li>- Hipaa Award</li><li>- Rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani dan Jaringan Irigasi Desa(JITUT atau JIDES)</li><li>- Jalan Usaha Tani</li><li>- Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi</li><li>- Penyusunan data Profil Pertanian</li><li>- Penyebaran Informasi Pertanian</li><li>- penyusunan Dokumen Nilai Tukar petani</li><li>- Sinkronisasi Statistik Pertanian</li><li>- Penyusunan dan Pengembangan data spasial LP2B ( Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan pengembangan data pertanian</li></ul>
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular</li><li>- Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak</li><li>- Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban</li><li>- Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Peralatan RPH atau RPU</li><li>- Pembibitan dan Perawatan Ternak</li><li>- Intensifikasi Pengelolaan Pemeliharaan Sapi</li><li>- Bantuan Sarana Produksi, Bibit, Ternak bagi Masyarakat atau Kelompok Masyarakat</li><li>- Peningkatan Dan Pengembangan Produksi Pakan Ternak</li><li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya</li><li>- Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi Potong, dan Kambing atau Domba</li><li>- Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil produk peternakan masyarakat</li><li>- Promosi Produk-produk hasil Peternakan</li><li>- Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan</li><li>- Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat Guna</li><li>- Bimbingan Teknologi Peternakan Tepat Guna</li><li>- Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna</li></ul>

BAB I



29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Metrologi</li> <li>- Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa</li> <li>- Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai (DBHCHT)</li> <li>- Pelaksanaan Operasional Kemetroligian</li> <li>- Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan International</li> <li>- Pengembangan dan pengelolaan Showroom Produk Unggulan</li> <li>- Penumbuhan Kerjasama dan Kemitraan Usaha Bagi IKM</li> <li>- Promosi Dan Misi Dagang</li> <li>- Lamongan Fashion Street Carnival</li> <li>- Invetarisasi Data Volume Ekspor dan Impor</li> <li>- Monitoring Komoditi Kebutuhan Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya</li> <li>- Operasional Sistem Resi Gudang dan Rehabilitasi Fasilitas Gudang</li> <li>- Pembinaan dan Pengelolaan Pasar</li> <li>- Operasi Pasar dan Pasar Murah</li> <li>- Revitalisasi atau Pembangunan Pasar (DAK)</li> <li>- Revitalisasi atau Pembangunan Pasar</li> <li>- Pembinaan Usaha, Sarana dan Prasarana Pedagang</li> <li>- Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan asongan di Kabupaten Lamongan</li> <li>- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga kerja dan Masyarakat (DBHCHT)</li> <li>- Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat</li> <li>- Pembinaan dan Penumbuhan IKM Berbasis Agro</li> <li>- Pembinaan dan Penumbuhan bagi IKM Komoditi Tekstil &amp; Aneka</li> <li>- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Berbasis Komoditi Tekstil dan Aneka (DBHCHT)</li> <li>- Pembinaan dan Penumbuhan bagi IKM Komoditi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika</li> <li>- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Berbasis Komoditi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika ( DBHCHT )</li> <li>- Pengembangan dan Perkuatan Sentra Industri</li> <li>- Peningkatan Kemampuan Teknologi IKM</li> </ul>
----	-------------------------------------	---

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitasi Perkuatan Permodalan bagi IKM</li><li>- Penyusunan Profil, Media Promosi dan Informasi</li><li>- Fasilitasi Aspek Legalitas Usaha</li><li>- Monitoring dan Pengawasan Industri</li><li>- Pengembangan Desain Kemasan Produk IKM</li></ul>
30	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</li><li>- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (PKPT)</li><li>- Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah</li><li>- Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH</li><li>- Koordinasi, monitoring dan evaluasi</li><li>- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</li><li>- Pencanaan Zona Integritas</li><li>- Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li><li>- Pelaksanaan Sapu Bersih Pemungutan Liar (SABER PUNGLI)</li><li>- Monev Laporan Gratifikasi</li><li>- Verifikasi Laporan RAD PPK</li><li>- Verifikasi LHKASN</li><li>- Reviu RKA dan RKA Perubahan</li><li>- Evaluasi SAKIP PD dan LPPD</li><li>- Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li><li>- Review Dokumen RPJMD/RKPD</li></ul>
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sistem Informasi Pembangunan Daerah</li><li>- Integrasi Data Tematik Pembangunan Daerah</li><li>- Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li><li>- Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan</li><li>- Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)</li><li>- Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>- Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>- Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026</li><li>- Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)</li><li>- Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pengembangan Ekonomi</li></ul>

BAB I





		<ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)</li><li>- Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi</li><li>- Penyusunan indikator makro ekonomi</li><li>- Penyusunan rencana Pengembangan kawasan pertanian</li><li>- Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Pengembangan Ketenagakerjaan</li><li>- Pemantapan SDG`S Kabupaten Lamongan</li><li>- pengembangan program pemberdayaan masyarakat</li><li>- Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Lingkup Sub Bidang Pemerintahan</li><li>- Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Sosial</li><li>- Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Lingkup Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>- Fasilitasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</li><li>- Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup</li><li>- Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air</li><li>- Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air</li><li>- Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program (IPDMIP)</li><li>- Penyusunan Rencana Program Prasarana Wilayah</li><li>- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh</li><li>- Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana</li><li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan dan Penanam modal</li></ul>
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang perubahan peraturan KDH tentang penjabaran APBD</li><li>- Verifikasi RKA dan DPA APBD</li><li>- Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD</li><li>- Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan</li><li>- Penyampaian Informasi Keuangan Daerah</li><li>- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</li><li>- Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</li><li>- Peningkatan pelayanan pencairan belanja SKPD</li><li>- Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi dana transfer</li></ul>

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan Administrasi Penatausahaan Belanja Daerah</li> <li>- Penyusunan anggaran kas</li> <li>- Dampingan implementasi gaji</li> <li>- Dampingan Pemeliharaan implementasi SPP, SPM dan SP2D</li> <li>- Penatausahaan laporan keuangan BUD</li> <li>- Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</li> <li>- Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</li> <li>- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tribulanan Konsolidasi</li> <li>- Monitoring, Implementasi dan Dampingan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pada OPD</li> <li>- Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah</li> <li>- Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah</li> <li>- Peningkatan manajemen asset atau barang daerah</li> <li>- Peningkatan pemanfaatan barang daerah</li> <li>- Penatalaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah</li> <li>- Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</li> <li>- Penyusunan Standar Satuan Harga</li> </ul>
33	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Aplikasi E-PBB</li> <li>- Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB</li> <li>- Operasional Pemungutan PBB</li> <li>- Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan</li> <li>- Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan</li> <li>- Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung Reklame</li> <li>- Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah</li> <li>- Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan</li> <li>- Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)</li> <li>- Pendataan Subyek atau Obyek Pajak Daerah Dasar Pelaporan</li> <li>- Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Dasar Pelaporan</li> <li>- Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi</li><li>- Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah</li><li>- Pembuatan Aplikasi Pendapatan Online</li><li>- Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Pendapatan</li></ul>
34	Badan Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas</li><li>- Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis</li><li>- Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural</li><li>- Penyelenggaraan Diklat Pemantapan Tugas Jabatan</li><li>- Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan</li><li>- Pengiriman Diklat, Khursus, Seminar, Lokakarya,Bimtex, Workshop, Studi Banding, Benchmarking Dan Studi Lapangan</li><li>- Penyelenggaraan Uji Kompetensi Bagi Calon Pejabat</li><li>- Proses Administrasi Perpanjangan Tenaga Kontrak Kerja</li><li>- Penyusunan Dokumen Formasi Jabatan PNS</li><li>- Pembinaan Dan Evaluasi Penerbitan Angka Kredit Jabatan Fungsional</li><li>- Seleksi Penerimaan Calon PNS</li><li>- Proses Penanganan Kasus -Kasus Pelanggaran Disiplin PNS</li><li>- Sosialisasi dan pembinaan Dewan Pengurus dan anggota Korpri</li><li>- Implementasi dan pengembangan aplikasi E-Performance</li><li>- Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun PNS Dan Pelepasan PNS Purna tugas</li><li>- Proses Administrasi Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha Dan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi</li><li>- Pembinaan Dan Penyelesaian Pengajuan Izin Perceraian Dan Perkawinan Istri Yang Ke-Dua Dan Seterusnya</li><li>- Sistem Aplikasi Dan Peremajaan Data Kepegawaian</li><li>- Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Dan Peninjauan Masa Kerja PNS Tenaga Non Kependidikan</li><li>- Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Dan Peninjauan Masa Kerja PNS Tenaga Kependidikan</li><li>- Penempatan PNS</li><li>- Pelayanan Mutasi PNS Tenaga Kependidikan</li></ul>
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penelitian atau Kajian Politik dan Kebijakan Pemerintahan Umum</li><li>- Penelitian atau Kajian Pelayanan Publik</li><li>- Penelitian atau Kesejahteraan Masyarakat</li></ul>

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Penelitian atau Kajian Pemberdayaan Perempuan</li><li>- Penelitian atau Kajian Ekonomi Kerakyatan dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</li><li>- Penelitian atau Kajian Perindustrian, Perdagangan, BUMD dan Pariwisata</li><li>- Penelitian atau Kajian Keagamaan, Ketentraman dan Ketertiban</li><li>- Penelitian atau Kajian Sosial, Budaya, Kependudukan dan Kepemudaan</li><li>- Penelitian atau Kajian Investasi Pemerintah Daerah</li><li>- Penelitian atau Kajian Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan</li><li>- Penelitian atau Kajian Lingkungan Hidup</li><li>- Penelitian atau Kajian atau Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Jejaring Teknologi</li><li>- Penelitian atau Kajian atau Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bioteknologi</li><li>- Penelitian atau Kajian atau Pengembangan Rekayasa dan Rancangan Bangun Teknologi Tepat Guna</li><li>- Pengembangan SIDA di Kabupaten Lamongan</li><li>- Penganugerahan Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten dan Fasilitasi Penganugerahan Inovasi Tingkat Jawa Timur serta Nasional</li></ul>
36	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembahasan Rencana Raperda</li><li>- Hearing atau Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat dan agama</li><li>- Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD</li><li>- Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah</li><li>- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD</li><li>- Penyusunan LPJ atau LKPJ Kepala Daerah</li><li>- Fasilitasi penyusunan Raperda Inisiatif</li><li>- Koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Daerah</li><li>- Menyusun Risalah-risalah Rapat Paripurna</li><li>- Kegiatan Reses</li><li>- Kegiatan pelaksanaan hari besar nasional</li><li>- Fasilitasi kehumasan dan protokol</li><li>- Pengelolaan perpustakaan</li><li>- Peningkatan kualitas penyaluran layanan aspirasi masyarakat</li><li>- Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi melalui media cetak</li></ul>

BAB I



37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi forum komunikasi deteksi dini pada masyarakat</li> <li>- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat</li> <li>- Pembinaan dan pengamanan wilayah</li> <li>- Fasilitasi kerjasama tim terpadu penanganan konflik sosial</li> <li>- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama</li> <li>- Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa</li> <li>- Pengawasan dan Pembinaan Orang Asing, WNI Keturunan</li> <li>- Pemantauan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat</li> <li>- Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)</li> <li>- Fasilitasi kegiatan Resimen Mahasiswa</li> <li>- Pembinaan Deradikalisasi dan Wasbang</li> <li>- Fasilitasi penyaluran Bantuan LSM</li> <li>- Fasilitasi dan verifikasi Penyaluran Bantuan Dana Partai Politik</li> <li>- Pembinaan organisasi Kemasyarakatan Organisasi Pemuda dan LSM</li> <li>- Pembinaan Integrasi Bangsa</li> <li>- Monitoring Kegiatan Poleksosbud</li> <li>- Aplikasi Sistem Informasi Database</li> <li>- Peningkatan Kesadaran Politik Kaum Perempuan</li> <li>- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>- Fasilitasi kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM</li> <li>- Pembinaan Purnawirawan TNI POLRI dan SIPIL</li> <li>- Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI POLRI</li> <li>- Sosialisasi Undang-Undang Pemilu bagi Parpol dan Masyarakat</li> </ul>
38	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Pembinaan Dan Pendampingan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)</li> <li>- Pengendalian Pembangunan Daerah</li> <li>- Fasilitasi Pelaporan e-Monev</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Pengelola Pembangunan</li> </ul>

## BAB I



- Penyusunan Program Administrasi Pembangunan
- Pelaksanaan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur
- Penyusunan Laporan dan Program pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lamongan
- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah
- Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Administrasi Kewilayahan
- Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- Fasilitasi dan Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dan Kelurahan
- Fasilitasi Dan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
- Fasilitasi Pembinaan , Pengamanan dan Ketertiban Wilayah
- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
- Fasilitasi Penyusunan Pelaporan Pemerintahan Daerah
- Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai
- Stabilisasi perekonomian Kabupaten Lamongan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha BUMD dan BLUD
- Monitoring Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Mikro
- Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Mental Dan Spritual
- Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kesejahteraan Sosial
- Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat
- Penyaluran Bahan Makanan Pokok Bagi Masyarakat Kabupaten Lamongan
- Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
- Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan
- Penyelenggaraan Safari Ramadhan
- Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam
- Pembinaan Penghafal Al-Qur`an Kabupaten Lamongan.
- Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan rukyat
- Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba

## BAB I



- Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian
- Fasilitasi Dan Pemantauan Pemanfaatan Energi
- Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- Fasilitasi Dan Koordinasi di Bidang Pertambangan Mineral Batuan
- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Daerah
- Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga
- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga
- Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama
- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Kerjasama Daerah
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
- Pemantapan Bidang Ketatalaksanaan
- Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Publik
- Pemantapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten
- Fasilitasi Peliputan Media Massa
- Publikasi Informasi Melalui Media Massa
- Sosialisasi Perundang - Undangan Bidang Cukai ( DBHCHT)
- Penghimpunan Dan Pengolahan Informasi Melalui Media Massa
- Fasilitasi kunjungan kerja atau inspeksi kepala daerah atau wakil kepala daerah
- Penatalaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN)
- Publikasi Melalui Media Komunikasi Visual
- Operasional Radio Daerah
- Publikasi Peraturan Perundang-undangan
- Bimbingan Teknis Ke PPATan
- Sosialisasi Produk Perundang-undangan
- Penyuluhan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum
- Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> <li>- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah</li> <li>- Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Lainnya</li> <li>- Penanganan Kasus Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> <li>- Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemda</li> <li>- Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah</li> <li>- Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Setda</li> <li>- Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda</li> <li>- Fasilitasi Penyusunan Dokumen Evaluasi</li> <li>- Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan</li> <li>- Dialog atau Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan atau Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat</li> <li>- Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara atau Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Luar Negeri</li> <li>- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya</li> <li>- Kenal Pamit MUSPIDA</li> <li>- Pelaksanaan Kegiatan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional)</li> <li>- Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</li> <li>- Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah</li> <li>- Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda</li> </ul>
39	Kecamatan Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat</li> <li>- Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan</li> </ul>

## BAB I





		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Jetis</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tumenggungan</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukorejo</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sidoharjo</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tlogoanyar</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sidokumpul</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukomulyo</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Banjarmasin</li> </ul>
40	Kecamatan Babat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babat</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Banaran</li> </ul>
41	Kecamatan paciran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> <li>- Fasilitas Dan Desa</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Blimbing</li> </ul>
42	Kecamatan Brondong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> <li>- Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong</li> </ul>

## BAB I



43	Kecamatan Turi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> <li>- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali</li> </ul>
44	Kecamatan Pucuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> </ul>
45	Kecamatan Sukodadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> </ul>
46	Kecamatan Tikung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
47	Kecamatan Deket	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> <li>- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat</li> <li>- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali</li> </ul>
48	Kecamatan Kalitengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> <li>- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali</li> </ul>
49	Kecamatan Kembangbahu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
50	Kecamatan Mantup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
51	Kecamatan Modo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
52	Kecamatan Bluluk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
53	Kecamatan Karangbinangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> <li>- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali</li> </ul>
54	Kecamatan Glagah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat</li> <li>- Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> <li>- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali</li> </ul>
55	Kecamatan Ngimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
56	Kecamatan Sugio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> </ul>

## BAB I



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
57	Kecamatan Karanggeneng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat</li> <li>- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali</li> </ul>
58	Kecamatan Sambeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
59	Kecamatan Kedungpring	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
60	Kecamatan Sekaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
61	Kecamatan sarirejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> </ul>

## BAB I



## 67 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021

Pemerintah Kabupaten Lamongan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
62	Kecamatan Solokuro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> <li>- Fasilitas pengembangan potensi ekonomi</li> </ul>
63	Kecamatan Maduran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
64	Kecamatan Sukorame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>
65	Kecamatan Laren	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Pembinaan Organisasi Kepemudaan</li> <li>- Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES</li> <li>- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitas Kemiskinan</li> </ul>

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

### 1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

❖ Dasar hukum dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal adalah:

✓ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan

## BAB I



berdasarkan SPM, SPM menjadi prioritas baik perencanaan maupun anggaran

- ✓ PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM;  
Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya
- ✓ Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;  
Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dalam DOKREN, dan pelaksanaan SPM pelaporan dan evaluasi
- ✓ Peraturan Menteri Teknis Terkait Dengan Penerapan SPM, yaitu :

#### **1. Bidang Pendidikan**

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

#### **2. Bidang Kesehatan**

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

#### **3. Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat**

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

#### **4. Bidang Trantibumlinmas**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

## BAB I



5. Bidang Sosial

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial Pada Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dan di Kabupaten/Kota

❖ Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Lamongan Selama Satu Tahun

1. Pendidikan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%
3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

2. Kesehatan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	100%
2. Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	100%
3. Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
4. Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
6. Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabet Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

BAB I





	standar	
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat	Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus (Hiv)	Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%

3. Pekerjaan Umum

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%

4. Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%

5. Trantibunlinmas

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%

BAB I



4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

6. Sosial

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Tahun 2021 di Kabupaten Lamongan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut (lebih jelas sebagaimana **Lampiran 1**) :

Tabel 2.1

Capaian kinerja makro Tahun 2021 di Kabupaten Lamongan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020 (N-1)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (N)	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,58	73,12	0,7440
2	Angka Kemiskinan	13,85%	13,86%	-0,0722
3	Angka Pengangguran	5,13%	4,90%	-4,4834
4	Pertumbuhan Ekonomi	-2,65%	3,43%	78
5	Pendapatan Per Kapita	Rp. 32,93,-(M)	Rp. 30,27,-(M)	-8,0777
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,296	0,292	-1,3514

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### 2.2.1.Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Terlampir (Lampiran 2)

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Terlampir (Lampiran 2)

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terlampir (Lampiran 3)

## 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja yang disusun dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat, sehingga kemudian sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban yang diukur adalah sasaran, program dan kegiatan yang prosesnya adalah sejauh mana sasaran, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran ataupun Tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan beserta indikatornya, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, permasalahan

## BAB II



dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target- target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, sebagai dasar pengambilan kebijakan tahun yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

#### a. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2021 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021. Secara umum program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran dari **23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis** dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 dan secara umum untuk Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik dan tercapai, apabila terdapat indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan segera dilakukan evaluasi dan upaya-upaya perbaikan lebih lanjut.

Dari Kelima **Misi** tersebut diimplementasikan menjadi **5 (lima) Tujuan** dengan **10 (sepuluh) Indikator Tujuan** dan **23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis** yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan No. 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Kabupaten Lamongan Atas Peraturan Bupati Lamongan No. 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021, dengan **39 (tiga puluh sembilan) Indikator kinerja Sasaran Strategis** dan **215 (dua ratus lima belas) Program** yang secara keseluruhan telah dilaksanakan pada Tahun 2021

## BAB II



Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau Celah kinerja baik positif atau negatif (**Peformance gap**). Selanjutnya atas dasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapat strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (**Performance improvement**).

Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan Tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut :

**Misi I** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )	BASELINE 2016	REALISASI				2021		CAPAI-AN
			2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Pembangunan	70,34	71,11	71,97	72,57	72,58	71,44 – 71,94	73,12	102,27

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (**IPM**), merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

**Misi II** : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.

**Tujuan** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )	BASELINE 2016	REALISASI				2021		CAPAI-AN (%)
			2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	
1.	% Pertumbuhan ekonomi	5,86	5,52	5,45	5,44	1,16	5,60 - 6,60	3,43*	
2.	PDRB per Kapita	26.690.000	28.920.000	31.535.000	33.414.864	32.932.780	42.900.000	39.725.484,6	-
3.	Inflasi	1,52	3,12	2,4	1,86	1,88	3,00 – 4,00	1,76	
4.	Indeks Gini	0,304	0,32	0,32	0,319	0,296	0,314-0,299	0,292	-

BAB II



Terhadap realisasi Indikator Tujuan diatas, pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) indikator melampaui target dan 2 (dua) indikator data belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

**Misi III** : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

**Tujuan** :Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

No	INDIKATOR ( IKU )	BASELINE 2016	2017	2018	2019	2020	2021		CAPAIAN ( % )
							TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Kinerja Infrastruktur	66,80	77,14	78,16	79,56	80,83	80,24	82,54	102,87
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,65	64,20	66,22	67,93	72,67	70,61	64,92	91,94

**Misi IV** : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

**Tujuan** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )	BASELINE 2016	2017	2018	2019	2020	2021		CAPAIAN ( % )
							TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Reforma si Birokrasi	-	-	63,22	65,02	66,30	62,50	Belum dirilis KemenPAN RB	-

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang berpengaruh penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

**Misi V** : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal

**Tujuan** : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, dan berdasarkan nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

BAB II



							TARGET	REALISASI	
1.	% Tingkat Kemiskinan	14,89	14,42	13,80	13,21	13,85	12,74 – 10,00	13,86	91.20
2.	% Tingkat Penganggura Terbuka	3,56	4,12	3,17	4	5,13	3,45 – 3,00	4,90	57,95

b. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau Celah kinerja baik positif atau negatif (*Performance gap*). Selanjutnya atas dasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapat strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*Performance improvement*).

Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan Tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut :

**Misi I** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )	BASELINE 2016	REALISASI				2021		CAPAI-AN
			2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )	70,34	71,11	71,97	72,57	72,58	71,44 – 71,94	73,12	102,27

BAB II





Indikator Kinerja Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lamongan terus mengalami kenaikan, terbukti berdasarkan nilai capaian IPM dari tahun 2018 sebesar **71,97** di tahun 2019 meningkat menjadi **72,57** atau naik sebesar 0,86 dan tahun 2020 sebesar **72,58**. Tahun 2021 nilai capaian IPM meningkat menjadi **73,12**. Hal ini karena didukung strategi yang tepat, antara lain yaitu Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan Pendidikan antara lain dengan memperluas sekolah inklusi baik tingkat SD maupun SMP, meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendukung ketersediaan perpustakaan di seluruh Desa/Kelurahan (474) dan pojok baca di tempat-tempat pelayanan publik. Sedangkan meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat melalui kegiatan Home Care Service serta penanganan pasien-pasien Covid-19 secara optimal.

Meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19, proses belajar mengajar siswa tetap diupayakan dapat berjalan dengan baik melalui sistem online atau daring (dalam jaringan) guna mencegah dan memperkecil penyebaran Covid-19.

Nilai capaian IPM di Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 sebesar 73,12 lebih tinggi jika dibanding capaian IPM Jawa Timur tahun 2021 sebesar 72,14 dan capaian IPM Nasional tahun 2021 sebesar 72,29.

- Misi II** : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.
- Tujuan** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2016	REALISASI				2021		CAPAI-AN (%)
			2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	
1.	% Pertumbuhan ekonomi	5,86	5,52	5,45	5,44	1,16	5,60 - 6,60	3,43*	
2.	PDRB per Kapita	26.690.000	28.920.000	31.535.000	33.414.864	32.932.780	42.900.000	39.725.484,6	-
3.	Inflasi	1,52	3,12	2,4	1,86	1,88	3,00 – 4,00	1,76	

BAB II



4.	Indeks Gini	0,304	0,32	0,32	0,319	0,296	0,314-0,299	0,292	-
----	-------------	-------	------	------	-------	-------	-------------	-------	---

Terhadap realisasi Indikator Tujuan diatas, pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) indikator melampaui target dan 2 (dua) indikator data belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Terhadap indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Prosentase pertumbuhan ekonomi**

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mendapat tekanan yang berat mengalami kontraksi sebesar -1,16% karena dampak yang signifikan adanya Pandemi Covid-19. Namun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan mulai Tribulan Ketiga Tahun 2021 tumbuh walaupun belum terlalu tinggi. Kondisi tersebut masih lebih baik jika dibandingkan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini disebabkan masih adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak secara langsung pada ekonomi Global dan berimbas pada perekonomian Regional, Nasional maupun Daerah.

b. **PDRB per Kapita**

Tahun 2020, angka PDRB per Kapita Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 39.725.484,60. PDRB per Kapita tahun 2021 menurun jika dibanding capaian tahun 2020, dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan roda perekonomian lesu dengan adanya kebijakan pemberlakuan PPKM oleh Pemerintah.

**Misi III** : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

**Tujuan** :Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

No	INDIKATOR ( IKU )	BASELINE 2016	2017	2018	2019	2020	2021		CAPAIAN ( % )
							TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Kinerja Infrastruktur	66,80	77,14	78,16	79,56	80,83	80,24	82,54	102,87
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,65	64,20	66,22	67,93	72,67	70,61	64,92	91,94

Terhadap realisasi indikator Tujuan diatas, pada tahun 2021 capaian indikator melampaui target, meningkat dibanding tahun 2020. Hal ini didukung adanya program dan kegiatan perbaikan serta pembangunan

BAB II



jalan dan jembatan. Tahun 2021 sebesar 97,5% Panjang jalan dalam kondisi mantap dan 81,15% Jumlah jembatan Kabupaten dalam kondisi baik. Selain itu didukung adanya rehab dan pembangunan irigasi, normalisasi waduk, penanganan banjir secara terintegrasi dan rehab rumah layak huni, pembangunan Rusunawa serta program dan kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 sebesar 64,92 atau tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 70,61. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan perhitungan IKLH berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berwawasan Lingkungan. Selanjutnya sesuai Surat Edaran tersebut maka penentuan target-target Tujuan, Sasaran dan Program yang berwawasan lingkungan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 segera disesuaikan di tahun 2022.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja berwawasan lingkungan antara lain yaitu Pembinaan intensif terhadap sekolah Adiwiyata, Pembuatan Ruang Terbuka Hijau dan Penghijauan lingkungan, Penanganan dan pengelolaan sampah menjadi bahan bermanfaat yang terintegrasi, Penyediaan fasilitas bagi disabilitas di fasilitas umum serta Pembinaan dan pengawasan intensif terhadap industri terkait pengelolaan lingkungan hidup

**Misi IV** : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

**Tujuan** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2016	2017	2018	2019	2020	2021		CAPAIAN (%)
							TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	63,22	65,02	66,30	62,50	Belum dirilis KemenPAN RB	-

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang berpengaruh penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

BAB II



dan skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebesar 82,62 naik dibanding tahun 2020 sebesar 81,78. Pada tahun 2020 capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan sebesar 66,30 (**Predikat B**), melampaui target yang ditetapkan sebesar 62,00. Untuk capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 belum dirilis oleh Kementerian PAN dan RB. Sebagai komitmen bersama dan sebagai upaya peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 telah dibentuk Agen Perubahan pada setiap Perangkat Daerah dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain berupa Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penerapan berbagai aplikasi elektronik dan menyatukan pelayanan publik dalam Mall Pelayanan Publik (MPP), Peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Diklat dan Manajemen Karier, Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap Semester, Pendampingan Zona Integritas terhadap 100 Unit Pelayanan Publik (sektor Pendidikan, kesehatan, perangkat daerah dan Kelurahan/Desa).

- Misi V** : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal
- Tujuan** : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, dan berdasarkan nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2016	2017	2018	2019	2020	2021		CAPAIAN (%)
							TARGET	REALISASI	
1.	% Tingkat Kemiskinan	14,89	14,42	13,80	13,21	13,85	12,74 – 10,00	<b>13,86</b>	91.20
2.	% Tingkat Penganggura Terbuka	3,56	4,12	3,17	4	5,13	3,45 – 3,00	<b>4,90</b>	57,95

Terhadap realisasi indikator Tujuan, pada indikator Prosentase Tingkat Kemiskinan realisasi tahun 2021 sebesar 13,86 dan 2020 sebesar 13,85 atau tidak tercapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya masa Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak kepada kondisi ekonomi

BAB II



masyarakat akibat adanya beberapa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lesunya ekonomi karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai level daerah. Namun demikian untuk mengatasi kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan beberapa program lintas sektor yang mempunyai sasaran kepada masyarakat kurang sejahtera antara lain kegiatan gerakan Ayo Beli Produk Lamongan, pelatihan wirausaha secara online bagi masyarakat kurang sejahtera, pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat, pembagian sembako, stimulan berupa biaya sekolah bagi anak sekolah mulai SD, SMP dan Perguruan Tinggi, rawat inap dan rawat jalan gratis serta Home Care Service masyarakat kurang sejahtera dalam pelayanan kesehatan, pemberian bantuan/ pendampingan masalah-masalah sosial serta rehab rumah tidak layak huni.

Sedangkan untuk capaian indikator Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 sebesar 4,90% atau tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,45-3,00%. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pengangguran akibat adanya beberapa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan dikarenakan terdampak lesunya ekonomi Global dan adanya bonus demografi serta adanya dampak penerapan PPKM di masa Pandemi Covid-19 bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dari 10 (sepuluh) Indikator Tujuan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan, capaian kinerja 4 (empat) indikator melampaui target, 1 (satu) indikator belum dirilis oleh KemenPAN dan RB serta 5 (lima) indikator belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu Prosentase Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Prosentase Tingkat Kemiskinan dan Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu Masih belum selesainya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sehingga mengakibatkan :

1. Terjadinya kontraksi perekonomian Global yang berdampak pada perekonomian Regional, Nasional dan Daerah.
2. Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah sehingga berdampak pada pergerakan roda perekonomian di Kabupaten Lamongan.
3. Pengalihan anggaran Tahun 2021 untuk penanganan Pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi pelaksanaan

## BAB II



program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

c. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

I. Misi I, dengan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) Sasaran serta 2 (dua) indikator kinerja Sasaran.

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua	Indeks Pendidikan	0,639	98,61	0,651	99,50	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,806	100,88	0,808	100,80	Dinas Kesehatan

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa indikator Indeks Pendidikan tahun 2021 terealisasi sebesar 0,651 meningkat sebesar 0,012 dibanding tahun 2020 sebesar 0,639. Sedangkan capaian indikator Indeks Kesehatan tahun 2021 terealisasi sebesar 0,808 atau meningkat sebesar 0,002 dibanding tahun 2020 sebesar 0,806.

II. Misi II dengan 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran serta 8 (delapan) indikator kinerja Sasaran

Misi II : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	104,84	101,00	106,81	102,70	Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Keswan
		% Pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian	-0,58	- 722,40	Belum dirilis BPS	-	
2	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan	% Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan	-4,63	- 168,03	Belum dirilis BPS	-	Dinas Perindustrian dan

BAB II



	Perdagangan	% Pertumbuhan lapangan usaha per-dagangan	-12,98	- 50,77	Belum dirilis BPS	-	Perdagangan
3	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	% Koperasi Berkualitas	62,33%	100,53	66,20%	101,80	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		% Usaha Kecil thd Usaha Mikro & Kecil	9,18%	102,00	9,23%	100,00	
4	Meningkatnya realisasi investasi	% Peningkatan realisasi Investasi	40,14 %	250,00	42,00%	210,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5	Meningkatnya kunjungan Wisatawan	% Peningkatan kunjungan wisata	-56,47%	- 0,30	-33,6%	-14,51%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator tahun 2021 yang belum dirilis oleh BPS, yakni prosentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian, prosentase pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dan prosentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan. Sedangkan untuk 4 (empat) indikator lainnya dapat memenuhi bahkan melampaui target dan meningkat jika dibanding tahun 2020, yakni indikator Nilai Tukar Petani, %Koperasi berkualitas, %Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil dan %Peningkatan realisasi investasi. Selain itu terdapat 1 (satu) indikator %Peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun 2021 terealisasi - 33,6% atau meningkat jika dibanding realaisasi tahun 2020 sebesar - 56,47%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa target indikator tahun 2021 terdapat 3 (tiga) indikator yang belum dirilis oleh BPS, yakni prosentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian, prosentase pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dan prosentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan. Terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yakni persentase peningkatan kunjungan wisata. Hal ini disebabkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa Pandemi Covid-19. Sedangkan terdapat 3 (tiga) indikator yang telah mencapai target yakni persentase koperasi berkualitas, persentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil. Pada pencapaian indikator persentasi koperasi berkualitas dapat ditunjukkan adanya penambahan jumlah koperasi berkualitas sebanyak 670 unit dari 1.012 unit. Sedangkan pada peningkatan usaha kecil ditunjukkan dengan adanya pertambahan jumlah usaha sebanyak 23.286 dari usaha mikro sebanyak 229.098 unit. Sedangkan pada indikator peningkatan realisasi investasi

BAB II





ditunjukkan dengan bertambahnya nilai investasi Tahun 2021 PMDN maupun PMA sebesar Rp. 14,89 T.

Terhadap 3 (tiga) indikator yang mengalami kenaikan tersebut didukung dengan adanya kegiatan antara lain :

- 1. Lomba dan pendampingan Koperasi Sehat;
  - 2. Pendampingan Usaha Mikro dan Kecil Menengah dalam legalitas, desain kemasan, pemasaran dan memberikan kesempatan berusaha dalam event-event tertentu;
  - 3. Memfasilitasi legalitas usaha;
- Memberikan kemudahan perijinan kepada investor dan melaksanakan promosi potensi-potensi daerah pada event-event tertentu.

III. Misi III dengan 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran serta 9 (sembilan) Indikator kinerja Sasaran.

**Misi III** : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

**Tujuan** : Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	Indeks infrastruktur jalan	84,56	100,43	87,10	102,40	Dinas PU Bina Marga
		Indeks infrastruktur jembatan	83,30	100,10	85,18	101,44	
		Indeks irigasi	76,43	100,38	77,24	100,08	Dinas PU SDA
		Indeks layanan lalu lintas & angkutan jalan	67,19	105,38	65,30	100,23	Dinas Perhubungan
		Indeks infrastruktur permukiman	79,30	107,12	80,66	107,92	Dinas Perkim
2	Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan serta pengendalian bencana alam	Indeks Kualitas Air (IKA)	68,18	100,23	59,52	118,80	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,27	107,73	84,04	104,29	
		Indeks tutupan lahan	58,91	113,88	38,84	84,95	
		Prosentase desa Tangguh bencana	74,64%	100,00	97,44%	106,43	BPBD

BAB II





Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 seluruh indikator terealisasi dan dapat memenuhi target bahkan melampaui target yang ditetapkan dan jika dibanding tahun 2020 sebagian besar terdapat kenaikan capaian. Terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu Indeks tutupan lahan, dikarenakan adanya perubahan pedoman dan sistem penghitungan sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SE.4/ Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

IV. Misi IV dengan 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran serta 11 (sebelas) Indikator kinerja Sasaran.

Misi IV : Memantapkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah	Nilai SAKIP	A (skor 81,30)	100,00	A	100,00	Bagian Organisasi Setda
		Nilai LPPD	ST	100,00	ST	100,00	Bagian Tata Pemerintahan Setda
		Prosentase kemampuan fiskal	102,07%	102,07	106%	106,00	BPKAD
		Derajad desentralisasi	16,97%	102,85	21,40%	125,89	BAPENDA
		Opini pemeriksa eksternal	WTP	100,00	WTP	100,00	Inspektorat
		Prosentase Perangkat PD yg tidak terdapat temuan material & keuangan	94,70%	100,64	96,05%	101,11	
2	Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah Penelitian & kajian yg dipublikasikan di jurnal nasional	>1	100,00	1	100,00	BALITBANGDA
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks profesionalitas ASN	86,51	104,23	87,73	104,44	Badan Kepegawaian Daerah
4	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,78	100,64	82,62	101,05	Sekretariat Daerah, Set. DPRD, Disduk-pencapil, Dinas Kearsipan, Dinas Perpustakaan
5	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik Governance (e-Gov)	Pemeringkatan e-Government Indonesia ( PeGI )	Penilaian dihentikan	-	3,32	105,73	Dinas Kominfo

BAB II



Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) indikator terealisasi memenuhi target bahkan melampaui target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan capaian jika dibanding tahun 2020, khususnya pada indikator Derajat desentralisasi memiliki capaian tertinggi dan peningkatan realisasi tertinggi dibanding tahun 2020.

V. **Misi V dengan 1 (satu) Tujuan, 9 (sembilan) Sasaran dan 10 (sepuluh) Indikator kinerja Sasaran.**

**Misi V :** Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Teniteram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal.

**Tujuan :** Mewujudkan Kehidupan Bermsyarakat yang Aman, Teniteram dan Damai berdasarkan Nilai-nilai Agama, dan Hukum melalui Pemeberdayaan Masyarakat, Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS	% Penurunan PMKS	3,60%	119,02	3,58%	118,00	Dinas Sosial
2	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	0,16	131,25	0,16	131,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Indeks Pembangunan Gender	88,59	98,20	Belum dirilis BPS	-	Dinas PP dan PA
		% Laju pertumbuhan penduduk	0,27%	59,09	0,037%	1.757	Dinas PP dan KB
4	Terwujudnya Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	16	228,57	34	425,00	Dinas PMD
5	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	% Peningkatan prestasi pemuda dan atlit	12%	50,00	41%	136,67	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah	Jumlah seni budaya lokal & benda situs cagar yg dilestarikan	111	100,00	119	100,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7	Meningkatnya penduduk yang bekerja	% Penduduk yang bekerja	94,87%	98,82	95,10%	98,50	Dinas Tenaga Kerja
8	Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan	% Konflik sosial yang ditangani	100,00 %	100,00	100,00%	100,00	Bakesbangpol
9	Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum	% Penegakan pelanggaran PERDA dan gangguan trantibum yg diselesaikan	100,00 %	100,00	100,00%	100,00	Satpol PP

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) indikator tahun 2021 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yakni indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sedangkan 9 (Sembilan) indikator pada tahun 2021 terealisasi dan memenuhi target bahkan melampaui target yang ditetapkan dan terjadi kenaikan jika dibanding tahun 2020.

BAB II



d. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan berdasarkan **Misi** dan **Tujuan** sebagai berikut :

I. **Misi I** : Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

NO	SASARAN	INDIKAT OR	TARGET 2021	REALISASI						CAPAI - AN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua	Indeks Pendidikan	0,654 – 0,659	0,62	0,625	0,635	0,637	0,638	0,651	99,54
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,801 – 0,804	0,80	0,796	0,796	0,804	0,806	0,808	100,87

**Sasaran 1**, Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas untuk semua, dilaksanakan Dinas Pendidikan.

Dari 1 (satu) indikator Sasaran diatas, pada tahun 2021 terealisasi sebesar 0,651 atau tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) yang merupakan salah satu faktor penentu Indeks Pendidikan, tidak memenuhi target. Hal lain yang memperngaruhi adalah penduduk yang berpendidikan tinggi yang bekerja diluar wilayah Kabupaten Lamongan dan tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Lamongan, yang mana dalam penghitungannya dikeluarkan dari Anggota Rumah Tangga (ART).

**Sasaran 2**, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dilaksanakan Dinas Kesehatan.

Dari 1 (satu) indikator Sasaran diatas, pada tahun 2021 terealisasi sebesar 0,808 atau melampaui target yang ditetapkan. Hal ini didukung Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) yang merupakan salah satu faktor penentu Indeks Pendidikan, tidak memenuhi target. Hal lain yang sangat berpengaruh adalah penduduk yang berpendidikan tinggi yang bekerja

BAB II



diluar wilayah Kabupaten Lamongan dan tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Lamongan, yang mana dalam penghitungannya dikeluarkan dari Anggota Rumah Tangga (ART).

II. Misi II, Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.

Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada Misi II, terdapat 5 (lima) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI						CAPAI-AN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan	Nilai Tukar Petani	104,00	102,00	104,66	104,76	104,00	104,84	106,81	102,70
		% Pertumbuhan PDRB lapangan Usaha pertanian	4,20 - 4,75	3,68	-2,33	0,12	0,12	-0,58	Belum dirilis BPS	-
2	Meningkatnya pertumbuhan Perdagangan	% Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan	7,79% - 9,00%	12,49%	9,84%	12,80%	11,66%	-4,63%	7,20	92,43

		% Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan	6,60% - 7,60%	9,02%	6,95%	7,10%	6,15%	-12,98%	7,03	106,52
3	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	% Koperasi berkualitas	65%	52,63%	55,50%	56,41%	62%	62,33%	66,2%	101,85
		% Usaha Kecil thd Usaha Mikro & Kecil	9,23%	8,21%	8,41%	9,61%	8,94%	9,18%	9,23%	100,00
4	Meningkatnya realisasi investasi	% peningkatan realisasi investasi	20%	41,56%	8%	12%	16%	40,14%	42%	250,00
5	Meningkatnya kunjungan wisatawan	% peningkatan kunjungan wisata	0,21%	0,12%	0,08%	0,13%	0,17%	-56,47%	-33,60	-14,51

Sasaran 1, Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani, dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan serta Dinas Perikanan, dengan 2 (dua) indikator.

BAB II



Terhadap capaian 2 (dua) indikator Sasaran 1 tersebut diatas, pada tahun 2021 Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 106,81 melampaui target yang ditetapkan sebesar 104,00 atau mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2020 sebesar 104,84. Hal ini disebabkan harga yang diterima oleh petani lebih besar dibanding harga yang dibayarkan

Pada indikator Prosentase PDRB lapangan usaha pertanian tahun 2021 akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2022. Sedangkan pada tahun 2020 indikator Prosentase PDRB lapangan usaha pertanian mengalami kontraksi sebesar -0,58. Hal ini disebabkan sektor perkebunan mengalami penurunan produktivitas (seperti tembakau, tebu), demikian juga sektor kehutanan. Selain itu beberapa produk hortikultura mengalami penurunan harga karena permintaan pasar yang menurun sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19.

**Sasaran 2**, Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan, dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Terhadap capaian 2 (dua) indikator Sasaran 2 tersebut diatas, pada indikator Prosentase PDRB lapangan usaha industri pengolahan tahun 2021 akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2022. Demikian juga indikator Prosentase PDRB lapangan usaha perdagangan tahun 2021 akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2022. Untuk kedua indikator tersebut di tahun 2021 diprediksi mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, dikarenakan sektor industri dan perdagangan mulai bergerak positif meskipun masih terjadi Pandemi Covid-19. Hal ini didukung beberapa kegiatan yang positif yaitu Peningkatan Realisasi Investasi, Gerakan #Ayo Beli Produk Lamongan, #Ayo Ditumbasi, #Ayo Dolen Nang Lamongan, Fasilitasi Marketplace “Pasar Online Lamongan” dan Taman-taman tematik.

**Sasaran 3**, Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro, dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dari 2 (dua) indikator Sasaran 3 tersebut diatas, pada tahun 2019 realisasinya melampaui target dan mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Hal ini didukung adanya program pembinaan dan pengawasan Koperasi serta pembinaan, pelatihan dan kemudahan legalitas bagi UMKM.

**Sasaran 4**, Meningkatnya realisasi investasi, dilaksanakan Dinas

## BAB II



N	SASARAN	INDIKATO	TARGE T	REALISASI						CAPAI - AN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indeks infrastruktur jalan	85,06	-	80,90	82,11	84,67	84,56	87,10	107,66

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari 1 (satu) indikator Sasaran tersebut diatas, pada tahun 2021 realisasinya melampaui target dan mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, hal ini didukung adanya program dan kegiatan gencarnya promosi potensi-potensi daerah, kemudahan pelayanan perijinan investasi dan kemudahan legalitas usaha bagi para investor serta didukung kondisi daerah yang kondusif.

**Sasaran 5**, Meningkatnya kunjungan wisatawan, dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Tahun 2021 indikator % Peningkatan kunjungan wisatawan terkontraksi sebesar -33,60% atau lebih baik dibanding capaian tahun 2020 sebesar -56,47%. Hal ini sebagai akibat masih adanya Pandemi Covid-19 dengan pembatasan-pembatasan kegiatan sosial (PPKM) yang lebih ketat, termasuk penutupan obyek-obyek wisata untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19, sehingga sangat berdampak pada lesunya perekonomian baik lokal (Daerah), regional (Provinsi), nasional dan Global.

III. **Misi III**, Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

**Tujuan** Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pada **Misi III**, terdapat 2 (dua) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

BAB II



1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	Indeks infrastruktur jembatan	83,97	-	80,75	82,33	83,00	83,30	85,18	101,44
		Indeks irigasi	77,18	-	74,84	75,32	75,80	76,43	77,24	100,10
		Indeks layanan lalu lintas	65,15	-	62,56	65,31	65,39	67,19	65,30	100,23
		Indeks infrastruktur permukiman	74,74	-	72,06	72,88	73,50	79,30	80,66	107,12
2	Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan serta pengendalian bencana alam	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,10	-	63,33	65,29	66,67	68,18	59,52	118,80
		Indeks Kualitas Udara (IPU)	80,58	-	77,07	79,97	82,86	84,27	84,04	107,73
		Indeks Tutupan lahan	45,72	-	-	56,60	57,67	58,91	38,84	84,95
		% Desa tangguh bencana	91,55	-	23,94%	40,85	60,56	74,64	97,44	100,00

Sasaran 1, dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air dan Dinas Perhubungan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Secara umum 5 (lima) indikator Sasaran 1 Misi III pada tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari tahun 2020. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Indeks infrastruktur jalan, realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 87,10 melampaui target yang ditetapkan sebesar 85,06 dan tahun 2020 terealisasi sebesar 84,56. Adapun Indeks infrastruktur jembatan, realisasi tahun 2021 sebesar 85,18 melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 83,97 dan tahun 2020 terealisasi sebesar 83,30. Hal ini didukung oleh adanya kegiatan prioritas Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (JAMULA) dan penanganan pengaduan masyarakat kerusakan jalan dan jembatan secara cepat yaitu Sistem Informasi Respon Keluhan Jalan (SIRKEL).
- 2) Indeks irigasi, realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 77,24 melampaui target yang ditetapkan sebesar 77,18 dan meningkat jika dibanding tahun 2020 yang terealisasi sebesar 76,43. Hal ini didukung adanya kegiatan Normalisasi waduk dan sungai serta penambahan alat pompa air untuk mengatasi genangan banjir.
- 3) Indeks layanan lalu-lintas dan angkutan jalan, realisasi kinerja tahun

BAB II



2021 sebesar 80,66 melampaui target yang ditetapkan sebesar 74,74 dan tahun 2020 terealisasi sebesar 67,19. Hal ini didukung adanya Ratio kinerja jaringan jalan terealisasi sebesar 0,41 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,43 dan Accident rate terealisasi sebesar 6,89 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 9,00 sehingga hal tersebut mengisyaratkan bahwa layanan lalu lintas dan angkutan jalan serta kondisi lalu-lintas semakin baik.

**Sasaran 2,** Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan serta pengendalian bencana alam yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan dengan indikator Indeks Pencemaran Air (IPA), realisasi tahun 2021 sebesar 59,52 melampaui target yang ditetapkan sebesar 50,10. Untuk Indeks Pencemaran Udara, realisasi tahun 2021 sebesar 84,04 melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,58.

**IV. Misi IV :** Memantapkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

**Tujuan :** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

Pada **Misi IV**, terdapat 5 (lima) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

N	SASARAN	INDIKATO	TARGET 2021	REALISASI						CAPA L
				201	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	A	B	BB	A	A	A	A	100,00%
		Nilai LPPD	ST	-	ST	ST	ST	ST	ST	100,00%
		% Kemampuan fiskal	100%	-	101,83%	101,54%	100%	102,07%	106%	106,00%
		Derajat desentralisasi	17,00%	-	15,79	15,54	16,94	16,97	21,40	102,85%
		Opini pemeriksaan eksternal	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%
		% Perangkat Daerah yang tidak terdapat temuan material dan keuangan	95%	-	83,94%	96,90%	93,85%	94,70%	96,05%	100,64%

BAB II





2	Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah penelitian & kajian yg dipublikasikan di Jurnal Nasional	1	-	1	>1	>1	1	1	100,00%
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks profesionalitas ASN	84	-	87,29	87,35	87,76	86,51	87,73	104,23%
4	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	81,76	-	79,76	80,26	80,79	81,78	82,62	100,64%
5	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik Governance (e-Gov)	Pemerintahan e-Government Indonesia	Peringkat 3	-	Peringkat 4	Peringkat 4	Peringkat 3	Penilaian dihentikan	Peringkat 2	105,73%

**Sasaran 1,** Meningkatnya perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah dengan 6 (enam) indikator kinerja, dilaksanakan oleh BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

- Secara umum target-target indikator Sasaran 1 dapat tercapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya dapat kami berikan penjelasan terhadap setiap indikator Sasaran sebagai berikut :
- a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lamongan memiliki trend positif mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berpredikat A dengan nilai relatif mengalami kenaikan, yakni tahun 2018 skor nilai 80,04, tahun 2019 skor nilai 80,12 dan tahun tahun 2020 skor nilai 81,30 sedangkan untuk predikat SAKIP tahun 2021 akan dirilis pada bulan Maret tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB RI.
  - b. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Lamongan berkategori Sangat Tinggi (ST). Secara Nasional skor LPPD Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yakni 3,2631 tahun 2018, 3,4684 pada tahun 2019 dan tahun 2020 skor LPPD sebesar 3,4199. Sedangkan untuk tahun 2021 Nilai LPPD masih belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
  - c. Indikator % Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 106% atau memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Hal ini didukung adanya perencanaan yang tepat *money follow program* dan *money follow function*.
  - d. Indikator % Derajat desentralisasi Kabupaten Lamongan tahun 2021

BAB II



teralisasi 21,40% atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 17,00%. Hal ini disebabkan adanya dukungan penerapan strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan-penerimaan dari potensi pajak yang sebelumnya telah ada namun belum optimal, khususnya pajak restoran. Sedangkan Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali potensi penerimaan pajak yang baru.

- e. Indikator Opini Pemeriksa eksternal di Kabupaten Lamongan mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 tercapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dapat terealisasi karena didukung oleh tersajinya Laporan Keuangan Daerah yang lengkap dan data yang akurat, sesuai prinsip akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsisten serta didukung bukti-bukti audit yang lengkap.
- f. Indikator % Perangkat Daerah yang tidak terdapat temuan material dan keuangan, tahun 2021 terealisasi sebesar 96,05% atau melampaui target yang ditetapkan dan tahun 2020 terealisasi sebesar 94,70 %. Hal ini didukung oleh peran serta obyek pemeriksaan atau Perangkat Daerah yang telah mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Daerah.

**Sasaran 2,** Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah, dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indikator Jumlah penelitian dan kajian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional tahun 2021 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yakni 1 (satu) penelitian yang berjudul “Dampak Beralihnya Sebagian Fungsi Jalan Protokol Menjadi Lahan Parkir”.

**Sasaran 3,** Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah.

Indikator Indeks profesionalitas ASN mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus meningkat. Indeks profesionalitas ASN tahun 2021 terealisasi sebesar 87,73 atau dan tahun 2020 terealisasi sebesar 86,51. Hal ini didukung program Peningkatan kualitas penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penerapan Sistem

## BAB II



Informasi Manajemen Kepegawaian, program Penataan Jabatan dan Peningkatan Mutu Informasi Kepegawaian dengan kegiatan Penempatan ASN, Proses seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sistem aplikasi dan peremajaan data kepegawaian secara berkala.

**Sasaran 4**, Meningkatnya kinerja pelayanan publik, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), tahun 2021 terealisasi sebesar 82,62 dan tahun 2020 sebesar 81,78. Hal ini didukung adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk senantiasa terus-menerus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui :

- 1) Pendampingan pada Unit Pelayanan Publik terhadap Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- 2) Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan membangun aplikasi pengaduan lokal (**Lapor Pak YES**) yang terintegrasi dengan SP4N Lapor;
- 3) Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP);
- 4) Menyatukan semua unsur pelayanan dalam Mall Pelayanan Publik;
- 5) Melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOLLA), untuk peningkatan kualitas pelayanan.

**Sasaran 5**, Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik e-Governance, dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Indikator Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI), tahun 2018 terealisasi Peringkat 4, sedangkan pada tahun 2019 indikator PeGI diganti indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2019 Indeks SPBE Tingkat Nasional menduduki Peringkat 12, dengan skor 3,40. Tahun 2020 penilaian Indeks SPBE dihentikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan tahun 2021 Indeks SPBE Kabupaten Lamongan sebesar 3,32 atau menurun jika dibanding capaian tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan jumlah indikator yang dievaluasi, semula 35 (tiga puluh lima) menjadi 47 (empat puluh tujuh) sesuai Keputusan MENPAN RB No. 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dalam Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

## BAB II



V. *Misi V*, Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

*Tujuan* Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Pada *Misi V*, terdapat 9 (sembilan) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI						CAPAI-AN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS	Prosentase penurunan PMKS	3,15 %	-	2,52 %	2,60 %	3,24 %	3,63 %	3,58%	113,65%
2	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	0,19	-	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	118,75%
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Indeks Pembangunan Gender	90,71	-	87,98	87,11	88,40	90,71	Belum dirilis BPS	-
		% Laju pertumbuhan penduduk	0,66%	-	0,50%	0,02%	0,88%	0,27%	0,007%	59,10
4	Terwujudnya Desa mandiri	Jumlah Desa mandiri	8	-	4	5	11	16	34	425%
5	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	% Peningkatan prestasi pemuda dan atlet	30%	-	12 %	20 %	110 %	12 %	41%	136,67%
6	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah	Jumlah seni budaya lokal & benda/situs cagar yang dilestarikan	119	-	95	102	106	111	119	100%
7	Meningkatnya penduduk yang bekerja	% Penduduk yang bekerja	96,55 - 97,00	-	95,88	96,83	95,99	94,87	95,10	98,50%
8	Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan	% Konflik sosial yang ditangani	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum	% Penegakan pelanggaran Perda & gangguan trantibum yg diselesaikan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

**Sasaran 1**, Meningkatkan pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS, dilaksanakan Dinas Sosial

Realisasi Prosentase penurunan PMKS tahun 2021 terealisasi sebesar 3,94% atau melampaui target yang ditetapkan 3,61% dan meningkat dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 3,63%. Artinya semakin tinggi realisanya berarti proses penurunan PMKS semakin cepat. Hal ini terbukti jumlah PMKS yang semakin menurun jumlahnya, tahun 2020 sebanyak 129.419 dan tahun 2021 menjadi 124.519 (berkurang 4.900).

BAB II



**Sasaran 2,** Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan

Indikator Indeks Ketahanan Pangan, tahun 2021 terealisasi sebesar 0,16 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,19. Hal ini berarti skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan tetap terjaga dan aman.

Ketiga aspek indikator Indeks Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. **Sangat Tahan Pangan**, untuk aspek ketersediaan pangan (sama dengan tahun 2020);
2. **Tahan Pangan**, untuk aspek akses pangan dan mata pencaharian (sama dengan tahun 2020);
3. **Sangat Tahan Pangan**, untuk aspek gizi dan kesehatan pangan, naik dibanding tahun 2020.

**Sasaran 3,** Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana, dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan baru akan dirilis sekitar bulan Agustus 2022. Untuk tahun 2020 IPG terealisasi sebesar 88,59 atau melampaui target sebesar 87,40 dan mengalami kenaikan dibandingkan IPG tahun 2019 yakni sebesar 88,40.

**Sasaran 4,** Terwujudnya Desa Mandiri, dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Indikator % Desa Mandiri tahun 2021 terealisasi sebanyak 34 Desa atau melampaui target yang ditetapkan sebanyak 8 Desa. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendampingan pada Desa oleh Pendamping Desa dan Pemerintah sehingga dapat memenuhi unsur-unsur penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), yakni Indeks Ekonomi, Indeks Infrastruktur dan Indeks Sosial.

**Sasaran 5,** Meningkatnya dilaksanakan Prestasi Pemuda dan Atlet, dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Indikator Prosentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, tahun 2021 terealisasi sebesar 41% melampaui target yang ditetapkan sebesar 30% karena didukung

## BAB II



dilaksanakannya Kejurkab Lamongan, menambah sarana prasarana cabang olahraga, pelatihan secara rutin terhadap atlet-atlet binaan.

**Sasaran 6,** Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Daerah, dilaksanakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

Indikator Jumlah seni budaya lokal dan situs cagar budaya yang dilestarikan, tahun 2021 terealisasi sebanyak 119 sesuai target yang ditetapkan sebesar 119. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan Dewan Kesenian Lamongan senantiasa memfasilitasi seni budaya lokal yang ada di Desa-desa untuk ditampilkan pada even-even tertentu. Sedangkan untuk mengeksploitasi situs cagar budaya Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur. Adapun situs cagar budaya yang telah dilestarikan diantaranya situs Candi Pataan, Candi Bowo, Rehab Makam Joko Tingkir dan Makam Mbah Gholijah. Sampai tahun 2021 terdapat 95 situs cagar budaya yang telah dilestarikan dan beberapa situs cagar budaya Kabupaten Lamongan telah tersimpan di Museum Nasional Jakarta.

**Sasaran 7,** Meningkatnya Penduduk yang bekerja, dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja.

Indikator Prosentase penduduk yang berkerja, tahun 2021 terealisasi sebesar 95,10% tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 96,55 – 97,00%. Hal ini disebabkan dampak terjadinya Pandemi Covid-19, salah satunya pada usaha informal selama adanya Pandemi Covid-19 tidak maksimal untuk berusaha dikarenakan adanya penerapan PPKM dan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagai informasi, jumlah penduduk usia kerja yang bekerja di tahun 2020 sebesar 646.425 dan tahun 2021 sebesar 649.929 atau mengalami kenaikan sebesar 3.504. Jumlah angkatan kerja tahun 2021 sebesar 681.409 dan tahun 2020 sebesar 681.409 dan tahun 2020 sebesar 683.405 atau mengalami kenaikan sebesar 1.996.

**Sasaran 8,** Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan, dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Indikator Prosentase konflik sosial yang diselesaikan, tahun 2021 terealisasi sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan setiap kali terjadi konflik sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama FORKOPIMDA dan masyarakat duduk bersama dalam penyelesaian konflik tersebut, adanya Sosialisasi

## BAB II



Wawasan Kebangsaan kepada Lembaga sekolah dan kelompok-kelompok masyarakat, Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan Fasilitasi Forum Komunikasi Deteksi Dini pada Masyarakat, Fasilitasi Kerjasama Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Pembinaan dan Pengamanan Wilayah dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

**Sasaran 9**, Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum, dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator Prosentase penegakan pelanggaran PERDA dan gangguan kamtibmas yang diselesaikan, tahun 2021 terealisasi sebesar 100% atau sudah sesuai target yang ditetapkan.

#### e. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Analisa Capaian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja. Analisa dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran dan indikator sasaran yang melampaui target dan terhadap pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mengacu hasil pengukuran kinerja yang dikelompokkan dalam setiap Misi, Tujuan dan Sasaran, dapat dijelaskan bahwa secara umum pencapaian setiap indikator kinerja Sasaran dapat dikatakan **Berhasil** bahkan **Sangat Berhasil**. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target. Adapun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Misi I**, dengan 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja. Apabila dirata-rata capaian 2 (dua) Sasaran tersebut sebesar **103,20% (Sangat Berhasil)**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 2** “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan”, sebesar **100,87%**, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, sebagaimana tabel berikut :

## BAB II





MISI I	TUJUAN	2 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan sumber-daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan & kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan 2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TH. 2021	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pendidikan yang ber-kualitas untuk semua	Indeks Pendidikan	99,54	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	100,87	Dinas Kesehatan
Total jumlah indikator		2	200,41	
Rata-rata capaian kinerja 2 Sasaran			103,20 ( Sangat	

2. Misi II, dengan 5 (lima) Sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **100,82%** (Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 4**, “Meningkatnya realisasi investasi” sebesar **210,00%** yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, diikuti Sasaran 1 sebesar 106,81% dan Sasaran 3 sebesar 101,80%. Beberapa Sasaran lainnya memiliki capaian kinerja yang kurang bagus (menurun) dikarenakan terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19, sebagaimana tabel berikut :

MISI II	TUJUAN	5 SASARAN STRATEGIS
Mempacu ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan sumber daya alam.	Meningkatnya kemampuan ekonomi produktivitas daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha kesejahteraan petani 2. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan 3. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro 4. 5. Meningkatnya kunjungan wisatawan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TH. 2021 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani %Pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian	106,81 Belum dirilis BPS	Dinas TPHP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan

BAB II





2.	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan	%Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	7,20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		%Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan	7,03	
3.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	%Koperasi berkualitas	101,80	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
		%Usaha Kecil thd Usaha Mikro Kecil	100,00	
4.	Meningkatnya realisasi	%Peningkatan realisasi investasi	210,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5.	Meningkatnya kunjungan	%Peningkatan kunjungan wisatawan	-14,51	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Total jumlah indikator		8	504,10%	
Rata-rata capaian kinerja 5 Sasaran			100,82% ( Sangat Berhasil )	

3. *Misi III*, dengan 2 (dua) Sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **103,91% (Sangat Berhasil)**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 2**, “Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan serta pengendalian bencana alam” sebesar **113,88%** yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD, diikuti Sasaran 1 sebesar 107,12%. Kedua sasaran tersebut memiliki capaian kinerja cukup tinggi dengan kategori Sangat baik, sebagaimana tabel berikut:

MISI III	TUJUAN	2 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ), Menuju Pemerintahan Yang Bersih ( <i>Clean Government</i> ).	Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kab. Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta  2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan serta pengendalian bencana alam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TH. 2021	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	Indeks infrastruktur jalan	100,43	Dinas PU Bina Marga, DPU SDA Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Indeks Infrastruktur jembatan	100,10	
		Indeks irigasi	100,38	
		Indeks layanan lalu-lintas dan angkutan jalan	105,38	
		Indeks infrastruktur permukiman	107,12	
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan serta	Indeks Pencemaran Air	100,23	Dinas Lingkungan Hidup B P B D
		Indeks Pencemaran Udara	107,73	
		Indeks Tutupan Lahan	113,88	

BAB II



pengendalian bencana	%Desa Tangguh Bencana	100,00
Total jumlah indikator	9	935,25%

4. **Misi IV**, dengan 5 (lima) Sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **101,64%** (**Sangat Berhasil**). Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 1**, “Meningkatnya perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah” sebesar **101,69%** yang dilaksanakan oleh Bappeda, BPKAD, Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Bapenda, diikuti Sasaran 4 sebesar 100,64% dan Sasaran 2 sebesar 100,00%, sebagaimana tabel berikut:

MISI IV	TUJUAN	5 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	1. Meningkatkan perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah 2. Meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara(ASN) Pemerintahan Daerah 4. Meningkatkan kinerja pelayanan public 5. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik Governance

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TH. 2021 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah	Nilai SAKIP Pemda	100,00	BAPPEDA, BPKAD, Setda Inspektorat, Bapenda
		Nilai LPPD	100,00	
		%Kemampuan Fiskal	106,00	
		Derajat desentralisasi	102,85	
		Opini pemeriksaan eksternal	100,00	
		%Perangkat Daerah yang tidak terdapat temuan material dan keuangan	100,64	
2.	Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah penelitian & kajian yang diublikasikan di Jurnal Nasional	100,00	Badan LITBANGDA
3.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil	Indeks Profesionalitas ASN	104,23	Badan Kepegawaian
4.	Meningkatnya kinerja pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,64	Setda, Kecamatan,

BAB II



5.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik Governance (e-Gov)	Pemeringkatan e-Government Indonesia	105,73	Dinas KOMINFO
Total jumlah indikator		10	1.020,09	
Rata-rata capaian kinerja 5 Sasaran			102,00	(Sangat Berhasil)

5. Misi V, dengan 9 (sembilan) Sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja.

Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **368,69%**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Meningkatnya Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta Keluarga Berencana (KB)” sebesar **1.757%** yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, diikuti Sasaran 4 sebesar 425,00% dan Sasaran 5 sebesar 136,67%. Keenam Sasaran lainnya juga memiliki capaian kinerja cukup tinggi dengan kategori Sangat Berhasil dan Berhasil meskipun juga terdampak adanya Pandemi Covid-19, sebagaimana tabel berikut :

MISI V	TUJUAN	9 SASARAN STRATEGIS
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS
		2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat
		3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana
		4. Terwujudnya desa yang mandiri
		5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
		6. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah
		7. Meningkatnya penduduk yang bekerja
		8. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan
		9. Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TH. 2021 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS	%Penurunan PMKS	113,65	Dinas Sosial
2.	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan	Indeks Ketahanan Pangan	118,75	Dinas Ketahanan
3.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	Indeks Pembangunan Gender	Belum dirilis BPS	Dinas PP dan KB, Dinas PP dan PA
		%Laju pertumbuhan penduduk	1.757,00	
4.	Terwujudnya desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri	425,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB II



5.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	%Peningkatan prestasi pemuda dan atlit	136,67	Dinas Pemuda dan Olahraga
6.	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah	Jumlah seni budaya lokal & benda/situs cagar budaya yang dilestarikan	100,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7.	Meningkatnya penduduk yang bekerja	%Penduduk yang bekerja	98,50	Dinas Tenaga Kerja
8.	Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan	%Konflik sosial yang ditangani	100,00	Bakesbang dan Politik
9.	Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum	%Penegakan pelanggaran PERDA & gangguan trantibum yang diselesaikan	100,00	Satpol PP
Total jumlah indikator		10	2.949,57	
Rata-rata capaian kinerja 9 Sasaran			368,69% ( Sangat Berhasil )	

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada setiap Misi, Tujuan dan Sasaran tidak terlepas dari dukungan seluruh potensi sumber daya, sarana dan prasarana serta sumber dana APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lain seperti DAU, DAK dan lainnya yang diselaraskan dengan pencapaian target pada masing-masing OPD, meskipun terjadi proses Refocusing Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Seluruh potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal guna mencapai keberhasilan pencapaian setiap target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Adapun program dan kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang baik dengan menampung aspirasi seluruh masyarakat melalui kegiatan MUSRENBANG secara berjenjang dari bawah yang selanjutnya dirumuskan menjadi target kinerja setiap Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan / bidang dan tugas pokok fungsi yang menjadi kewenangannya, sehingga diharapkan dapat tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang optimal.

f. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Adapun komponen-komponen yang mendukung tingginya capaian nilai IPM antara lain :

- a. Indeks Pendidikan, terdiri dari :  
Harapan Lama Sekolah (EYS) Kab. Lamongan tahun 2021 sebesar 13,77.

Harapan Lama Sekolah (EYS) Jawa Timur tahun 2021 sebesar 13,36.

Harapan Lama Sekolah (EYS) Nasional tahun 2021 sebesar 13,08.

Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Kab. Lamongan tahun 2021 sebesar 8,04.

Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Jawa Timur tahun 2021 sebesar 7,88.

Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Nasional tahun 2021 sebesar 8,54.

**b. Indeks Kesehatan,** terdiri dari :

Usia Harapan Hidup (UHH) Kab. Lamongan, tahun 2021 sebesar 72,49.

Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sebesar 71,38. Usia Harapan Hidup (UHH) Nasional tahun 2021 sebesar 71,47.

**c. Indeks Daya Beli**

Indeks Daya beli Kab. Lamongan tahun 2021 sebesar 0,744 dan masyarakat Lamongan memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) sebesar Rp. 11.510.000,-/kapita/tahun.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerapkan strategi dan arah kebijakan yang tepat dalam upaya mewujudkan peningkatan capaian trend positif IPM yang mencakup Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli melalui program dan kegiatan berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan Pendidikan dan kesehatan,
2. Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan klasifikasi, pengembangan profesi dan kompetensi;
3. Pembangunan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang memadai melalui pembangunan dan atau rehab ruang kelas;
4. Pemeliharaan gedung, ruang penunjang pendidikan dan peralatan pendidikan, dimulai sejak tahun 2016;
5. Pemberian stimulan bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu, Pemberian stimulan mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta pemberian beasiswa bagi siswa yang hafal Al-Qur'an;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Kelompok Belajar Masyarakat

## BAB II



(KBM) atau Keaksaraan Fungsional;

7. Mendorong gerakan budaya membaca / literasi masyarakat serta menyediakan perpustakaan mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan lembaga Sekolah serta tempat pelayanan publik yang dimulai sejak tahun 2019;
8. Mendorong seluruh sekolah untuk bekerjasama dengan pihak swasta/ perusahaan sebagai tempat magang siswa;
9. Memperluas Sekolah Inklusi, baik SD maupun SMP.

Pencapaian kinerja Indeks Kesehatan, didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Mobil Sehat, yang direncanakan diberikan untuk seluruh Desa se Kabupaen Lamongan sejumlah 462 unit. Sampai dengan akhir tahun 2020 sudah terealisasi sebanyak 462 Desa;
2. Pengadaan alat-alat kesehatan yang cukup dan memadai;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi;
5. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai melalui pembangunan Puskesmas, Ponkesdes, Polindes dan Pustu;
6. Upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan menggalakkan vaksinasi bagi masyarakat sampai ke pelosok-pelosok desa;
7. Penanganan pasien-pasien penderita Covid-19 secara optimal.

Dalam hal pencapaian **Indikator Kinerja Tujuan** yaitu IPM, outcome dan output hasil intervensi berbagai program dan kegiatan pada Perangkat Daerah saling mendukung dan sinergi serta dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sehingga dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan capaian IPM Kabupaten Lamongan.

Pada peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan dengan indikator Indeks Pencemaran Air (IPA), realisasi tahun 2021 sebesar 59,52 melampaui target yang ditetapkan sebesar 50,10. Untuk Indeks Pencemaran Udara, realisasi tahun 2021 sebesar 84,04 melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,58.

## BAB II



Hal ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengujian kadar polusi limbah padat/cair, Pembinaan Adiwiyata, Peningkatan edukasi dan komunikasi dibidang lingkungan;
- 2) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper); Pengawasan pengelolaan lingkungan industri, Pengawasan pengelolaan lingkungan kegiatan layanan jasa dan lainnya serta Fasilitasi penanganan pengaduan dan pelanggaran lingkungan;
- 3) Koordinasi pembinaan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL), Penyusunan kebijakan bidang penataan lingkungan, Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Peningkatan penataan dan pengelolaan lingkungan permukiman serta Pengelolaan keanekaragaman hayati;
- 4) Pembinaan pengelolaan limbah B3 melalui SAMTAKU (Sampah Tanggung Jawabku);
- 5) Pemantauan kualitas udara secara berkala;
- 6) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang bekerjasama dengan PERHUTANI melalui PHBM (Pemberdayaan Hutan Bersama Masyarakat), Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air melalui penanaman pohon-pohon penghijauan, Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air melalui pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air bawah tanah, Pengembangan dan pengelolaan konservasi pesisir laut dan Pengelolaan taman pendidikan lingkungan melalui penanaman mangrove;
- 7) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Monitoring dan evaluasi persampahan, Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Penyediaan pengelolaan sampah, dan Penyediaan alat pengumpul dan pengangkut sampah.

Sedangkan untuk Indeks Tutupan lahan, realisasi tahun 2021 sebesar 38,84 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 45,72. Hal ini disebabkan adanya perubahan pedoman penghitungan sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.

## BAB II





SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/ 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya untuk Sasaran Pengendalian Bencana dengan indikator Prosentase Desa Tangguh Bencana, realisasi tahun 2021 sebesar 107,00% melampaui target yang ditetapkan sebesar 91,55%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana, program Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Realisasi Prosentase penurunan PMKS tahun 2021 terealisasi sebesar 3,94% atau melampaui target yang ditetapkan 3,61% dan meningkat dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 3,63%. Artinya semakin tinggi realisanya berarti proses penurunan PMKS semakin cepat. Hal ini terbukti jumlah PMKS yang semakin menurun jumlahnya, tahun 2020 sebanyak 129.419 dan tahun 2021 menjadi 124.519 (berkurang 4.900). Kondisi tersebut dikarenakan adanya beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bantuan usaha kesejahteraan bagi masyarakat miskin.
- 2) Bantuan stimulan dan sarana penataan lingkungan sosial.
- 3) Pemulangan dan pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Psikotik yang terjaring razia.
- 4) Memberikan kesempatan untuk menjadi anak asuh dari keluarga kurang sejahtera.
- 5) Bimbingan dan pelatihan sosial bagi anak bermasalah.
- 6) Pengembangan KUBE penderita cacat (KUBE PACA).
- 7) Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan tuna rungu.
- 8) Mendampingi dan memfasilitasi kegiatan komunitas Disabilitas
- 9) Fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- 10) Pembinaan dan revitalisasi Karang Taruna.

Indikator Indeks Ketahanan Pangan, tahun 2021 terealisasi sebesar 0,16 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,19. Hal ini berarti skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan tetap terjaga dan aman.

Ketiga aspek indikator Indeks Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. **Sangat Tahan Pangan**, untuk aspek ketersediaan pangan (sama dengan tahun 2020);
2. **Tahan Pangan**, untuk aspek akses pangan dan mata pencaharian (sama

## BAB II





dengan tahun 2020);

3. **Sangat Tahan Pangan**, untuk aspek gizi dan kesehatan pangan, naik dibanding tahun 2020.

Hal ini didukung oleh pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Desa, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lumbung Pangan Desa dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Sedangkan Indikator Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2021 terealisasi sebesar 0,037 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,65. Hal ini didukung adanya kegiatan layanan jemput bola terkait pelayanan KB yang dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan dan pada saat adanya event-event tertentu.

Indikator % Desa Mandiri tahun 2021 terealisasi sebanyak 34 Desa atau melampaui target yang ditetapkan sebanyak 8 Desa. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendampingan pada Desa oleh Pendamping Desa dan Pemerintah sehingga dapat memenuhi unsur-unsur penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), yakni Indeks Ekonomi, Indeks Infrastruktur dan Indeks Sosial

Indikator Prosentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, tahun 2021 terealisasi sebesar 41% melampaui target yang ditetapkan sebesar 30% karena didukung dilaksanakannya Kejurkab Lamongan, menambah sarana prasarana cabang olahraga, pelatihan secara rutin terhadap atlet-atlet binaan.

Indikator Prosentase penegakan pelanggaran PERDA dan gangguan trantibum yang diselesaikan, tahun 2021 terealisasi sebesar 100% atau sudah sesuai target yang ditetapkan. Hal ini didukung adanya koordinasi, konsolidasi intensif dan kolaborasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama antara lain :

- a. Penegakan PERDA, Proses penyidikan dan penindakan pelanggaran PERDA/Tipiring dan Pembinaan pelanggaran PERDA.
- b. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat, Operasi Yustisi dan Operasi ketenteraman dan ketertiban umum khususnya dalam rangka antisipasi kegiatan-kegiatan sosial yang disinyalir dapat menimbulkan kerawanan penyebaran/penularan virus Covid-19.

## BAB II



### BAB III

## CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

### 1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- 7) Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0442/M.PPN/11/2010, Nomor : SE-696/MK/2010 dan Nomor : 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat.

### 2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah dapat di biayai melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan

### BAB III



bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dana tugas pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan sedangkan pendanaan dekon dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di daerah.

Adapun tujuan diberikannya tugas pembantuan dan dekonsentrasi yaitu untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, tugas pembantuan dan dekonsentrasi juga untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah dan desa tersebut.

Kegiatan-kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Pemerintah Pusat kepada beberapa kementerian/lembaga terdiri dari:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Sekolah Menengah)
- b. DITJEN LINJAMSOS RI. Program PKH, PBI-N (Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), KSM)
- c. Ditjen Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Sosial Republik Indonesia (Program Pemberdayaan Sosial dan Kemiskinan)
- d. DITJEN Penanganan Fakmis Kementrian Sosial RI (Program Pengentasan Kemiskinan Pedesaan dan Program Sembako)
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi
- g. Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
- h. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- i. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
- j. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI
- k. Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

### BAB III



Kabupaten Lamongan Nomor : PHD-058/IPDMIP/PK/2018 untuk *Intregrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program*- IPDMIP (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Parsipatif Terpadu)

- l. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- m. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Penjabaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/lembaga kepada Kabupaten Lamongan diimplementasikan pada 11 (sebelas) Perangkat Daerah menurut kesesuaian tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu meliputi:

**1) Dinas Pedidikan Kabupaten Lamongan**  
**(Tugas pembantuan Pusat)**

**Dasar pelaksanaannya :**

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan antara lain Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah No: 1955/C4/DM.01.02/2021, Tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Sekolah Menengah Penerima Program Bantuan Pemerintah Untuk Peralatan TIK SMP Tahun 2021. Dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

**Program :**

1. Program Bantuan Pemerintah Sekolah Penerima Peralatan TIK SMP Tahun 2021  
 Program Bantuan Pemerintah Sekolah Penerima Peralatan TIK SMP Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 26 lembaga SMP dengan anggaran Rp 2,297,125,000,-
2. Program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar  
 Program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar ditargetkan sebanyak 26 SD dengan anggaran 2,420,548,000,-.

**BAB III**



## 2) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

### (Tugas pembantuan Pusat)

#### Dasar pelaksanaanya :

1. DITJEN LINJAMSOS RI. Program PKH, PBI-N (Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), KSM)
2. Ditjen Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Program Pemberdayaan Sosial dan Kemiskinan)
3. DITJEN Penanganan Fakmis Kementerian Sosial RI (Program Pengentasan Kemiskinan Pedesaan dan Program Sembako)

#### Program dan Kegiatan :

- 1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - Kegiatan Keluarga Harapan (PKH);
  - Kegiatan PBI JKN;
  - Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah.
- 2) Bidang Penanganan Fakmis  
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
  - Kegiatan Bantuan Sembako;
- 3) Bidang Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial
  - Kegiatan Penyandang Disabilitas yaitu : ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan.
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial  
Program Pemberdayaan Sosial (LKS)
  - TKSK

## 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

### (Tugas pembantuan Pusat)

#### Dasar Pelaksanaannya :

- a. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

## BAB III



- c. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021

**Program :**

Program Dana Desa, dengan kegiatan :

Bantuan Keuangan Dana Desa dengan sasaran 27 Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 367.859.016.000,-

**(Tugas pembantuan Provinsi)**

**Dasar pelaksanaannya:**

- a. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 412.2/277/112.3/2021 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
- b. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/7409/112/2/2021 Tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (BK-Desa) Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021

**Program :**

1. Program BUMDesa  
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dengan anggaran Rp. 450.000.000,00
2. Program Desa Berdaya  
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,00
3. Program Jatim PUSPA  
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Rp. 390.250.000,00  
Program Bantuan Keuangan Desa (BK-Desa) Rp. 200.000.000,00
  - Berdasarkan Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.
  - Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 412.2/277/112.3/2021 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

**BAB III**



#### 4) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

##### (Tugas pembantuan Pusat)

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebuna kabupaten Lamongan di antaranya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan, dan Pembangunan Embung Pertanian, Kebun Bibit Datar, Rawat Ratoon, Bongkar Ratoon, Optimalisasi Indeks Pertanaman, Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi.

Tugas pembantuan pusat yang didapat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah

- a. Kebun Bibit Datar, terdiri dari:
  - 1) Upah penyiapan lahan 50 HOK/ ha
  - 2) 60.000 benih tebu/ ha
  - 3) Upah penanaman 25 HOK/ ha
  - 4) Insentif penggunaan lahan Rp 5.000.000/ ha
  - 5) Pupuk majemuk 400 kag/ha
  - 6) POC 15 liter/ha
  - 7) Pestisida 4 liter/ha
  - 8) Pemupukan 30 HOK/ha
  - 9) Penyiangan 20 HOK/ha
  - 10) Pengendalian hama penyakit 10 HOK/ha
  - 11) Penyiraman 20 HOK/ha
  - 12) Penyulaman 20 HOK/ha
  - 13) Tebang 57 HOK/ha
  - 14) Ikat dan pasang lebel 15 HOK/ha
  - 15) Muat benih 25 HOK/ ha
  - 16) Bongkar benih 15 HOK/ha
- b. Rawat Ratoon, terdiri dari:
  - 1) Pupuk NPK non subsidi 500kg/ha,
  - 2) POC 15 liter/ha,
  - 3) Herbisida 5 liter/ha, dan
  - 4) Upah HOK 22 HOK/ha (Rp65.000 x 22 orang = Rp1.430.000)
- c. Bongkar Ratoon, terdiri dari:
  - 1) Pupuk NPK non subsidi 500kg/ha,
  - 2) Pupuk organik cair (POC) 15 liter/ha,

### BAB III



- 3) Herbisida 5 liter/ha,
- 4) 25 HOK/ha (Rp65.000 x 25 hok = Rp1.625.000) dan
- 5) benih hasil KBD 60.000 mata/ha
- d. Optimalisasi Indeks Pertanaman, terdiri dari:
  - 1) Benih padi 5000 kg
- e. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, terdiri dari:
  - 1) 435.625 kg benih padi inbrida,
  - 2) 3.750 kg benih padi hibrida,
  - 3) 18.000 kg benih jagung hibrida,
  - 4) 70.050 kg jagung ABT 1,
  - 5) 103.245 kg jagung ABT 2,
  - 6) 4.875 kg benih jagung limpahan,
  - 7) 15.000 kg jagung P35,
  - 8) 30.000 kg jagung B89,
  - 9) 48.585 kg Jagung Betras (LMDH) dan
  - 10) 2000 kg sorgum.
- f. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi, terdiri dari:
  - 1) 7.500 kg benih kacang hijau,
  - 2) 1.500 kg benih kacang tanah,
  - 3) 66.000 kg benih kedelai dan
  - 4) 22.000 butir bibit porang

#### **(Tugas pembantuan Provinsi)**

Tugas pembantuan provinsi yang didapat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan kegiatan:

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan, dan Pembangunan Embung Pertanian adalah:

- a. Pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak 46 paket
- b. Pembangunan irigasi perpompaan menengah sebanyak 1 paket
- c. Pembangunan dam parit sebanyak 6 paket, dan
- d. Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 5 paket

#### **5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan**

##### **(Tugas pembantuan Provinsi)**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditugaskan untuk melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan dukungan anggaran dari BKKBN sebesar Rp. 10.241.815.000,00 dan

### **BAB III**





teralisasi sebesar Rp. 8.237.517.936,00 atau 80,43% dan kinerja yang dilaksanakan telah mencapai target seperti yang disebutkan di dalam Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor : 558/HK.101/J.1/2021

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana, yang berisi kegiatan:
  - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan:
    - a) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK dengan anggaran Rp. 165.322.000,00 serta mempunyai target yaitu 27 Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dukungan Media KIE.
    - b) Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan anggaran Rp. 2.005.525,00 serta mempunyai target jumlah peserta orientasi tenaga lini lapangan sebanyak 324 orang, jumlah peserta Pembinaan kader IMP sebanyak 3645 orang, jumlah peserta penyuluhan KB sebanyak 3996 orang.
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan sub kegiatan:
    - a) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan anggaran Rp. 2.301.394.400,00.
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
    - a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan anggaran Rp.140.458.000,00 serta mempunyai target jumlah Faskes KB yang menerima Alkon sebanyak 59.
    - b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan anggaran Rp. 2.164.983.000,00 serta mempunyai target yaitu 2500 akseptor implant yang terlayani, 1500 akseptor IUD yang terlayani, 20 Akseptor MOP yang terlayani, dan 300 Akseptor MOW yang terlayani.
    - c) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik) dengan anggaran Rp. 1.184.500.000,00 serta mempunyai target yaitu 4

### BAB III



Balai yang direhab, 18 Unit Kendaraan roda dua pengantar akseptor yang tersedia dengan baik, 1 paket sarana dan prasarana gudang alokon yang diadakan dan 9 sarana prasarana pelayanan KB yang tersedia.

- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan sub kegiatan:
  - e. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan anggaran Rp.1.385.095.600,00 serta mempunyai target 3240 peserta kegiatan tribina, 2996 peserta pelaksanaan mekanisme operasional Lapangan di Kampung KB, dan 2675 peserta pertemuan kelompok kerja di Kampung KB.
2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), yang berisi kegiatan:
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sub kegiatan:
    - a) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) dengan anggaran Rp. 280.000.000,00 serta mempunyai target yaitu 10 paket BKB Kit Stunting dan 10 Paket Kit Siap Nikah Anti Stunting.
    - b) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan anggaran Rp.614.537.000,00 dan mempunyai target 2266 peserta Pembinaan stunting dan 1890 peserta yang mendapat Pembinaan pemahaman kespro bagi calon pengantin.

#### **6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan (Tugas pembantuan Provinsi)**

Kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Bidang Produksi dan Budidaya adalah :

1. Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri),

### **BAB III**



dengan kegiatan:

Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Sapi dan Kerbau

Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 2.894.625.000,00

Dasar pelaksanaanya:

- a. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/9001/122.6/2021 Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0847/122.6/2021 tentang Petugas Pelaksana Inseminasi Buatan (IB) Kegiatan SIKOMANDAN Tahun 2021
  - b. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/9002/122.6/2021 Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0848/122.6/2021 tentang Petugas Atau Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksa Kebuntingan (PKB) Kegiatan SIKOMANDAN Tahun 2021
  - c. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/9003/122.6/2021 Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0849/122.6/2021 tentang Petugas Tim Pelaksana Kegiatan Pelaporan Kelahiran. Kegiatan SIKOMANDAN Tahun 2021
2. Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
- Dengan Kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Penunjukan Dokter Hewan / Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan pada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
  - Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet  
Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
3. Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur atau APBD I dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 5.900.000,00

Dasar pelaksanaanya:

- a. SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor

### BAB III



188.4/0060/122.3/2021 Tentang Perubahan Pertama Penunjukan Dokter Hewan/Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan pada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

b. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/8725/122.3/2021 tentang Tim Petugas dan Alokasi Pengambilan Pengujian Sampel Feses Sapi dalam Rangka Surveillans Helminthiasis Tahun 2021

4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.430.000,00.

Dasar pelaksanaanya:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 nomor DIPA : SP DIPA.018 08.4.059186/2021 tanggal 23 November 2020

5. Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Pengawasan, Pemasukan, dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah, dengan kegiatan:

- Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
- Kegiatan Kesejahteraan Hewan
- Kegiatan Pengawasan, Pemasukan, dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah

Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur atau APBD I dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 7.600.000,00

Dasar pelaksanaanya:

a. SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/9641/122.4/2021 Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tentang Penunjukan Pemeriksa Kesehatan Produk Asal Hewan Di Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (Sertifikat Veteriner) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

**BAB III**



- b. Surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 524.3/2809/122.4/2021 Tanggal 5 April 2021 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemotongan Hewan Di RPH-R Tahun 2021
- c. SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0594/122.4/2021 Tanggal 20 Januari 2021 Tentang Petugas Pemeriksa AMPM Dan Status Reproduksi Di RPH-R Tahun 2021
- d. SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0593/122.4/2021 Tanggal 20 Januari 2021 Tentang Petugas Pelapor Data Pemotongan Ternak Di RPH Melalui SMS Gateway Tahun 2021

## 7) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan

### (Tugas pembantuan Pusat)

Dasar Pelaksanaanya:

DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA- 018.11.3.059444/2021 tanggal 19 April 2021

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 28.460.000,-. Dengan kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)

Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan, tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, dan ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa.

## 8) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

### (Tugas pembantuan Pusat)

Dasar pelaksanaannya:

Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor : PHD-058/IPDMIP/PK/2018 untuk *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program- IPDMIP*

## BAB III



(Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Parsipatif Terpadu)

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Parsipatif Terpadu (IPDMIP) adapun kegiatannya meliputi Kegiatan Pembinaan GHIPPA ini digunakan Program pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.000.000.000 Target bantuan anggaran digunakan untuk Kegiatan Fasilitas OP dan Perencanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi (RP2I).

#### **9) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan**

##### **(Tugas Pembantuan Pusat)**

Dalam tahun anggaran 2021 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mendapatkan mandat melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan :

1. Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya No. 174/KPTS/DC/2020, Tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021 Tahap I.
2. Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya No. 29/KPTS/DC/2021, Tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2021 Tahap I

##### **Program pelaksanaan tugas pembantuan:**

##### **1. PAMSIMAS**

Program kolaborasi Pemerintah Pusat (Bappenas, PUPR, Kemenkes, Kemendagri dan Kemendes PDTT), Pemprov, Pemkab, Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk:

- 1) Meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan
- 2) Meningkatkan PHBS
- 3) Menurunkan Buang Air Sembarangan
- 4) Menurunkan Angka Penyakit
- 5) Mengarus-utamakan program penyediaan akses air minum dan sanitasi melalui partisipasi aktif masyarakat.

### **BAB III**



Kegiatan Pamsimas di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2021 fokus ke Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran sebesar Rp. 2.940.000.000,00

## **2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan**

Program Kolaborasi Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Pemprov, Pemkab, Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk :

- 1) Meningkatkan akses sanitasi layak di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)  
Menurunkan buang air sembarangan
- 2) Mengarus-utamakan program penyediaan akses sanitasi layak melalui partisipasi aktif masyarakat
- 3) Menurunkan angka penyakit
- 4) Mengurangi pencemaran lingkungan khususnya badan air
- 5) Meningkatkan kesadaran para penghuni LPK dan Masyarakat sekitar terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat
- 6) Menciptakan lingkungan belajar mengajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat
- 7) Menggerakkan perekonomian masyarakat setempat sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Kegiatan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2021 fokus pada penanganan air limbah/sanitasi pada lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.200.000.000,-

### **10) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan (Tugas Pembantuan Provinsi)**

Dasar pelaksanaannya:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur;

## **BAB III**





4. Peraturan Gubernur Jaa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Kegiatan: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat & Lintas sektor Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan: Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran Rp. Rp. 909.155.500,-

#### **11) Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan**

##### **(Tugas Pembantuan Pusat)**

Dasar pelaksanaannya :

1. Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020, Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
3. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021  
Program Penyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 28.754.000.000,-.

### **3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **1) Dinas Pedidikan Kabupaten Lamongan**

##### **Tugas pembantuan Pusat**

Program Bantuan Pemerintah Sekolah Penerima Peralatan TIK SMP Tahun 2021 dan Program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan baik SD maupun SMP tercapai 100%.Program Bantuan Pemerintah Sekolah Penerima Peralatan TIK SMP Tahun 2021 terlaksana di 26 SMP di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 4 SMP Negeri dan 22 SMP Swasta. Serta Program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar terlaksana di 26 SD di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 23 SD Negeri dan 3 SD Swasta.

### **BAB III**





Target Kinerja yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek atas pelaksanaan penugasan pembantuan untuk Program Bantuan Pemerintah Sekolah Penerima Peralatan TIK SMP Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 26 lembaga SMP dengan anggaran Rp 2,297,125,000,-. Sedangkan Program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar ditargetkan sebanyak 26 SD dengan anggaran 2,420,548,000,-.

Realisasi Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan baik SD maupun SMP tercapai 100%. Program Bantuan Pemerintah Sekolah Penerima Peralatan TIK SMP Tahun 2021 terlaksana di 26 SMP di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 4 SMP Negeri dan 22 SMP Swasta dengan anggaran Rp.2,297,125,000,-. Serta Program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar terlaksana di 26 SD di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 23 SD Negeri dan 3 SD Swasta dengan anggaran Rp. 2,420,548,000,-

## **2) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

### **Tugas pembantuan Pusat**

#### **1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) dengan alokasi anggaran pembangunan sebagaimana terlampir ditabel.
- Kegiatan PBI JKN dengan dana APBN , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.573.570.000,- terealisasi sebesar Rp.27.573.570.000,- atau 100 %, adapun dana bantuan dipergunakan untuk bantuan iuran kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang berjumlah 612.746 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan se Kabupaten Lamongan; PBI JKN dengan dana APBD PROV. , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.880.470.000,- terealisasi sebesar Rp.880.470.000,- atau 100 %, adapun dana bantuan dipergunakan untuk bantuan iuran kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang berjumlah 19.566 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan se Kabupaten Lamongan; PBI JKN dengan dana APBD KAB. , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.943.000.000,- terealisasi sebesar Rp.2.943.000.000,- atau 100 %, adapun dana bantuan dipergunakan untuk bantuan iuran kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang berjumlah 65.400 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan se Kabupaten Lamongan
- Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah untuk korban bencana banjir dan longsor sebanyak 49.323 jiwa atau 98.646 ton atau

## **BAB III**



Rp.1.062.318.774,- dengan dana APBN.

2. Bidang Penanganan Fakmis

- Kegiatan penerima bantuan Sembako dengan dana APBN , dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana terlampir ditabel. Adapun dana bantuan dipergunakan untuk masyarakat miskin.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

- Kegiatan Penyandang Disabilitas sumber dana APBD PROV dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana terlampir ditabel.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

- Kegiatan TKSK, bantuan pada operasionalnya TKSK sebanyak 27 orang dengan Dana Dekon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.000.000,- terealisasi sebesar Rp.81.000.000,- atau 100%.

### 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

#### Tugas pembantuan Pusat

1. Program Dana Desa, dengan kegiatan :

Bantuan Keuangan Dana Desa dengan sasaran 27 Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 367.859.016.000,- terealisasi sebesar Rp. 367.859.016.000,-.

#### Tugas pembantuan Provinsi

1. Program BUMDesa

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dengan anggaran Rp. 450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 450.000.000,00

2. Program Desa Berdaya

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000,00

3. Program Jatim PUSPA

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Rp. 390.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 390.250.000,00

Program Bantuan Keuangan Desa (BK-Desa) Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,00

### 4) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

#### Tugas pembantuan Pusat

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan,

## BAB III



Hortikultura dan Perkebuna kabupaten Lamongan di antaranya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan, dan Pembangunan Embung Pertanian, Kebun Bibit Datar, Rawat Ratoon, Bongkar Ratoon, Optimalisasi Indeks Pertanaman, Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi. Target dan Realisasi sebagai berikut :

Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Capaian Kegiatan (%)
Rawat Ratoon	600 ha: NPK non subsidi 500 kg/ha  POC 15 liter/ha HOK 22 orang/ ha	600 ha: NPK non subsidi 500 kg/ha  POC 15 liter/ha HOK 22 orang/ ha	100%
Bongkar Ratoon	80 Ha: NPK non subsidi 500 kg/ha  POC 15 liter/ha Herbisida 5 liter/ha  HOK 25 orang/ha	80 Ha: NPK non subsidi 500 kg/ha  POC 15 liter/ha Herbisida 5 liter/ha  HOK 25 orang/ha	100%
Kebun Bibit Datar	Upah penyiapan lahan 50 HOK/ ha 60.000 benih tebu/ ha  Upah penanaman 25 HOK/ ha Insentif penggunaan lahan Rp 5.000.000/ ha  Pupuk majemuk 400 kag/ha POC 15 liter/ha Pestisida 4 liter/ha Pemupukan 30 HOK/ha  Penyiangan 20 HOK/ha  Pengendalian hama penyakit 10 HOK/ha  Penyiraman 20 HOK/ha  Penyulaman 20 HOK/ha  Tebang 57 HOK/ha Ikat dan pasang lebel 15 HOK/ha	Upah penyiapan lahan 50 HOK/ ha 60.000 benih tebu/ ha  Upah penanaman 25 HOK/ ha Insentif penggunaan lahan Rp 5.000.000/ ha  Pupuk majemuk 400 kag/ha POC 15 liter/ha Pestisida 4 liter/ha Pemupukan 30 HOK/ha  Penyiangan 20 HOK/ha  Pengendalian hama penyakit 10 HOK/ha  Penyiraman 20 HOK/ha  Penyulaman 20 HOK/ha  Tebang 57 HOK/ha Ikat dan pasang lebel 15 HOK/ha	100%

BAB III



	Muat benih 25 HOK/ ha  Bongkar benih 15 HOK/ha	Muat benih 25 HOK/ ha  Bongkar benih 15 HOK/ha	
Kegiatan Optimalisasi Indeks Pertanaman	5000 kg benih padi	5000 kg benih padi	100%
Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Padi inbrida 435.625 kg  Padi hibrida 3.750 kg  jagung hibrida 18.000 kg  jagung hibrida abt 70.050 kg jagung hibrida abt 2 103.245 kg jagung limpahan 4.875 kg  jagung P35 15.000 kg  Jagug B89 30.000 kg Jagung Betras (LMDH) 48.585 kg Sorgum 2000 kg	Padi inbrida 435.625 kg  Padi hibrida 3.750 kg  jagung hibrida 18.000 kg  jagung hibrida abt 70.050 kg jagung hibrida abt 2 103.245 kg jagung limpahan 4.875 kg  jagung P35 15.000 kg  Jagug B89 30.000 kg Jagung Betras (LMDH) 48.585 kg Sorgum 2000 kg	100%
Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	7.500 kg benih kacang hijau  1.500 kg benih kacang tanah 66.000 kg benih kedelai  22.000 bibit porang	7.500 kg benih kacang hijau  1.500 kg benih kacang tanah 66.000 kg benih kedelai  22.000 bibit porang	100%

**Tugas pembantuan Provinsi**

Tugas pembantuan provinsi yang didapat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan kegiatan:

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaaan, dan Pembangunan Embung Pertanian adalah:

- a. Pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak 46 paket
- b. Pembangunan irigasi perpompaaan menengah sebanyak 1 paket
- c. Pembangunan dam parit sebanyak 6 paket, dan

BAB III



d. Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 5 paket

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pembantuan dengan realisasi kinerja 100% atau telah terlaksana seluruhnya.

Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Capaian Kegiatan (%)
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, irigasi Perpompaan Menengah, dan Pembangunan Embung Pertanian	46 paket jaringan irigasi tersier 1 paket perpompaan menengah 6 paket dam parit 5 paket jalan usaha tani	46 paket jaringan irigasi tersier 1 paket perpompaan menengah 6 paket dam parit 5 paket jalan usaha tani	100%

5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan  
Tugas Pembantuan Provinsi

- 1. Program Pembinaan Keluarga Berencana, yang berisi kegiatan:
  - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan:
    - a) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK telah terealisasi sebesar Rp.113.970.400,00 dari anggaran Rp. 165.322.000,00.
    - b) Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK telah terealisasi sebesar Rp. 1.659.398.214,00 dari anggaran Rp. 2.005.525,00.
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan sub kegiatan:
    - a) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) telah terealisasi sebesar Rp. 2.301.394.400,00 dari anggaran Rp. 2.301.394.400,00.
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
    - a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya telah terealisasi sebesar Rp. 131.432.350,00 dari anggaran Rp.140.458.000,00.

BAB III



- b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) telah terealisasi sebesar Rp. 1.626.753.256,00 dari anggaran Rp. 2.164.983.000,00
  - c) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik) telah terealisasi Rp. 1.149.449.560,00 dengan anggaran Rp. 1.184.500.000,00
  - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan sub kegiatan:
    - a) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB telah terealisasi sebesar Rp. 361.988.650,00 dari anggaran Rp. 1.385.095.600,00.
2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), yang berisi kegiatan:
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sub kegiatan:
    - a) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) telah terealisasi sebesar Rp. 279.895.000,00 dari anggaran Rp. 280.000.000,00
    - b) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) telah terealisasi Rp. 613.236.750,00 dari anggaran Rp. 614.537.000,00.

## **6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan**

### **Tugas Pembantuan Provinsi**

- 1. Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri)  
Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 2.894.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.894.625.000,00 (100%).
- 2. Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
- 3. Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dinas Peternakan Provinsi

## **BAB III**



Jawa Timur atau APBD I dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 5.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.900.000,00 (100%).

4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas  
Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 240.130.951,00 (99,05%).
5. Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Pengawasan, Pemasukan, dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah  
Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur atau APBD I dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 7.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (65,79%).

## 7) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan

### Tugas Pembantuan Pusat

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggran Rp. 28.460.000,- terealisasi Rp. 28.460.000,- dengan kegiatan:  
Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*), dengan hasil :
  - Jumlah desa yang dianalisis FSVA adalah sebanyak 474 Desa/Kelurahan
  - Jumlah aspek yang digunakan dalam analisa FSVA sebanyak 3 Aspek

## 8) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

### Tugas Pembantuan Provinsi

1. Program dan Kegiatan yang bersumber dari Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 48.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.850.864.123,00 atau 87,19%. Realisasi dana digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
  - Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
  - Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A dan IP3A.
  - Pemeliharaan Pintu Air 15 Daerah Irigasi
  - Pengadaan Fasilitas Operasi dan Pemeliharaan 15 Daerah Irigasi
  - Rehabiltasi Bangunan Intake dan Spillway 15 Daerah Irigasi
  - Rehabiltasi Rumah Pintu Intake 15 Daerah Irigasi
  - Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo
  - Rehabilitasi Daerah Irigasi PA. Karanggeneng

## BAB III



- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bulu
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Suis Keyongan
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Bowo
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Canggih
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Delikguno
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Jajong
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Makam Santri
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Maduran
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Takeran
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Tuwiri
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Karangturi)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Mluwur)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi PA. Karanggeneng (Rehabilitasi Saluran Sekunder Mertani)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi PA. Karanggeneng (Rehabilitasi Saluran Sekunder Pangangsalan)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bulu (Rehabilitasi Saluran Sekunder Bulutengger)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bulu (Rehabilitasi Saluran Sekunder Siman)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon (Rehabilitasi Saluran Sekunder Madulegi)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon (Rehabilitasi Saluran Sekunder Pajangan)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Sluis Keyongan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Keyongan)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Sluis Keyongan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tritunggal)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Bowo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Sambungrejo)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Bowo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Sumberagung)

### BAB III





- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling (Rehabilitasi Saluran Sekunder Kedungbanjar)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling (Rehabilitasi Saluran Sekunder Sidorejo)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Canggih (Rehabilitasi Saluran Sekunder Canggih)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Canggih (Rehabilitasi Saluran Sekunder Pandanpancur)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Delikguno (Rehabilitasi Saluran Sekunder Jatierejo)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Delikguno (Rehabilitasi Saluran Sekunder Pengumbulanadi)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Jajong (Rehabilitasi Saluran Sekunder Bulubrangsi)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Jajong (Rehabilitasi Saluran Sekunder Godog)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Maduran (Rehabilitasi Saluran Sekunder Jangkungsumo)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Maduran (Rehabilitasi Saluran Sekunder Maduran)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Makamsantri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Karangtawar)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Makamsantri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tamanprijeg)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Mayong)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tanjungmekar)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Takeran (Rehabilitasi Saluran Sekunder Takeran)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Tuwiri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Deket Kulon)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Tuwiri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tambakboyoy)

---

**BAB III**

---



## 9) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

### Tugas Pembantuan Pusat

#### 1. PAMSIMAS

Target program padat karya Pamsimas pada tahun anggaran 2021 ditargetkan untuk 12 desa, yaitu :

- 1) Rumpuk, Kec. Mantup
- 2) Sambangrejo, Kec. Modo
- 3) Mojorejo, Kec. Modo
- 4) Pataan, Kec. Sambeng
- 5) Jabung, Kec. Laren
- 6) Sumberagung, Kec. Brondong
- 7) Selorejo, Kec. Sambeng
- 8) Sidobinangun, Kec. Deket
- 9) Rejotengah, Kec. Deket
- 10) Banjarejo, Kec. Karangbinangun
- 11) Tejoasri, Kec. Laren
- 12) Dinoyo, Kec. Deket

Kegiatan Pamsimas di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2021 fokus ke Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran sebesar Rp. 2.940.000.000,00 dan terealisasi 100%.

#### 2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan

##### Keagamaan

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan tahun anggaran 2021 ditargetkan untuk 26 LPK, yaitu :

1. PP Al Ikhlas, Desa/Kel. Gendongkulon, Kec. Babat
2. PP Raudlatul Muta'allimin , Desa/Kel. Moropelang, Kec. Babat
3. PP Mazroatul Fattah Al Maliky, Desa/Kel. Siman, Kec. Sekaran
4. PP Al Fattah 3, Desa/Kel. Siman, Kec. Sekaran
5. PP Tanwirul Qulub, Desa/Kel. Sungelebak, Kec. Karanggeneng
6. SPMAA, Desa/Kel. Turi, Kec. Turi
7. PP Bustanul Muta'allimin, Desa/Kel. Nguwok , Kec. Modo
8. PP Thoriqussalam, Desa/Kel. Lamongrejo, Kec. Ngimbang
9. PP Maulana Ishaq, Desa/Kel. Kemantren, Kec. Paciran

### BAB III



10. PP Darul Jannah Al-Ma'wa, Desa/Kel. Tunggul, Kec. Paciran
11. PP Darul Islam, Desa/Kel. SIDOMUKTI, Kec. Brondong
12. PPTQ Karangsawo, Desa/Kel. Sekeret, Kec. Paciran
13. PP An-Nuur Muhammadiyah, Desa/Kel. Karanggeneng, Kec. Karanggeneng
14. PP Al Muslimun, Desa/Kel. Kawistolegi, Kec. Karanggeneng
15. PP Al Bashor, Desa/Kel. Sidokumpul, Kec. Sambeng
16. PP Al Amin, Desa/Kel. Tunggul, Kec. Paciran
17. PP Bustanul Thullab, Desa/Kel. Siwalanrejo, Kec. Lamongan
18. PP Tanfirul Ghoyyi, Desa/Kel. Sukorejo, Kec. Lamongan
19. PP Al Falahiyah, Desa/Kel. Pomahanjangan, Kec. Turi
20. PP Al-Muttaqin, Desa/Kel. Bakalanpule, Kec. Tikung
21. PP Baitussalam, Desa/Kel. Bluluk, Kec. Bluluk
22. PP Darul Maarif, Desa/Kel. Payaman, Kec. Solokuro
23. PP Al Kautsar, Desa/Kel. Le Manyar, Kec. Sekaran
24. PP Tarbiyatut Tholabah, Desa/Kel. Kranji, Kec. Paciran
25. PP Al Balagh, Desa/Kel. Bulutigo, Kec. Laren
26. PP Baitul Qur'an Lamongan, Desa/Kel. Gembong, Kec. Babat

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan pada tahun anggaran 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 5.200.000.000,- dan terealisasi 100%.

#### 10) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

##### Tugas Pembantuan Provinsi

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Kegiatan: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat & Lintas sektor Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan: Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 909.155.500 dan terealisasi sebesar Rp. 582.065.300 atau 64,02%

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2021, dari 10 Ponkestren adalah 100% tingkat ke berhasilan, dan dari pendampingan 100 bumil KEK, 100 bumil risti, 7728 KK yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan, monitoring evaluasi petugas konseling kesehatan

### BAB III



### 11) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

#### Tugas Pembantuan Pusat

Program Penyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan target Peningkatan Jalan Ruas Tikung – Sumberkerep, Peningkatan Jalan Ruas Karangkembang – Gendongkulon dan Peningkatan Jalan Ruas Tunjungmekar - Sambopinggir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.754.000.000,- terealisasi Rp. 14.451.642.000,-.

## 3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

### 3.1.1. Target Kinerja

#### a. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Target Kinerja yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek atas pelaksanaan penugasan pembantuan untuk Program Bantuan Pemerintah Sekolah Penerima Peralatan TIK SMP Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 26 lembaga SMP dengan anggaran Rp 2,297,125,000,-. Sedangkan Program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar ditargetkan sebanyak 26 SD dengan anggaran 2,420,548,000,-.

#### b. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

##### 1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) dengan alokasi anggaran pembangunan.
- Kegiatan PBI JKN dengan dana APBN , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.573.570.000,- adapun dana bantuan dipergunakan untuk bantuan iuran kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang berjumlah 612.746 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan se Kabupaten Lamongan; PBI JKN dengan dana APBD PROV. , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.880.470.000,- adapun dana bantuan dipergunakan untuk bantuan iuran kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang berjumlah 19.566 jiwa yang tersebar

## BAB III



di 27 kecamatan se Kabupaten Lamongan; PBI JKN dengan dana APBD KAB. , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.943.000.000,- adapun dana bantuan dipergunakan untuk bantuan iuran kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang berjumlah 65.400 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan se Kabupaten Lamongan

- Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah untuk korban bencana banjir dan longsor sebanyak 49.323 jiwa atau 98.646 ton atau Rp.1.062.318.774,- dengan dana APBN.

2. Bidang Penanganan Fakmis

- Kegiatan penerima bantuan Sembako dengan dana APBN , dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana terlampir ditabel. Adapun dana bantuan dipergunakan untuk masyarakat miskin.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021, alokasi dana desa di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Target Kinerja Bantuan Keuangan Dana Desa

No.	Kecamatan/Desa		Jumlah Dana Desa (Rp)
1	2		3
1	Sukorame		
	1.	Sembung	747.492.000
	2.	Banggle	1.039.282.000
	3.	Kedungkumpul	1.174.960.000
	4.	Sukorame	1.083.546.000
	5.	Mragel	758.728.000
	6.	Kedungrejo	739.370.000
	7.	Sewor	793.590.000
	8.	Wedoro	742.049.000
	9.	Pendowokumpul	742.150.000
	Jumlah		7.821.167.000
2	Bluluk		
	1.	Talunrejo	1.200.825.000

BAB III



	2.	Banjargondang	751.575.000
	3.	Bluluk	742.130.000
	4.	Cangkring	773.334.000
	5.	Bronjong	1.041.739.000
	6.	Songowareng	1.079.002.000
	7.	Kuwurejo	780.127.000
	8.	Sumberbanjar	797.896.000
	9.	Primpen	1.126.042.000
	Jumlah		8.292.670.000
3	Modo		
	1.	Jegreg	1.070.934.000
	2.	Kedungpengaron	833.993.000
	3.	Sumberagung	1.034.522.000
	4.	Kedunglerep	769.210.000
	5.	Jatipayak	793.847.000
	6.	Kedungwaras	773.458.000
	7.	Sidomulyo	871.612.000
	8.	Sambangrejo	746.887.000
	9.	Medalem	739.114.000
	10.	Sidodowo	817.592.000
	11.	Mojorejo	869.113.000
	12.	Sambungrejo	1.053.829.000
	13.	Kedungrejo	731.117.000
	14.	Kacangan	745.304.000
	15.	Nguwok	712.695.000
	16.	Pule	789.360.000
	17.	Yungyang	747.163.000
	Jumlah		14.099.750.000
4	Ngimbang		
	1.	Kedungmentawar	717.337.000
	2.	Cerme	749.636.000
	3.	Gebangangkrik	824.198.000
	4.	Ngasemlemahbang	736.064.000
	5.	Slaharwotan	873.798.000
	6.	Ganggangtingan	771.082.000
	7.	Jejel	746.530.000
	8.	Purwokerto	771.622.000
	9.	Kakatpenjalin	787.266.000
	10.	Tlemang	747.296.000
	11.	Mendogo	778.807.000
	12.	Lawak	828.473.000
	13.	Drujugurit	721.644.000
	14.	Girik	827.563.000
	15.	Munungrejo	792.326.000
	16.	Ngimbang	735.793.000
	17.	Durikedungjero	754.157.000
	18.	Lamongrejo	908.392.000

BAB III



	19.	Sendangrejo	916.323.000
	Jumlah		<b>14.988.307.000</b>
5	Babat		
	1.	Karangkembang	779.195.000
	2.	Pucakwangi	713.660.000
	3.	Sogo	719.984.000
	4.	Bedahan	720.521.000
	5.	Truni	754.403.000
	6.	Gendongkulon	808.685.000
	7.	Plaosan	937.172.000
	8.	Trepan	741.052.000
	9.	Kuripan	896.092.000
	10.	Kebalanpelang	769.253.000
	11.	Sumurgenuk	1.286.685.000
	12.	Gembong	1.159.003.000
	13.	Bulumargi	932.449.000
	14.	Datinawong	1.310.074.000
	15.	Kebalandono	1.120.006.000
	16.	Patihan	815.377.000
	17.	Moropelang	970.091.000
	18.	Keyongan	807.919.000
	19.	Sambangan	762.647.000
	20.	Tritunggal	817.273.000
	21.	Kebonagung	1.016.936.000
	Jumlah		<b>18.838.477.000</b>
6	Kedungpring		
	1.	Dradahblumbang	989.166.000
	2.	Kalen	736.780.000
	3.	Mojodadi	725.374.000
	4.	Gunungrejo	759.081.000
	5.	Warungring	1.274.651.000
	6.	Jatidrojog	726.480.000
	7.	Kradenanrejo	790.591.000
	8.	Kandangrejo	705.335.000
	9.	Kedungpring	741.871.000
	10.	Tlanak	747.596.000
	11.	Sukomalo	753.294.000
	12.	Mlati	745.665.000
	13.	Karangcangkring	714.371.000
	14.	Mekanderejo	744.092.000
	15.	Banjarejo	727.029.000
	16.	Sidobangun	700.196.000
	17.	Blawirejo	728.505.000
	18.	Maindu	719.019.000
	19.	Tenggerejo	796.039.000
	20.	Majenang	807.651.000
	21.	Sidomlangean	728.861.000

## BAB III



	22.	Nglebur	733.446.000
	23.	Sumengko	737.558.000
	Jumlah		17.832.651.000
7	Brondong		
	1.	Lohgung	807.423.000
	2.	Labuhan	904.135.000
	3.	Sidomukti	992.862.000
	4.	Brengkok	1.028.360.000
	5.	Tlogoretno	735.747.000
	6.	Sendangharjo	962.819.000
	7.	Lembor	871.782.000
	8.	Sedayulawas	1.580.623.000
	9.	Sumberagung	813.723.000
	Jumlah		8.697.474.000
8	Laren		
	1.	Dateng	1.094.727.000
	2.	Jabung	762.910.000
	3.	Keduyung	743.037.000
	4.	Centini	774.098.000
	5.	Durikulon	778.734.000
	6.	Pesanggrahan	732.381.000
	7.	Gelap	1.119.709.000
	8.	Mojoasem	756.116.000
	9.	Siser	760.786.000
	10.	Bulutigo	1.074.988.000
	11.	Pelangwot	848.361.000
	12.	Laren	724.051.000
	13.	Gampangsejati	752.284.000
	14.	Tamanprijeg	797.315.000
	15.	Karangtawar	717.503.000
	16.	Tejoasri	799.387.000
	17.	Godog	1.064.232.000
	18.	Bulubrangsi	748.527.000
	19.	Karangwungulor	703.555.000
	20.	Brangsi	1.018.032.000
	Jumlah		16.770.733.000
9	Sekaran		
	1.	Besur	745.047.000
	2.	Titik	631.118.000
	3.	Kendal	1.047.726.000
	4.	Keting	642.326.000
	5.	Ngarum	642.225.000
	6.	Kebalankulon	728.003.000
	7.	Kudikan	778.147.000
	8.	Jugo	1.047.361.000
	9.	Manyar	806.224.000
	10.	Trosono	1.132.481.000

BAB III





	11.	Latek	755.038.000
	12.	Miru	786.213.000
	13.	Sekaran	864.050.000
	14.	Moro	618.923.000
	15.	Karang	997.754.000
	16.	Kembangan	707.221.000
	17.	Siman	714.960.000
	18.	Bulutengger	1.027.134.000
	19.	Porodeso	995.160.000
	20.	Bugel	633.488.000
	21.	Sungegeneng	776.733.000
	Jumlah		17.077.332.000
10	Maduran		
	1.	Duriwetan	730.282.000
	2.	Taji	1.065.199.000
	3.	Brumbun	744.570.000
	4.	Siwuran	715.740.000
	5.	Klagersrampat	765.108.000
	6.	Pangean	763.349.000
	7.	Maduran	703.165.000
	8.	Jangkungsomo	626.976.000
	9.	Parengan	697.328.000
	10.	Pangkatrejo	642.962.000
	11.	Kanugrahan	753.114.000
	12.	Gumantuk	1.092.071.000
	13.	Ngayung	749.537.000
	14.	Pringgoboyo	713.781.000
	15.	Gedangan	1.044.817.000
	16.	Turi	776.745.000
	17.	Blumbang	715.484.000
	Jumlah		12,874,521,000
11	Sambeng		
	1.	Sidokumpul	767.388.000
	2.	Pasarlegi	743.599.000
	3.	Semampirejo	755.649.000
	4.	Wateswinangun	784.903.000
	5.	Sumbersari	743.416.000
	6.	Pataan	816.780.000
	7.	Tenggiring	764.742.000
	8.	Garung	734.087.000
	9.	Wonorejo	746.556.000
	10.	Ardirejo	807.812.000
	11.	Sekidang	649.926.000
	12.	Kedungwangi	745.463.000
	13.	Jatipandak	786.039.000
	14.	Candisari	776.712.000
	15.	Nogojatisari	735.966.000

BAB III



	16.	Pamotan	810.595.000
	17.	Wudi	739.410.000
	18.	Barurejo	724.946.000
	19.	Kedungbanjar	620.204.000
	20.	Gempolmanis	741.238.000
	21.	Selorejo	764.762.000
	22.	Kreteranggon	845.378.000
	<b>Jumlah</b>		<b>16.605.571.000</b>
12	Sugio		
	1.	Sidobogem	638.541.000
	2.	Kalitengah	808.441.000
	3.	Kedungdadi	774.296.000
	4.	Sidorejo	862.323.000
	5.	Kedungbanjar	730.963.000
	6.	Bedingin	846.350.000
	7.	Bakalrejo	736.470.000
	8.	Gondanglor	832.251.000
	9.	Pangkatrejo	739.604.000
	10.	Karangsambigalih	764.381.000
	11.	Supenuh	706.850.000
	12.	Lebakadi	781.026.000
	13.	Deketagung	773.589.000
	14.	Jubellor	791.783.000
	15.	Sugio	856.670.000
	16.	Daliwangun	730.569.000
	17.	Jubelkidul	802.133.000
	18.	Lawanganagung	877.539.000
	19.	Kalipang	715.822.000
	20.	German	760.423.000
	21.	Sekarbagus	913.918.000
	<b>Jumlah</b>		<b>16.443.942.000</b>
13	Pucuk		
	1.	Pucuk	698.077.000
	2.	Gempolpading	728.494.000
	3.	Kesambi	703.540.000
	4.	Plososetro	733.811.000
	5.	Wanar	942.352.000
	6.	Karangtinggil	704.014.000
	7.	Warukulon	753.996.000
	8.	Waruwetan	705.311.000
	9.	Kedali	721.592.000
	10.	Paji	757.550.000
	11.	Sumberjo	744.043.000
	12.	Cungkup	769.000.000
	13.	Bugoharjo	748.784.000
	14.	Ngambeg	765.467.000
	15.	Babatkumpul	724.637.000

## BAB III



	16.	Tanggungan	772.462.000
	17.	Padenganploso	946.948.000
	Jumlah		12.920.078.000
14	Paciran		
	1.	Kandangsemangkon	880.264.000
	2.	Paciran	964.139.000
	3.	Sumurgayam	774.851.000
	4.	Sendangagung	1.221.483.000
	5.	Sendangduwur	741.299.000
	6.	Tunggul	1.149.423.000
	7.	Kranji	927.896.000
	8.	Drajat	761.589.000
	9.	Banjarwati	841.455.000
	10.	Kemantren	848.389.000
	11.	Sidokelar	712.762.000
	12.	Tlogosadang	706.595.000
	13.	Paloh	721.542.000
	14.	Weru	690.064.000
	15.	Sidokumpul	681.762.000
	16.	Warulor	709.903.000
	Jumlah		13.333.416.000
15	Solokuro		
	1.	Dadapan	970.315.000
	2.	Tebluru	783.656.000
	3.	Sugihan	756.699.000
	4.	Tenggulun	730.185.000
	5.	Payaman	1.060.872.000
	6.	Solokuro	780.009.000
	7.	Takerharjo	878.715.000
	8.	Dagan	938.853.000
	9.	Banyubang	728.645.000
	10.	Bluri	711.056.000
	Jumlah		8.339.005.000
16	Mantup		
	1.	Sukobendu	923.640.000
	2.	Tunggunjagir	824.554.000
	3.	Sumberbendo	761.834.000
	4.	Mantup	905.586.000
	5.	Kedukbembem	766.787.000
	6.	Sumberdadi	747.436.000
	7.	Kedungsoko	780.705.000
	8.	Tugu	725.667.000
	9.	Sukosari	789.224.000
	10.	Sumberagung	722.185.000
	11.	Sidomulyo	736.974.000
	12.	Mojosari	1.051.148.000
	13.	Plabuhanrejo	1.062.255.000

BAB III



	14.	Sumberkerep	763.869.000
	15.	Rumpuk	1.050.808.000
	Jumlah		12.612.672.000
17	Sukodadi		
	1.	Siwalanrejo	707.094.000
	2.	Kebonsari	706.883.000
	3.	Sukolilo	777.619.000
	4.	Pajangan	737.150.000
	5.	Kadungrembug	795.278.000
	6.	Sumberagung	730.793.000
	7.	Sukodadi	918.019.000
	8.	Sumberaji	726.310.000
	9.	Menongo	737.007.000
	10.	Madulegi	819.125.000
	11.	Banjarejo	772.981.000
	12.	Plumpang	754.842.000
	13.	Bandungsari	801.186.000
	14.	Sidogembul	768.699.000
	15.	Balongtawun	790.440.000
	16.	Gedangan	736.162.000
	17.	Tlogorejo	710.270.000
	18.	Baturono	758.307.000
	19.	Surabayan	697.672.000
	20.	Sugihrejo	746.032.000
	Jumlah		15.191.869.000
18	Karanggeneng		
	1.	Bantengputih	725.966.000
	2.	Karangrejo	721.437.000
	3.	Latukan	1.064.607.000
	4.	Guci	733.794.000
	5.	Kaligerman	623.975.000
	6.	Sungelebak	741.049.000
	7.	Priekngablak	714.320.000
	8.	Tracal	727.645.000
	9.	Sonoadi	608.674.000
	10.	Kalanganyar	749.601.000
	11.	Banjarmadu	799.887.000
	12.	Kendalkemlagi	779.632.000
	13.	Kawistolegi	755.091.000
	14.	Jagran	724.087.000
	15.	Karangwungu	713.556.000
	16.	Sumberwudi	705.207.000
	17.	Karanggeneng	692.886.000
	18.	Mertani	729.427.000
	Jumlah		13.310.841.000
19	Kembangbahu		
	1.	Tlogoagung	746.975.000

BAB III



	2.	Kedungmegarih	824.678.000
	3.	Sidomukti	747.623.000
	4.	Sukosongo	718.540.000
	5.	Kaliwates	751.867.000
	6.	Kedungasri	851.404.000
	7.	Doyomulyo	742.337.000
	8.	Kembangbahu	714.368.000
	9.	Maor	731.224.000
	10.	Moronyamplung	754.997.000
	11.	Mangkujajar	1.054.685.000
	12.	Puter	1.144.788.000
	13.	Pelang	1.094.132.000
	14.	Dumpiagung	792.458.000
	15.	Randubener	728.286.000
	16.	Lopang	1.424.696.000
	17.	Gintungan	765.010.000
	18.	Katemas	730.845.000
	<b>Jumlah</b>		<b>15.318.913.000</b>
20	Kalitengah		
	1.	Pucangro	717.167.000
	2.	Pucangtelu	716.019.000
	3.	Somosari	726.515.000
	4.	Jelakcatur	843.025.000
	5.	Mungli	706.096.000
	6.	Pengangsalan	705.143.000
	7.	Dibee	692.150.000
	8.	Butungan	784.273.000
	9.	Lukrejo	760.489.000
	10.	Tiwet	705.293.000
	11.	Blajo	659.292.000
	12.	Kalitengah	637.753.000
	13.	Gambuhan	718.308.000
	14.	Cluring	626.820.000
	15.	Bojoasri	891.883.000
	16.	Kediren	712.982.000
	17.	Kuluran	736.628.000
	18.	Canditunggal	715.086.000
	19.	Sugihwaras	731.792.000
	20.	Tunjungmekar	686.697.000
	<b>Jumlah</b>		<b>14.473.411.000</b>
21	Turi		
	1.	Geger	872.718.000
	2.	Badurame	773.990.000
	3.	Karangwedoro	760.456.000
	4.	Wangunrejo	715.710.000
	5.	Putatkumpul	1.112.334.000
	6.	Keben	779.599.000

## BAB III



	7.	Sukoanyar	690.604.000
	8.	Kemlagigede	758.337.000
	9.	Turi	724.603.000
	10.	Kemlagilor	763.239.000
	11.	Sukorejo	706.422.000
	12.	Tawangrejo	751.324.000
	13.	Bambang	707.006.000
	14.	Pomahanjangan	776.595.000
	15.	Tambakploso	736.015.000
	16.	Balun	802.705.000
	17.	Ngujungrejo	759.149.000
	18.	Kepudibener	883.297.000
	19.	Gedongboyountung	762.088.000
	Jumlah		14.836.191.000
22	Lamongan		
	1.	Rancangkencono	747.113.000
	2.	Karanglangit	709.218.000
	3.	Pangkatrejo	778.884.000
	4.	Kebet	709.682.000
	5.	Sendangrejo	753.903.000
	6.	Sumberjo	754.171.000
	7.	Tanjung	697.487.000
	8.	Plosowahyu	703.045.000
	9.	Wajik	722.635.000
	10.	Kramat	734.558.000
	11.	Made	806.936.000
	12.	Sidomukti	691.746.000
	Jumlah		8.809.378.000
23	Tikung		
	1.	Wonokromo	1.056.825.000
	2.	Soko	840.710.000
	3.	Gumingrejo	713.200.000
	4.	Bakalanpule	781.420.000
	5.	Takeranklating	776.318.000
	6.	Kelorarum	742.006.000
	7.	Jotosanur	776.339.000
	8.	Pengumbulanadi	749.702.000
	9.	Jatirejo	756.642.000
	10.	Dukuhagung	746.110.000
	11.	Tambakrigadung	844.805.000
	12.	Botoputih	757.851.000
	13.	Balongwangi	821.844.000
	Jumlah		10.363.772.000
24	Karangbinangun		
	1.	Waruk	707.400.000
	2.	Sukorejo	739.968.000
	3.	Karanganom	726.366.000

BAB III



	4.	Somowinangun	716.211.000
	5.	Ketapangtelu	1.016.856.000
	6.	Mayong	838.615.000
	7.	Palangan	737.314.000
	8.	Blawi	722.127.000
	9.	Banjarejo	795.140.000
	10.	Putatbangah	826.145.000
	11.	Banyuurip	705.760.000
	12.	Pendowolimo	728.620.000
	13.	Baranggayam	888.483.000
	14.	Watangpanjang	747.094.000
	15.	Sambopinggir	706.961.000
	16.	Priyoso	623.756.000
	17.	Windu	705.579.000
	18.	Bogobabadan	719.430.000
	19.	Gawerejo	750.844.000
	20.	Kuro	1.246.156.000
	21.	Karangbinangun	710.785.000
	<b>Jumlah</b>		<b>16.359.610.000</b>
25	Deket		
	1.	Sidorejo	713.182.000
	2.	Dlanggu	758.467.000
	3.	Laladan	718.500.000
	4.	Deketkulon	711.988.000
	5.	Deketwetan	791.915.000
	6.	Sugihwaras	868.440.000
	7.	Dinoyo	714.564.000
	8.	Sidomulyo	768.985.000
	9.	Rejosari	718.145.000
	10.	Pandanpancur	732.949.000
	11.	Sidobinangun	750.160.000
	12.	Babatagung	714.545.000
	13.	Tukkerto	730.121.000
	14.	Weduni	713.965.000
	15.	Rejotengah	716.162.000
	16.	Srirande	724.472.000
	17.	Plosobuden	724.495.000
	<b>Jumlah</b>		<b>12.571.055.000</b>
26	Glagah		
	1.	Soko	693.408.000
	2.	Morocalan	712.658.000
	3.	Gempolpendowo	684.462.000
	4.	Pasi	733.563.000
	5.	Rayunggumuk	721.574.000
	6.	Menganti	726.238.000
	7.	Margoanyar	698.954.000
	8.	Began	615.105.000

## BAB III



	9.	Mendogo	706.587.000	
	10.	Kentong	1.042.912.000	
	11.	Sudangan	703.220.000	
	12.	Medang	840.589.000	
	13.	Duduklor	701.481.000	
	14.	Glagah	707.365.000	
	15.	Wangen	968.070.000	
	16.	Tanggungprigel	891.822.000	
	17.	Karangagung	694.588.000	
	18.	Bangkok	738.906.000	
	19.	Jatirenggo	789.474.000	
	20.	Bapuhbaru	755.705.000	
	21.	Bapuhbandung	886.309.000	
	22.	Meluntur	697.462.000	
	23.	Konang	618.283.000	
	24.	Dukuhtunggal	720.449.000	
	25.	Panggang	748.851.000	
	26.	Wonorejo	723.107.000	
	27.	Wedoro	700.496.000	
	28.	Karangturi	708.369.000	
	29.	Meluwur	707.192.000	
	Jumlah		21.637.199.000	
	27	Sarirejo		
		1.	Kedungkumpul	760.868.000
		2.	Dermolemahbang	899.025.000
		3.	Simbatan	855.967.000
		4.	Sumberjo	774.373.000
		5.	Canggah	639.007.000
		6.	Beru	724.930.000
7.		Tambakmenjangan	880.364.000	
8.		Gempoltukmloko	740.285.000	
9.		Sarirejo	738.485.000	
Jumlah		7.013.04.000		
Total			367.859.016.000	

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Permendes PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan, yaitu:

1. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta

BAB III





terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa, dan

2. Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk didalamnya dana desa.

Pelaksanaan program nasional yang menggunakan dana desa selain penanganan Covid19 adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 0%. Salah satu program pengentasan kemiskinan ekstrem dilaksanakan dalam bentuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD Top Up) selama 3 bulan.

#### **d. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan**

Target kinerja tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah:

3. Kebun Bibit Datar, terdiri dari:
  - Upah penyiapan lahan 50 HOK/ ha
  - 60.000 benih tebu/ ha
  - Upah penanaman 25 HOK/ ha
  - Insentif penggunaan lahan Rp 5.000.000/ ha
  - Pupuk majemuk 400 kag/ha
  - POC 15 liter/ha
  - Pestisida 4 liter/ha
  - Pemupukan 30 HOK/ha
  - Penyiangan 20 HOK/ha
  - Pengendalian hama penyakit 10 HOK/ha
  - Penyiraman 20 HOK/ha
  - Penyulaman 20 HOK/ha
  - Tebang 57 HOK/ha
  - Ikat dan pasang lebel 15 HOK/ha
  - Muat benih 25 HOK/ ha

### **BAB III**



- Bongkar benih 15 HOK/ha
- 4. Rawat Ratoon, terdiri dari:
  - Pupuk NPK non subsidi 500kg/ha,
  - POC 15 liter/ha,
  - Herbisida 5 liter/ha, dan
  - Upah HOK 22 HOK/ha (Rp65.000 x 22 orang = Rp1.430.000)
- 5. Bongkar Ratoon, terdiri dari:
  - Pupuk NPK non subsidi 500kg/ha,
  - Pupuk organik cair (POC) 15 liter/ha,
  - Herbisida 5 liter/ha,
  - 25 HOK/ha (Rp65.000 x 25 hok = Rp1.625.000) dan
  - benih hasil KBD 60.000 mata/ha
- 6. Optimalisasi Indeks Pertanaman, terdiri dari:
  - Benih padi 5000 kg
- 7. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, terdiri dari:
  - 435.625 kg benih padi inbrida,
  - 3.750 kg benih padi hibrida,
  - 18.000 kg benih jagung hibrida,
  - 70.050 kg jagung ABT 1,
  - 103.245 kg jagung ABT 2,
  - 4.875 kg benih jagung limpahan,
  - 15.000 kg jagung P35,
  - 30.000 kg jagung B89,
  - 48.585 kg Jagung Betras (LMDH) dan
  - 2000 kg sorgum.
- 8. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi, terdiri dari:
  - 7.500 kg benih kacang hijau,
  - 1.500 kg benih kacang tanah,
  - 66.000 kg benih kedelai dan
  - 22.000 butir bibit porang

**e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Tugas Pembantuan yang didukung oleh anggaran dari Dana Transfer ke Daerah untuk Program KKBPK yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang KB

**BAB III**



sejumlah Rp. 1.184.500.000,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) sebesar Rp. 8.777.315.000,00 dan DAK Pengasan sebesar Rp. 280.000.000,00 yang selanjutnya diwujudkan ke dalam program dan kegiatan seperti :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana, yang berisi kegiatan:
  - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan:
    - a) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK dengan anggaran Rp. 165.322.000,00 serta mempunyai target yaitu 27 Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dukungan Media KIE.
    - b) Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan anggaran Rp. 2.005.525,00 serta mempunyai target jumlah peserta orientasi tenaga lini lapangan sebanyak 324 orang, jumlah peserta Pembinaan kader IMP sebanyak 3645 orang, jumlah peserta penyuluhan KB sebanyak 3996 orang.
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan sub kegiatan:
    - a) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan anggaran Rp. 2.301.394.400,00.
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
    - a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan anggaran Rp.140.458.000,00 serta mempunyai target jumlah Faskes KB yang menerima Alkon sebanyak 59.
    - b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan anggaran Rp. 2.164.983.000,00 serta mempunyai target yaitu 2500 akseptor implant yang terlayani, 1500 akseptor IUD yang terlayani, 20 Akseptor MOP yang terlayani, dan 300 Akseptor MOW yang terlayani.
    - c) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik)

### BAB III



dengan anggaran Rp. 1.184.500.000,00 serta mempunyai target yaitu 4 Balai yang direhab, 18 Unit Kendaraan roda dua pengantar akseptor yang tersedia dengan baik, 1 paket sarana dan prasarana gudang alokon yang diadakan dan 9 sarana prasarana pelayanan KB yang tersedia.

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan sub kegiatan:

a) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan anggaran Rp.1.385.095.600,00 serta mempunyai target 3240 peserta kegiatan tribina, 2996 peserta pelaksanaan mekanisme operasional Lapangan di Kampung KB, dan 2675 peserta pertemuan kelompok kerja di Kampung KB.

2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), yang berisi kegiatan:

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sub kegiatan:

a) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) dengan anggaran Rp. 280.000.000,00 serta mempunyai target yaitu 10 paket BKB Kit Stunting dan 10 Paket Kit Siap Nikah Anti Stunting.

b) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan anggaran Rp.614.537.000,00 dan mempunyai target 2266 peserta Pembinaan stunting dan 1890 peserta yang mendapat Pembinaan pemahaman kespro bagi calon pengantin

#### **f. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan**

Target kinerja Program dan Kegiatan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security*

### **BAB III**



*and Vulnerability Atlas – FSVA).*

Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan, tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, dan ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa.

#### **g. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan**

Program dan Kegiatan yang bersumber dari Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 48.000.000.000,00. Target bantuan anggaran digunakan untuk Kegiatan Fasilitas OP dan Perencanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi (RP2I).

#### **h. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan**

##### **1. PAMSIMAS**

Target program padat karya Pamsimas pada tahun anggaran 2021 ditargetkan untuk 12 desa, yaitu :

- 1) Rumpuk, Kec. Mantup
- 2) Sambangrejo, Kec. Modo
- 3) Mojorejo, Kec. Modo
- 4) Pataan, Kec. Sambeng
- 5) Jabung, Kec. Laren
- 6) Sumberagung, Kec. Brondong
- 7) Selorejo, Kec. Sambeng
- 8) Sidobinangun, Kec. Deket
- 9) Rejotengah, Kec. Deket
- 10) Banjarejo, Kec. Karangbinangun

### **BAB III**



- 11) Tejoasri, Kec. Laren
  - 12) Dinoyo, Kec. Deket
2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan
- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan tahun anggaran 2021 ditargetkan untuk 26 LPK, yaitu :
- 1) PP Al Ikhlas, Desa/Kel. Gendongkulon, Kec. Babat
  - 2) PP Raudlatul Muta'allimin , Desa/Kel. Moropelang, Kec. Babat
  - 3) PP Mazroatul Fattah Al Maliky, Desa/Kel. Siman, Kec. Sekaran
  - 4) PP Al Fattah 3, Desa/Kel. Siman, Kec. Sekaran
  - 5) PP Tanwirul Qulub, Desa/Kel. Sungelebak, Kec. Karanggeneng
  - 6) SPMAA, Desa/Kel. Turi, Kec. Turi
  - 7) PP Bustanul Muta'allimin, Desa/Kel. Nguwok , Kec. Modo
  - 8) PP Thoriqussalam, Desa/Kel. Lamongrejo, Kec. Ngimbang
  - 9) PP Maulana Ishaq, Desa/Kel. Kemantren, Kec. Paciran
  - 10) PP Darul Jannah Al-Ma'wa, Desa/Kel. Tunggul, Kec. Paciran
  - 11) PP Darul Islam, Desa/Kel. SIDOMUKTI, Kec. Brondong
  - 12) PPTQ Karangsawo, Desa/Kel. Sekeret, Kec. Paciran
  - 13) PP An-Nuur Muhammadiyah, Desa/Kel. Karanggeneng, Kec. Karanggeneng
  - 14) PP Al Muslimun, Desa/Kel. Kawistolegi, Kec. Karanggeneng
  - 15) PP Al Bashor, Desa/Kel. Sidokumpul, Kec. Sambeng
  - 16) PP Al Amin, Desa/Kel. Tunggul, Kec. Paciran
  - 17) PP Bustanul Thullab, Desa/Kel. Siwalanrejo, Kec. Lamongan
  - 18) PP Tanfirul Ghoyyi, Desa/Kel. Sukorejo, Kec. Lamongan
  - 19) PP Al Falahiyah, Desa/Kel. Pomahanjangan, Kec. Turi
  - 20) PP Al-Muttaqin, Desa/Kel. Bakalanpule, Kec. Tikung
  - 21) PP Baitussalam, Desa/Kel. Bluluk, Kec. Bluluk
  - 22) PP Darul Maarif, Desa/Kel. Payaman, Kec. Solokuro
  - 23) PP Al Kautsar, Desa/Kel. Le Manyar, Kec. Sekaran
  - 24) PP Tarbiyatut Tholabah, Desa/Kel. Kranji, Kec. Paciran

### BAB III



- 25) PP Al Balagh, Desa/Kel. Bulutigo, Kec. Laren
- 26) PP Baitul Qur'an Lamongan, Desa/Kel. Gembong, Kec. Babat

i. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

Target Program Penyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota yaitu Peningkatan Jalan Ruas Tikung – Sumberkerep, Peningkatan Jalan Ruas Karangkembang – Gendongkulon dan Peningkatan Jalan Ruas Tunjungmekar - Sambopinggir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.754.000.000,-.

3.1.2. Realisasi

a. Dinas Pedidikan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.1  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

N O	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGA RAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KE T.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEMENDI KBUDRIST EK	Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah No : 1955/C4/Dm.01.0 2/2021, Tanggal 28 Juni 2021 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Untuk Peralatan Tik SMP tahun 2021	Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Untuk Peralatan Tik Smp Tahun 2021	SMP Muhammadiyah 28 Paciran SMP Diponegoro SMPN 1 Bluluk SMPN 1 Sarirejo SMPN 1 Sukorame SMP Tashwirul Afkar SMP Muhammadiyah 17 Laren SMP Muhammadiyah 2 Lamongan SMP Muhammadiyah 20 Solokuro SMP Ma'Arif 6 Brondong SMP Ma'Arif 7 Pucuk SMP Simanjaya Sekaran SMP Sunan Drajat Sugio SMP PGRI Kembangbahu SMP Muhammadiyah 6 Pucuk SMP Murni Sunan Drajat Lamongan SMPNahdlatul Ulama Karanggeneng SMP Muhammadiyah 24 Sambeng SMP Al Akbar Brondong SMPN 1 Glagah SMP Muhammadiyah 26 Babat SMP Jadid Ar Rohman SMP NU Sabilunnaja SMPS Plus Al Barokah Babat SMPS Islam Terpadu Assalafiyah SMP Nahdlotul Ulama Laren	Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan	2.297.125.000,-	2.297.125.000,-	100 %	Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah Untuk Peralatan Tik Smp Tahun 2021	100%	

BAB III



2	KEMENDI KBUDRIST EK	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar	SDN Baturono Kec. Sukodadi	Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan	2.420.548.000,00	2.420.548.000,00	100%	Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar	100%
				SDN Tambakrigadung 2 Kec. Tikung						
				SDN Kebonagung Kec. Babat						
				SDN Dermolemahang Kec. Sarirejo						
				SDN 1 Glagah Kec. Glagah						
				SDN Watewinangun 1 Kec. Sambeng						
				SD Muhammadiyah Kec. Lamongan						
				SD Muhammadiyah 1 Kec. Pucuk						
				SD Muhammadiyah Plus Kec. Maduran						
				SDN 3 Sendangharjo Kec. Brondong						
				SDN Tunjungmekar Kec. Kalitengah						
				SDN Kendalkemlagi Kec. Karanggeneng						
				SDN Sumengko Kec. Kedungpring						
				SDN Sidomukti Kec. Kembangbahu						
				SDN Tamanprijek Kec. Laren						
				SDN Rumpuk Kec. Mantup						
				SDN 1 Kedungwaras Kec. Modo						
				SDN 1 Pamotan Kec. Sambeng						
				SDN Banggle Kec. Sukorame						
				SDN Karangwedoro Kec. Turi						
				SDN 2 Soko Kec. Tikung						
				SDN Bulumargi Kec. Babat						
				SDN Gedangan Kec. Sukodadi						
				SDN 1 Rancangkencono Kec. Lamongan						
				SDN Mendogo Kec. Glagah						
				SDN Ngambeg Kec. Pucuk						

b. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.2  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan an Penugas an (TP)	Program,Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lok asi	SKPD Pelaksan a TP	Tahap	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kemensos	Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab . La mo nga n	Dinsos Kab. Lamonga n	Tahap 1	30,899,875,000	30,890,025,000	100%	30,890,025,000	100%
			Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			Tahap 2	30,917,225,000	30,905,675.000	100%	30,905,675.000	100%
			Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga			Tahap 3	30,127,475,000	30,099,050,000	100%	30,099,050,000	100%
			Keluaran(Output): terlaksananya bantuan uang non tunai pada komponen KPM PKH di Kab.Lamongan			Tahap 4	32,587,350,000	31,883,125,000	100%	31,883,125,000	100%
			Rincian Kegiatan: pemberian bantuan uang non tunai ke KPM PKH								
2	Kemensos	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehata n Nasional (JKN)	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab . La mo nga n	Dinsos Kab. Lamonga n	APBN	27.573.570.000	27.573.570.000	100%	27.573.570.000	100%
			Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota								
			Sub Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota								

BAB III





			Keluaran(Output): terlaksananya pendataan JKN Kab.Lamongan								
			Rincian Kegiatan: melakukan verval JKN								
3	Kemensos	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat	Program: Penanganan Bencana  Kegiatan: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota  Sub Kegiatan: Penyediaan permakanaan  Keluaran(Output): terlaksananya pemberian bantuan beras pada korban bencana di Kab. Lamongan  Rincian Kegiatan: pemberian bantuan beras pada korban bencana	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan		1.062.318.774	1.062.318.774	100%	1.062.318.774	100%
4	Kemensos	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial  Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota  Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat  Keluaran(Output): terlaksananya pemberian bantuan sembako bagi masyarakat miskin di Kab.Lamongan  Rincian Kegiatan: pemberian sembako	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan	JANUARI 2021	16,356,400,000	16,217,400,000	100%	16,217,400,000	100%
						FEBRUARI 2021	16,352,200,000	16,239,400,000	100%	16,239,400,000	100%
						MARET & APRIL 2021	25,046,400,000	23,931,200,000	100%	23,931,200,000	100%
						MEI & JUNI 2021	25,423,200,000	24,860,000,000	100%	24,860,000,000	100%
						JULI, AGUSTUS & Sep-21	42,633,200,000	40,200,000,000	100%	40,200,000,000	100%
						OKTOBER	42,633,200,000	40,200,000,000	100%	40,200,000,000	100%
						NOPEMBER & DESEMBER	42,633,200,000	40,200,000,000	100%	40,200,000,000	100%

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.4  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan (Dana Desa 2021)

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi  2. Kementrian Keuangan  3. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan	1. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik	Program Dana Desa  Bantuan Keuangan Dana Desa  Tahap Pencairan:  Tahap 1	Kab. Lamongan	Dinas PMD	Rp. 367.859.016.000,-	Rp. 367.859.016.000,-	100 %	          Rp. 150.216.570.400,00	40%	

BAB III



	indonesia No. 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa	Tahap 2					Rp. 147.143.606.400,00	40%	
	3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021	Tahap 3					Rp. 70.498.839.200,00	20%	
		TOTAL					Rp. 367.859.016.000,00	100%	

d. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan  
Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.5  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Capaian Kegiatan (%)	Keterangan
	Perkebunan	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 No SP DIPA-018.05.1.238830/2021 tanggal 23 November 2021	Rawat Ratoon	Lamongan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	600 ha: NPK non subsidi 500 kg/ha POC 15 liter/ha HOK 22 orang/ ha	600 ha: NPK non subsidi 500 kg/ha POC 15 liter/ha HOK 22 orang/ ha	100%	
			Bongkar Ratoon			80 Ha: NPK non subsidi 500 kg/ha POC 15 liter/ha Herbisida 5 liter/ha HOK 25 orang/ha	80 Ha: NPK non subsidi 500 kg/ha POC 15 liter/ha Herbisida 5 liter/ha HOK 25 orang/ha	100%	
			Kebun Bibit Datar			Upah penyiapan lahan 50 HOK/ ha 60.000 benih tebu/ ha Upah penanaman 25 HOK/ ha Insentif penggunaan lahan Rp 5.000.000/ ha Pupuk majemuk 400 kag/ha POC 15 liter/ha Pestisida 4 liter/ha Pemupukan 30 HOK/ha Penyiangan 20 HOK/ha Pengendalian hama penyakit 10 HOK/ha Penyiraman 20 HOK/ha Penyulaman 20 HOK/ha	Upah penyiapan lahan 50 HOK/ ha 60.000 benih tebu/ ha Upah penanaman 25 HOK/ ha Insentif penggunaan lahan Rp 5.000.000/ ha Pupuk majemuk 400 kag/ha POC 15 liter/ha Pestisida 4 liter/ha Pemupukan 30 HOK/ha Penyiangan 20 HOK/ha Pengendalian hama penyakit 10 HOK/ha Penyiraman 20 HOK/ha Penyulaman 20 HOK/ha	100%	

BAB III



						Tebang 57 HOK/ha Ikat dan pasang lebel 15 HOK/ha Muat benih 25 HOK/ ha Bongkar benih 15 HOK/ha	Tebang 57 HOK/ha Ikat dan pasang lebel 15 HOK/ha Muat benih 25 HOK/ ha Bongkar benih 15 HOK/ha		
	Tanaman Pangan	Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/627/KPTS/013/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 No SP DIPA - 018.03.4.059178/2021, Revisi ke 10 ( 4 Oktober 2021)	Kegiatan Optimalisasi Indeks Pertanaman			5000 kg benih padi	5000 kg benih padi	100%	
			Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			Padi inbrida 435.625 kg Padi hibrida 3.750 kg jagung hibrida 18.000 kg jagung hibrida abt 70.050 kg jagung hibrida abt 2 103.245 kg jagung limpahan 4.875 kg jagung P35 15.000 kg Jagug B89 30.000 kg Jagung Betras (LMDH) 48.585 kg Sorgum 2000 kg	Padi inbrida 435.625 kg Padi hibrida 3.750 kg jagung hibrida 18.000 kg jagung hibrida abt 70.050 kg jagung hibrida abt 2 103.245 kg jagung limpahan 4.875 kg jagung P35 15.000 kg Jagug B89 30.000 kg Jagung Betras (LMDH) 48.585 kg Sorgum 2000 kg	100%	
	AKABI	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.03.4.059178/2021	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	Lamongan		7.500 kg benih kacang hijau  1.500 kg benih kacang tanah 66.000 kg benih kedelai 22.000 bibit porang	7.500 kg benih kacang hijau  1.500 kg benih kacang tanah 66.000 kg benih kedelai 22.000 bibit porang	100%	

e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.6  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET .
1	Badan Kependud	Perjanjian Kerjasama	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA								

BAB III



ukan dan Keluarga Berencana Nasional	Antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor: 558/HK.101/J.1 /2021	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA								
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Lamongan	Dinas PPKB	165.322.000	113.970.400	68,94%	27 Balai Penyuluha n KB	100 %	
		Keluaran :								
		Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dukungan Media KIE								
		Rincian Kegiatan :								
		Pembuatan Video								
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Lamongan	Dinas PPKB	2.005.525.000	1.659.398.214	82,74%	27 Balai Penyuluha n KB	88,28 %	
		Keluaran :								
		Jumlah Peserta Orientasi Tenaga Lini Lapangan, Pembinaan Kader IMP, dan Penyuluhan KB								
		Rincian Kegiatan :								
		Sosialisasi orientasi tenaga lini lapangan, pembinaan kader IMP serta penyuluhan KB								
		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)								
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Lamongan	Dinas PPKB	2.301.394.400	2.301.393.756	100,00 %	4192 PPKBD/S ub PPKBD; 4752 PPKBD/S ubPPKBD	100 %	
		Keluaran :								
		Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Melaksanakan Penyuluhan; Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat Pembinaan dalam pelaksanaan program KKBPK								
		Rincian Kegiatan :								
		Penggerakan Kader Intitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								
		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejarinya	Lamongan	Dinas PPKB	140.458.000	131.432.350	93,57%	59 Faskes Pelayanan KB	100%	
		Keluaran :								
		Jumlah Faskes KB yang menerima Alkon								
		Rincian Kegiatan :								
		Faskes Pelayanan KB								

BAB III



			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Lamongan	Dinas PPKB	2.164.983.000	1.626.753.256	75,14%			
			Keluaran :								
			Jumlah Akseptor Implant yang terlayani, Jumlah Akseptor IUD yang terlayani, dan Jumlah Akseptor MOP yang terlayani								
			Rincian Kegiatan :								
			Pelayanan Medis								
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik)	Lamongan	Dinas PPKB	1.184.500.000	1.149.449.560	97,04%	Rehab 4 Balai, 18 Unit Sepeda Motor, 1 Paket Sarpras Gudang Alokon dan 9 Obgyn Bed	100%	
			Keluaran :								
			Jumlah Gedung Kantor dan Fasilitas Pendukung yang direhab; Jumlah Kendaraan Roda Dua Pengantar Akseptor yang tersedia dengan baik, Jumlah sarana dan prasarana gudang Alokon yang diadakan; Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan KB yang tersedia								
			Rincian Kegiatan :								
			Rehab Balai Penyuluhan KB, Pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Pengantar Akseptor, Pengadaan Sarana Prasarana Gudang Alokon dan Sarana Prasarana Pelayanan KB								
			PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB								
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Lamongan	Dinas PPKB	1.385.095.600	361.988.650	26,13%			
			Keluaran :								
			Jumlah Peserta Kegiatan Tribina; Jumlah Peserta Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lapangan di Kampung KB; Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB								
			Rincian Kegiatan :								
			Kegiatan Pertemuan di Kampung KB								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								

BAB III



			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA								
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Lamongan	Dinas PPKB	280.000.000	279.895.000	99,96%	10 Desa	100%	
			Keluaran :								
			Jumlah sarana Media Lini Lapangan Bina Keluarga yang diadakan; Jumlah sarana Media Lini Lapangan Kit Siap Nikah Anti Stunting yang diadakan								
			Rincian Kegiatan :								
			Pengadaan BKB Kit Stunting dan Kit Siap Nikah Anti Stunting								
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lamongan	Dinas PPKB	614.537.000	613.236.750	99,79%	2266 Peserta; 1890 Peserta	100%	
			Keluaran :								
			Jumlah Peserta Pembinaan Stunting; Jumlah Peserta Yang Mendapat Pembinaan Pemahaman Kespro Bagi Calo Pengantin								
			Rincian Kegiatan :								
			Pembinaan Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Pembinaan Stunting dan Pembinaan Pemahaman Kespro Catin)								

f. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.7  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten  
Lamongan

NO.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Loka si	SKPD Pelaksana TP	Alok asi Angga ran	Realis asi Angga ran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ke t.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

BAB III



1	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Jakarta	DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-018.11.3.05944 tanggal 19 April 2021	<b>Program :</b> Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat <b>Kegiatan :</b> Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ( <i>Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA</i> ) <b>Output :</b> Jumlah desa yang dianalisis FSVA adalah sebanyak 474 Desa/Kelurahan Jumlah aspek yang digunakan dalam analisa FSVA sebanyak 3 Aspek <b>Rincian Kegiatan :</b> Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ( <i>Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA</i> )	Kab. Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan	Rp. 28.460.000,-	Rp. 28.260.000,-	99,3 %	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah desa yang dianalisis FSVA adalah sebanyak 474 Desa/Kelurahan</li><li>Jumlah aspek yang digunakan dalam analisa FSVA sebanyak 3 Aspek</li><li>Hasil analisis FSVA 2021 menunjukkan bahwa desa rentan rawan pangan Prioritas 1-2 sebanyak 49 Desa dari 474 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 2 desa</li></ul>	100 %
---	---	--	--	---------------	------------------------	------------------	------------------	--------	---	-------

g. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.8  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	KAB/KOTA	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	Bidang Sumber Daya Air	Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor : PHD-058/IPDMIP/PK/2018 untuk Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program- IPDMIP (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Parsipatif Terpadu)	<p>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</p> <p>Keluaran (output) Jumlah kegiatan pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif secara terpadu</p> <p>Rincian Kegiatan IPDMIP :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa</li><li>Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A dan IP3A.</li><li>Pemeliharaan Pintu Air 15 Daerah Irigasi</li></ul>	Kab. Lamongan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Rp. 48.000.000.000,-	Rp. 41.850.864.123,-	87,19	Tewujudnya kegiatan fasilitasi OP dan Perencanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi (RP2I)	100	

BAB III



	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengadaan Fasilitas Operasi dan Pemeliharaan 15 Daerah Irigasi</li><li>▪ Rehabilitasi Bangunan Intake dan Spillway 15 Daerah Irigasi</li><li>▪ Rehabilitasi Rumah Pintu Intake 15 Daerah Irigasi</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi PA. Karanggeneng</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bulu</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Suis Keyongan</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Bowo</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Canggih</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Delikguno</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Jajong</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Makam Santri</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Maduran</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Takeran</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Tuwiri</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Karangturi)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Mluwur)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi PA. Karanggeneng (Rehabilitasi Saluran Sekunder Mertani)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi PA. Karanggeneng (Rehabilitasi Saluran Sekunder Pangangsalan)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bulu (Rehabilitasi Saluran Sekunder Bulutengger)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bulu (Rehabilitasi Saluran Sekunder Siman)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon (Rehabilitasi Saluran Sekunder Madulegi)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon (Rehabilitasi Saluran Sekunder Pajangan)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Sluis Keyongan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Keyongan)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Sluis Keyongan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tritunggal)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Bowo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Sambungrejo)</li></ul>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III





		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Bowo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Sumberagung)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling (Rehabilitasi Saluran Sekunder Kedungbanjar)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling (Rehabilitasi Saluran Sekunder Sidorejo)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Canggah (Rehabilitasi Saluran Sekunder Canggah)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Canggah (Rehabilitasi Saluran Sekunder Pandanpancur)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Delikguno (Rehabilitasi Saluran Sekunder Jatierejo)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Delikguno (Rehabilitasi Saluran Sekunder Pengumbulanadi)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Jajong (Rehabilitasi Saluran Sekunder Bulubrangsi)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Jajong (Rehabilitasi Saluran Sekunder Godog)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Maduran (Rehabilitasi Saluran Sekunder Jangkungsumo)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Maduran (Rehabilitasi Saluran Sekunder Maduran)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Makamsantri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Karangtawar)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Makamsantri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tamanprijeg)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Mayong)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tanjungmekar)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Takeran (Rehabilitasi Saluran Sekunder Takeran)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Tuwiri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Deket Kulon)</li><li>▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Tuwiri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tambakboyo)</li></ul>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III



h. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya  
Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.9  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman  
dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

No	Bidang urusan	Dasar pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab / Kota	SKPD pelaksana TP	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	(%)	Realisasi capaian kegiatan	(%)	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya No. 174/KPTS/DC/2020, Tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021 Tahap I	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1. Rumpuk, Kec. Mantup 2. Sambangrejo, Kec. Modo 3. Mojorejo, Kec. Modo 4. Pataan, Kec. Sambeng 5. Jabung, Kec. Laren 6. Sumberagung, Kec. Brondong 7. Selorejo, Kec. Sambeng 8. Sidobinangun, Kec. Deket 9. Rejotengah, Kec. Deket 10. Banjarejo, Kec. Karangbinangun 11. Tejoasri, Kec. Laren 12. Dinoyo, Kec. Deket	Lamongan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.940.000.000	2.940.000.000	100%	100%	100%	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya No. 29/KPTS/DC/2021, Tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2021 Tahap I	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan 1. PP Al Ikhlas, Desa/Kel. Gendongkulon, Kec. Babat 2. PP Raudlatul Muta'allimin , Desa/Kel. Moropelang, Kec. Babat 3. PP Mazroatul Fattah Al Maliky, Desa/Kel. Siman, Kec. Sekaran 4. PP Al Fattah 3, Desa/Kel. Siman, Kec. Sekaran 5. PP Tanwirul Qulub, Desa/Kel. Sungelebak, Kec. Karanggeneng 6. SPMMAA, Desa/Kel. Turi, Kec. Turi 7. PP Bustanul Muta'allimin, Desa/Kel. Nguwok , Kec. Modo 8. PP Thoriqussalam, Desa/Kel. Lamongrejo, Kec. Ngimbang 9. PP Maulana Ishaq, Desa/Kel. Kemantren, Kec. Paciran 10. PP Darul Jannah Al-Ma'wa, Desa/Kel. Tunggul, Kec. Paciran 11. PP Darul Islam, Desa/Kel. SIDOMUKTI, Kec. Brondong 12. PPTQ Karangsawo, Desa/Kel. Sekeret, Kec. Paciran 13. PP An-Nuur Muhammadiyah, Desa/Kel. Karanggeneng, Kec. Karanggeneng 14. PP Al Muslimun, Desa/Kel. Kawistolegi, Kec. Karanggeneng 15. PP Al Bashor, Desa/Kel. Sidokumpul, Kec. Sambeng 16. PP Al Amin, Desa/Kel. Tunggul, Kec. Paciran 17. PP Bustanul Thullab, Desa/Kel. Siwalanrejo, Kec. Lamongan 18. PP Tanfirul Ghoyyi, Desa/Kel. Sukorejo, Kec. Lamongan 19. PP Al Falahiyah, Desa/Kel. Pomahanjangan, Kec. Turi 20. PP Al-Muttaqin, Desa/Kel. Bakalanpule, Kec. Tikung 21. PP Baitussalam, Desa/Kel. Bluluk, Kec. Bluluk 22. PP Darul Maarif, Desa/Kel. Payaman, Kec. Solokuro 23. PP Al Kautsar, Desa/Kel. Le Manyar, Kec. Sekaran 24. PP Tarbiyatut Tholabah, Desa/Kel. Kranji, Kec. Paciran 25. PP Al Balagh, Desa/Kel. Bulutigo, Kec. Laren 26. PP Baitul Qur'an Lamongan, Desa/Kel. Gembong, Kec. Babat	Lamongan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.200.000.000	5.200.000.000	100%	100%	100%	



i. Dinas PU. Bina Marga

Tabel 3.1.2.10  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pu. Bina Marga Kabupaten  
Lamongan

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020, Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah 3. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021	Program Penyelenggaraan Jalan  Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota  - <b>Keluaran (Output)</b> : CBC 5500 m  <b>Rincian Kegiatan</b> : Peningkatan Jalan Ruas Tikung - Sumberkerep  - <b>Keluaran (Output)</b> : CBC 1000m  <b>Rincian Kegiatan</b> : Peningkatan Jalan Ruas Karangkemban g – Gendongkulon  - <b>Keluaran (Output)</b> : CBC 1183 m dan Sheet Pile 234,5 m <b>Rincian Kegiatan</b> : Peningkatan Jalan Ruas Tunjungmekar - Sambopenggir	   Kecamatan Tikung, Kecamatan Mantup      Kecamatan Babat      Kecamatan Karangbinan gun, Kecamatan Kalitengah	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	   19.764.000.000      3.500.000.000      5.490.000.000	   12.008.150.000      2.005.830.000      4.376.662.000	   60,76      57,31      79,72	   CBC 5500 M      CBC 1000 M      CBC 1183 M   Sheet Pile 234,5 M	   100%      100%      100%   100%	

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN  
OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota

3.2.1. Target Kinerja

a. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1) Bidang Rehabilitasi Sosial

Kegiatan penyandang disabilitas sumber dana APB Prop. Pada



kegiatan Bantuan Sosial untuk Disabilitas diluar panti Dinas Sosial Prov. Jatim Dengan alokasi sebesar Rp. 631.800.000,- terealisasi Rp. 631.800.000,- atau 100% dengan sasaran 706 orang cacat berat tersebar di 27 Kec.

2) Bidang Pemberdayaan Sosial

Kegiatan TKSK, bantuan pada operasionalnya TKSK sebanyak 27 orang dengan Dana Dekon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.000.000,- terealisasi sebesar Rp.81.000.000,- atau 100%.

**b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan**

Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD Provinsi pada tahun 2021 dipergunakan untuk Program Pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa. Program pemberdayaan BUMDesa merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 utamanya pada sektor Pariwisata Desa, sebagai sebuah unit pengelola usaha BUMDesa diharapkan mampu mengangkat sektor perekonomian desa sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli desa. Sementara itu Desa Berdaya bantuan keuangan khusus yang dikhususkan bagi desa yang menyandang status desa mandiri. Program Jatim Puspa adalah Pemberdayaan Usaha Perempuan yang merupakan salah satu program refocusing dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Program Jatim Puspa difokuskan untuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemulihan dampak wabah Covid-19. Sasaran Jatim Puspa adalah perempuan yang memiliki usaha dan memiliki tingkat kesejahteraan 8-12 % terendah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Selain itu Program Jatim Puspa juga ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi mandiri sejahtera Program Keluarga Harapan (PKH). Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Desa merupakan salah satu bentuk usaha dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan dampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkatkan ketahanan sosial dan ekonominya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jatim No 20 Tahun 2021

**BAB III**



tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 412.2/277/112.3/2021 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, bantuan keuangan khusus desa kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.2.1.**  
**Target Kinerja BKK Desa Tahun 2021**  
**Kabupaten Lamongan**

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Σ KPM	BKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lamongan	Paciran	Drajat		Rp.75.000.000,00
2	Lamongan	Ngimbang	Ngimbang		Rp.75.000.000,00
3	Lamongan	Sugio	Lawanganagung		Rp.75.000.000,00
4	Lamongan	Laren	Laren		Rp.75.000.000,00
5	Lamongan	Sekaran	Kendal		Rp.75.000.000,00
6	Lamongan	Babat	Datinawong		Rp.75.000.000,00
7	Lamongan	Sugio	Sugio		Rp.100.000.000,00
8	Lamongan	Karanggeneng	Karanggeneng		Rp.100.000.000,00
9	Lamongan	Karanggeneng	Latukan		Rp.100.000.000,00
10	Lamongan	Sekaran	Bulutengger		Rp.100.000.000,00
11	Lamongan	Sekaran	Sekaran		Rp.100.000.000,00
12	Lamongan	Paciran	Paciran		Rp.100.000.000,00
13	Lamongan	Paciran	Tunggul		Rp.100.000.000,00
14	Lamongan	Paciran	Kranji		Rp.100.000.000,00
15	Lamongan	Paciran	Banjarwati		Rp.100.000.000,00
16	Lamongan	Brondong	Sedayu Lawas		Rp.100.000.000,00
17	Lamongan	Kembangbahu	Pelang	10	Rp. 33.750.000,00
18	Lamongan	Kedumgpring	Dradahblumbang	20	Rp.60.000.000,00
19	Lamongan	Babat	Karangkembang	10	Rp. 33.750.000,00
20	Lamongan	Babat	Moropelang	26	Rp.78.250.000,00
21	Lamongan	Babat	Kebonagung	11	Rp. 36.375.000,00
22	Lamongan	Sukodadi	Sumberaji	10	Rp. 33.750.000,00
23	Lamongan	Tikung	Takeranklating	11	Rp. 36.375.000,00
24	Lamongan	Maduran	Turi	12	Rp. 39.000.000,00
25	Lamongan	Laren	Gampangsejati	12	Rp. 39.000.000,00
TOTAL					Rp. 390.250.000,00

Salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adalah melakukan percepatan pembangunan pedesaan antara lain Program Bantuan Keuangan (BK-Desa) yang dipergunakan untuk pembangunan sarana fisik. Dalam rangka penyaluran Program Bantuan Keuangan (BK-Desa) pada tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB III



Tabel 3.1.2.  
Target Kinerja BK-Desa Tahun 2021  
Kabupaten Lamongan

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	BKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Lamongan	Kalitengah	Kediren	Rp. 200.000.000,00

c. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan  
Kabupaten Lamongan

Tugas pembantuan provinsi yang didapat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah:

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaaan, dan Pembangunan Embung Pertanian.

Target kinerja tugas pembantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaaan, dan Pembangunan Embung Pertanian adalah:

- a. Pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak 46 paket
- b. Pembangunan irigasi perpompaaan menengah sebanyak 1 paket
- c. Pembangunan dam parit sebanyak 6 paket, dan
- d. Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 5 paket

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pembantuan dengan realisasi kinerja 100% atau telah terlaksana seluruhnya.

d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

- Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri)

Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 2.894.625.000,00. Target bantuan anggaran digunakan untuk Dana Operasional petugas IB guna mendukung percepatan peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau.

- Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi

Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur atau APBD I dengan alokasi anggaran total

- sebesar Rp. 5.900.000,00. Target bantuan anggaran digunakan untuk Pembuatan SKKH, Pengambilan sampel feses & Pengujian sampel feses.
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.430.000,00. Target bantuan anggaran digunakan untuk bantuan irigasi perpompaan
  - Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Pengawasan, Pemasukan, dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah
- Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur atau APBD I dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 7.600.000,00. Target bantuan anggaran digunakan untuk Pembuatan SKKPH,Pembinaan Pemotongan Hewan & Pemeriksaan AMPM

e. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Target kinerja yang sudah ditetapkan melalui kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat & Lintas sektor Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat. adalah 10 Ponkestren, 100 bumil KEK, 100 bumil risti, 7728 KK. Dengan alokasi anggaran Rp. 909.155.500,-.

3.2.2. Realisasi

a. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.1  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program,Kegiatan,Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Tahap	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Bidang Pemberda yaan Sosial	Permensos Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Program: Pemberdayaan Sosial Kegiatan: TKS Keluaran(Output): terlaksananya operasional TKS di Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan		81.000.000	81.000.000	100%	81.000.000	100%	

BAB III



			Rincian Kegiatan: pemberian operasional pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Tenaga Kecamatan (TKSK)									
2	Bidang Rehabilitasi Sosial	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/151/KITS/013/2021 tentang Penerima Bantuan Sosial	Program: Rehabilitas Sosial	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan	Tahap 1	162.900.000	160.200.000	100%	160.200.000	100%	
			Kegiatan: ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Perorangan			Tahap 2	159.300.000	158.400.000		158.400.000		
			Keluaran(Output): terlaksananya bantuan pada disable berat di Kab. Lamongan			Tahap 3	156.600.000	156.600.000		156.600.000		
			Rincian Kegiatan: pemberi bantuan pada disable berat			Tahap 4	156.600.000	156.600.000		156.600.000		
3	Kemensos	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan	APBD PROV.	880.470.000	880.470.000	100%	880.470.000	100%	
			Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			APBD	2.943.000.000	2.943.000.000	100%	2.943.000.000	100%	
			Sub Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota									
			Keluaran(Output): terlaksananya pendataan JKN Kab.Lamongan									
			Rincian Kegiatan: melakukan verval JKN									

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.3  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

No	BIDANG URS	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 412.2/277/112.3/2021 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	<b>Program BUMDesa</b> Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa  1. Bantuan Langsung Masyarakat 2. Bantuan Operasional Pemerintah Desa	Lamongan	Dinas PMD	Rp. 450.000.000,-	Rp. 450.000.000,-	100%	Rp. 432.000.000,-  Rp. 18.000.000,-  Rp. 450.000.000,-	100%	BKK Desa
			<b>Program Desa Berdaya</b> Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa 1. Bantuan Langsung Masyarakat 2. Bantuan Operasional Pemerintah Desa			Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	100%	Rp. 920.000.000,00  Rp. 80.000.000,00  Rp. 1.000.000.000,00	100%	

BAB III





3			Program Jatim PUSPA Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa 1. Bantuan Langsung Masyarakat 2. Bantuan Operasional Pemerintah Desa 3. Honor Pendamping			Rp. 390.250.000,00	Rp. 390.250.000,00	100 %	Rp. 305.000.000,00  Rp. 70.000.000,00  Rp. 15.250.000,00 Rp. 390.250.000,00	100%	
4	1.	Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/7409/11 2/2/2021 Tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (BK-Desa) Dari Oemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021	Program Bantuan Keuangan Desa (BK-Desa) Pembangunan Renov Gapura			Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	100 %	Rp. 200.000.000,00	100%	BK-Desa

c. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan  
Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.4  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Capaian Kegiatan (%)	Keterangan
		<p>Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/627/KPTS/013/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021</p> <p>Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur No.821.29/109/110/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021</p> <p>Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi Jawa Timur No. 932/773/110.2/2021 tanggal 27 januari 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat</p>	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, irigasi Perpompaan Menengah, dan Pembangunan Embung Pertanian	Lamongan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan	46 paket jaringan irigasi tersier  1 paket perpompaan menengah 6 paket dam parit  5 paket jalan usaha tani	46 paket jaringan irigasi tersier  1 paket perpompaan menengah 6 paket dam parit 5 paket jalan usaha tani	100%	

BAB III



		Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara Pengeluaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Tugas Pembantuan Provinsi di Kabupaten Kota Kegiatan APBN Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2021								
		Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 No SP DIPA-018.08.4.059185/2021 tanggal 23 November 2021								

d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.5

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	KAB/KOTA	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket .
1	Bidang Pertanian	Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/9001/122.6/2021 Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0847/122.6/2021 tentang Petugas Pelaksana Inseminasi Buatan (IB) Kegiatan SIKOMANDAN Tahun 2021	Program SIKOMANDAN Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Sapi dan Kerbau Keluaran (output) Dana Operasional petugas IB Rincian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan inseminasi buatanpada ternak sapi dan kerbau	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 1.478.130.000	Rp. 1.478.130.000	100	Pemberian Dana Operasional petugas IB	100	
		Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/9002/122.6/2021 Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0848/122.6/2021 tentang Petugas Atau Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksa Kebuntingan (PKB) Kegiatan SIKOMANDAN Tahun 2021	Program SIKOMANDAN Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Sapi dan Kerbau Keluaran (output) Dana Operasional petugas PKB Rincian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebuntingan (PKB) pada ternak sapi dan kerbau	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 947.940.000	Rp. 947.940.000	100	Pemberian Dana Operasional petugas PKB	100	
		Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/9003/122.6/2021 Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0849/122.6/2021 tentang Petugas Tim Pelaksana Kegiatan Pelaporan Kelahiran Kegiatan SIKOMANDAN Tahun 2021	Program SIKOMANDAN Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Sapi dan Kerbau Keluaran (output) Dana Operasional petugas kelahiran Rincian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pelaporan kelahiran pada sapi dan kerbau	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 468.555.000	Rp. 468.555.000	100	Pemberian Dana Operasional petugas kelahiran	100	

BAB III



2	Bidang Pertanian	SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0060/122.3/2021 Tentang Perubahan Pertama Penunjukan Dokter Hewan / Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan pada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Keluaran (output) Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 700.000	Rp. 700.000	100	Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	100	
		Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/8725/122.3/2021 tentang Tim Petugas dan Alokasi Pengambilan Pengujian Sampel Feses Sapi dalam Rangka Surveillans Helminthiasis Tahun 2021	Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Keluaran (output) Laporan pengambilan dan pengujian sampel feses Rincian Kegiatan Kegiatan pengambilan dan pengujian sampel feeses penyakit helminthiasis	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 5.200.000	Rp. 5.200.000	100	Pelaporan pengujian sampel fess di Kabupaten Lamongan	100	
3.	Bidang Pertanian	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 nomor DIPA : SP Dipa.018 08.4.059186/2021 tanggal 23 November 2020	Program ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Keluaran (output) Terbangunnya Irigasi Perpompaan Rincian Kegiatan Penyediaan Irigasi Perpompaan	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 242.430.000,00	Rp. 240.130.951,0 0	100	Laporan penyakit hewan menular yang terjadi di Kabupaten Lamongan	100	
4.	Bidang Pertanian	SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/9641/122.4/2021 Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tentang Penunjukan Pemeriksa Kesehatan Produk Asal Hewan Di Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (Sertifikat Veteriner) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Pengawasan, Pemasukan, dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Keluaran (output) Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Produk asal Hewan	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 200.000	Rp. 200.000	100	Pemberian Surat SKKPH	100	

BAB III



177 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021

Pemerintah Kabupaten Lamongan

		Surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 524.3/2809/122.4/2021 Tanggal 5 April 2021 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemotongan Hewan Di RPH-R Tahun 2021	Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Pengawasan, Pemasukan, dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Keluaran (output) Petugas Pemotongan Hewan yang ASUH Rincian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Hewan di RPH-R	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 2.600.000	Rp. 0,00	0	Laporan Pembinaan Petugas Pemotongan Hewan	42, 3	
		SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0594/122.4/2021 Tanggal 20 Januari 2021 Tentang Petugas Pemeriksa AMPM Dan Status Reproduksi Di RPH-R Tahun 2021	Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Pengawasan, Pemasukan, dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Keluaran (output) Laporan <i>Ante Mortem &amp; Post Mortem</i> Rincian Kegiatan Pemeriksaan Ante Mortem & Post Mortem di RPH-R	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 2.400.000,00	Rp. 2.400.000,00	100	Laporan Pemeriksaan Ante Mortem & Post Mortem di RPH-R	100	
		SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/0593/122.4/2021 Tanggal 20 Januari 2021 Tentang Petugas Pelapor Data Pemotongan Ternak Di RPH Melalui SMS Gateway Tahun 2021	Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Pengawasan, Pemasukan, dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Keluaran (output) Laporan Pemotongan Ternak di RPH Rincian Kegiatan Pelaporan Data Pemotongan Ternak di RPH melalui SMS Gateway	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	100	Laporan Pemotongan Ternak di RPH	100	

e. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.6  
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

NO	BIDAN G URUSA N	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALIS ASI CAPAIA N KEGIAT AN	(%)	K E T
1	Bidang Kesehat an	1.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024; 2.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021; 5.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur; 6.Peraturan Gubernur Jaa Timur Nomor 86 Tahun	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat & Lintas sektor Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan: Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat.	Lamongan	DINAS KESEHATAN Kab. Lamongan	Rp. 909.155.500	Rp. 582.065.300	64,02%	Pendam pingan 10 Ponkest ren.  Pendam pingan Kader 100 bumil KEK, 100 bumil risti, 7728 KK.	100%  100%	

BAB III



		2020 Penjabaran Tahun Anggaran 2021.	tentang APBD								
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

a. Dinas Pedidikan Kabupaten Lamongan

Permasalahan

- Dasar pengambilan kebijakan Program Pemberian Bantuan Peralatan TIK oleh Kemendikbudristek adalah data profil lembaga pada dapodik, sehingga belum semua lembaga melakukan input dapodik sesuai kondisi riil di lembaga masing-masing.
- Belum semua lembaga melakukan updating data sarpras pada dapodik sesuai kondisi riil yang ada di masing-masing lembaga.
- Dalam penetapan lembaga calon penerima, Pemerintah Pusat tidak koordinasi dengan daerah

Kendala

- Belum semua operator dapodik memahami akan pentingnya update data sarpras lembaga pada dapodik.
- Karena masih memprioritaskan data peserta didik dan pendidiknya.

b. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan:

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH); Tidak ada kendala.
- Kegiatan PBI-JKN;

Kendala masih adanya data yang kurang valid (NIK tidak valid) dengan data Disdukpencahil dikarenakan masyarakat yang belum paham tentang kevalidan data dengan Disdukpencahil meski sudah dilakukan verval PBI-JKN.

- Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah; Tidak ada kendala.
- Bantuan Sembako; Tidak ada kendala.
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan;

Kendalanya adalah masih adanya warga yang tidak ingin menunjukkan anaknya atau keluarganya yang mengalami cacat berat. Hal ini terbukti dengan tidak dimasukkannya di Kartu Keluarga sehingga tidak memiliki KTP.

- TKSK; Tidak ada kendala.

**c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan**  
**Permasalahan dan Kendala Tugas Pembantuan Pusat**

- Pemotongan Dana Desa akibat wabah covid 19
- Dalam penyaluran bantuan keuangan dana desa terdapat kendala dalam hal persyaratan penyaluran yang terlambat oleh beberapa desa

**Permasalahan dan Kendala Tugas Pembantuan Provinsi**

- Secara keseluruhan Desa penerima BKK Desa sudah melaksanakan kegiatan sesuai Pedum dan PTO, adapun kendala disebabkan kurang komunikasi dan koordinasi terkait BLT Dana Desa maupun program pengentasan kemiskinan ekstrem lainnya.

**d. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kab. Lamongan**  
**Permasalahan dan Kendala**

- Adanya pengaruh iklim yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi
- Keterbatasan pengetahuan dan minimnya sosialisasi bantuan pada kelompok sehingga beberapa kelompok penerima bantuan belum siap dan mengundurkan diri.

**e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan**

Dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK ini, terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan seperti :

- Pembatasan pelaksanaan sosialisasi dikarenakan adanya pandemi covid-19.
- Jumlah PLKB/PKB tidak seimbang dengan jumlah desa di kabupaten Lamongan sebanyak 474 Desa, sehingga rata-rata PLKB/PKB membina desa dengan perbandingan 1:6.
- Masih adanya perkawinan pertama di bawah usia 20 tahun.
- Masih tingginya angka Unmeetneed
- Tingkat ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang lumayan tinggi.

**BAB III**



**f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan**

- 1) Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri) :
  - Ketersediaan BOP lebih kecil dari Target dan target akseptor melebihi jumlah populasi betina dewasa
  - Dikarenakan ada pandemi covid19 kegiatan PKB yang seharusnya secara tim jadi terkendala
- 2) Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
  - Masyarakat kurang memahami prosedur dan syarat yang harus dilengkapi pada saat pengiriman hewan antar provinsi
  - Masyarakat masih takut untuk memberikan sampel feses ternak kepada petugas puskesmas untuk diperiksa
- 3) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
  - Salah satu calon kelompok penerima belum masuk di e proposal sehingga pekerjaan SID dan Konstruksi belum bisa dilakukan. Kurangnya tenaga pelapor terhadap penyakit hewan menular.
  - Kelompok kesulitan mencari beberapa komponen barang yang sesuai dengan RAB dan RUKK.
- 4) Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Pengawasan, Pemasukan, dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah
  - Masyarakat kurang memahami persyaratan dan alur pengiriman produk melalui karantina Hewan
  - Refocusing Anggaran APBD Provinsi Jawa Timur.

**g. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan**

Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan seperti :

- Aspek Ketersediaan Pangan : Luas Lahan Pertanian (sawah) yang mengalami penurunan
- Aspek Ketersediaan Pangan : Keterbatasan sarana penyediaan pangan
- Aspek Akses Pangan : Daya beli terbatas karena kemiskinan
- Aspek Infrastruktur : Terbatasnya akses terhadap air bersih
- Aspek Kesehatan dan Gizi : Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata

**BAB III**

**h. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan**

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian, sebagai berikut :

Pada kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Pelaksanaan konstruksi fisik tidak sesuai jadwal (*time schedule*) yang disebabkan cuaca yang cukup ekstrim dikarenakan adanya fenomena anomali cuaca, dengan ditandai munculnya fenomena la nina yang dapat memicu peningkatan curah hujan hingga 20 sampai 70 persen.

**i. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan**

- **PAMSIMAS**

Dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS selama tahun anggaran 2021 tidak terdapat permasalahan.

- **Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan**

Dalam pelaksanaan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan selama tahun anggaran 2021 tidak terdapat permasalahan.

**j. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan**

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut :

- Kegiatan belum berjalan maksimal karena ada PPKM darurat dan refocusing anggaran dan kegiatan hari buka posyandu ditunda untuk sementara waktu

**3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT****a. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan****Saran**

Dalam penetapan lembaga calon penerima bantuan hendaknya Pemerintah Pusat koordinasi dengan Kabupaten/Kota masing-masing.

**BAB III**



**Tindak Lanjut**

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendikbudristek) untuk pelaksanaan penerimaan bantuan, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan

**b. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

Saran dan tindak lanjut :

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH); Tidak ada kendala.
- Kegiatan PBI-JKN;

Untuk itu upaya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yaitu kerjasama dengan Operator Desa untuk membantu kecocokan NIK masyarakat dengan Disdukpencahil.

- Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah; Tidak ada kendala.
- Bantuan Sembako; Tidak ada kendala.
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan;

Untuk itu upaya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan perlu memberikan sosialisasi dan motivasi pada keluarga Disabel berat tentunya kerjasama dengan Mitra Dinsos seperti Paguyupan Disabel, TKSK, PKH. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Disdukpencahil untuk pembuatan KTP bagi Warga Disabilitas untuk bisa mendapatkan bantuan sosial.

- TKSK; Tidak ada kendala.

**c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan**

- Saran dan Tindak Lanjut Tugas Pembantuan Pusat
  - Pihak desa mempercepat penyeteroran kelengkapan penyaluran yang dibutuhkan agar proses penyaluran dana desa tidak terlambat.
- Saran dan Tindak Lanjut Tugas Pembantuan Provinsi
  - Peningkatan koordinasi antar elemen, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai bantuan yang diterima.
  - Perekrutan tenaga pendamping kabupten benar – benar melalui selectif dan dilihat track record.

**BAB III**

**d. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan**

Saran dan Tindak Lanjut

- Menunggu banjir mereda dan harus membendung lokasi rehabilitasi agar pengerjaan segera dilaksanakan
- Meningkatkan pengetahuan dan wawasan kelompok melalui sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan.

**e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan**

Untuk menanggulangi permasalahan yang disebutkan di atas, perlu dilakukan beberapa tindak pencegahan seperti :

- Memaksimalkan peran teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan program.
- Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait melalui Tim Koordinasi Keluarga Berencana baik tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.
- Sosialisasi Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat dan Remaja.
- Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal, tokoh masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap program.
- Memaksimalkan peran Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi.
- Memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal.
- Memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal.

**f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan**

- 1) Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri) :
  - Tetap berusaha dan terus memotivasi petugas lapang semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ditentukan serta mengusulkan ke propinsi untuk merubah atau merevisi target tahun berikut agar lebih sesuai
- 2) Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi

**BAB III**



- Memberikan sosialisasi kepada petugas teknis kecamatan dan puskesmas terkait pengiriman hewan maupun produk asal hewan agar dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat/peternak.
- 3) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Mengganti komponen barang yang sulit didapat tersebut dengan barang lain yang memiliki fungsi yang sama dan mudah didapat, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim teknis. Selanjutnya dilakukan perubahan RUKK dan RAB menyesuaikan terhadap komponen barang yang mengalami penggantian.
- 4) Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Pengawasan, Pemasukan, dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah
- Mensosialisasikan cara pengeluaran produk asal hewan melalui karantina hewan

**g. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan**

Upaya Penyelesaian :

- Pembukaan lahan pertanian baru
- Peningkatan kapasitas produksi
- Pengembangan potensi lahan pertanian non sawah
- Mempermudah akses pangan
- Pembangunan infrastruktur dasar (air bersih)
- Penyediaan tenaga kesehatan

**h. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa saran dan tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain :

Memperpanjang waktu kontrak dan mempercepat pekerjaan konstruksi.

**i. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan selalu siap menerima tugas pembantuan demi keberlanjutan program di Kabupaten Lamongan.

**j. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

Melaksanakan pendampingan setelah PPKM darurat selama 4 bulan.

**BAB III**



**BAB IV**

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**4.1. URUSAN PENDIDIKAN**

**4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar**

SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan daerah Provinsi dan SPM pendidikan daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1. Pendidikan anak usia dini
- 2. Pendidikan dasar
- 3. Pendidikan kesetaraan

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

- 1. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini
- 2. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar
- 3. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan

**Tabel 4.1.1.**  
**Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan
1.	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Anak Usia 5 sampai dengan 6 tahun
2.	Pelayanan Pendidikan Dasar	Anak Usia 7 sampai dengan 15 tahun
3.	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	Anak Usia 7 sampai dengan 18 tahun

**4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan pendidikan dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Target Standar Palayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.2.  
Target SPM Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	
1.	Jumlah Warga Negara berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	27.544 anak
B.	Pelayanan Pendidikan Dasar	
1.	Jumlah Warga Negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	86.110 anak
C.	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	
1.	Jumlah Warga Negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	2.758 anak

4.1.3.Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Palayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.3.  
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Indikator SPM	Target	Realisasi
A.	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini		
1.	Jumlah Warga Negara berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	27.544 anak	27.544 anak

B.	Pelayanan Pendidikan Dasar		
1.	Jumlah Warga Negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	86.110 anak	86.110 anak
C.	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan		
1.	Jumlah Warga Negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	2.758 anak	2.758 anak

4.1.4.Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 147.609.241.000,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus Sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang secara keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lamongan tahun anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 32.303.600.000,00; untuk Pelayanan Pendidikan Dasar dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 113.490.979.000,00; dan untuk Pelayanan Pendidikan Kesetaraan dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 1.814.662.000,00.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.4  
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran			Total
		APBD	APBN	Sumber Lain Yang Sah	
A.	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini				
1.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Rp. 32.303.600.000,00	-	-	Rp. 32.303.600.000,00
B.	Pelayanan Pendidikan Dasar				
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Rp. 113.490.979.000,00	-	-	Rp. 113.490.979.000,00
C.	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan				
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	Rp. 1.814.662.000,00	-	-	Rp. 1.814.662.000,00
Jumlah		Rp. 147.609.241.000,00	-	-	Rp. 147.609.241.000,00

4.1.5.Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 147.491.029.000,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah). Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini terealisasi sebesar Rp. 32.187.500.000,00; untuk Pelayanan Pendidikan Dasar terealisasi sebesar Rp. 113.490.979.000,00; dan untuk Pelayanan Pendidikan Kesetaraan terealisasi sebesar Rp. 1.812.550.000.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.5  
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A.	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini			
1.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Rp. 32.303.600.000,00	Rp. 32.187.500.000,00	99.64 %
B.	Pelayanan Pendidikan Dasar			
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Rp. 113.490.979.000,00	Rp. 113.490.979.000,00	100%
C.	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan			
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	Rp. 1.814.662.000,00	Rp. 1.812.550.000,00	99.88 %
Jumlah		Rp. 147.609.241.000,00	Rp. 147.491.029.000,00	99.92 %

4.1.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan berasal dari personel Dinas Pendidikan. Adapun rincian personel pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 4.1.6**  
**Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan**

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4
4	Eselon IV.a	12
6	Pejabat Fungsional	138
7	Staf PNS	54
8	TKK	33
Jumlah		243

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh formasi jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sudah terisi. Formasi jabatan yang telah terisi secara keseluruhan tersebut sangat menunjang kinerja instansi, dimana kerangka kebijakan strategis diambil oleh Kepala Dinas/ Eselon II.b, pada tataran taktis diarahkan oleh para Kepala Bidang/ Eselon III.b dan dikoordinasikan oleh Sekretaris/ Eselon III.a, dan tataran teknis operasional dilaksanakan oleh para Kasubbag dan Kasi/ Eselon IV.a beserta semua Stafnya. Namun demikian, perlu dilakukan penambahan jumlah Staf sehingga dapat menunjang kinerja dinas pendidikan dalam tataran operasional.

**4.1.7. Permasalahan dan Solusi**

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - 1. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai standar;
  - 2. Kualitas dan kuantitas guru belum memenuhi standar;
  - 3. Belum meratanya kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
  - 4. Sebagian anak usia sekolah dari keluarga miskin belum mendapat kan bantuan beasiswa dari Program Indonesia Pintar (PIP) karena belum masuk data base DTKS di pusat;

5. Lembaga pendidikan inklusi belum bisa melayani anak berkebutuhan khusus secara optimal karena keterbatasan pendidik untuk anak berkebutuhan khusus.
- b. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  1. Pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan termasuk untuk pembelajaran yang berbasis komputer secara bertahap ;
  2. Pemenuhan kebutuhan guru melalui penambahan CPNS maupun guru P3K serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan bimbingan teknis baik secara daring maupun luring.
  3. Pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru secara bertahap;
  4. Pemberian beasiswa untuk anak – anak dari keluarga miskin;
  5. Kerja sama dengan lembaga pendidikan luar biasa terdekat.

## 4.2. URUSAN KESEHATAN

### 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM kesehatan mencakup SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

## BAB IV



12. Pelayanan kesehatan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar kesehatan bayi baru lahir
4. Balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita
5. Usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Penderita diabetes mellitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Orang terduga tuberculosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
12. Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

**Tabel 4.2.1**  
**Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita

**BAB IV**



5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Usia Produktif
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Usia Lanjut
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Penderita Diabetes Melitus
9.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Orang terduga Tuberkulosis
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Orang dengan resiko terinfeksi HIV
11.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

4.2.2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan kesehatan dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Target Standar Palayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.2  
Target SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No.	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
1.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100 %
B.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
1.	Jumlah Semua Ibu Bersalin yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1th	100 %
C.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	

1.	Jumlah Semua bayi baru lahir yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1th	
D.	Pelayanan Kesehatan Balita	
1.	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %
E.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
1.	Persentase anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100 %
F.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
1.	Jumlah warga negara usia 15-59 th yang ada di wilayah kerja kabupaten tersebut dalam kurun waktu 1th yang sama	100 %
G.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
1.	Jumlah semua penduduk berusia 60 th keatas yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	100 %
H.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
1.	Jumlah semua penduduk berusia 60 th keatas yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	100 %
I.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	
1.	Jumlah penyandang Diabetes Melitus berdasarkan angka prevalensi diabeten melitus nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	100 %
J.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	
1.	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100 %
K.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	
1.	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	100 %

BAB IV



2.	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %
L.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
1.	Presentasi estimasi penderita hipertensi berdasarkan prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	100 %
M.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	
1.	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100 %

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Palayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.3  
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Indikator SPM	Target	Realisasi
A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	93.53 %
B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
1.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	99.76 %
C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
1.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	98.60 %
D. Pelayanan Kesehatan Balita			
1.	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	94.05 %

BAB IV



E.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
1.	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	96.10 %
F.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
1.	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	92.94 %
G	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
1.	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	91.47 %
H.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		
1.	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	97.22 %
I.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis		
1.	Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	94.33 %

J.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )		
1.	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	94.99 %
K.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
1.	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	98.89 %
L.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		
1.	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	98.73 %

BAB IV



4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar 6.157.927.400,00 (enam milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh empat ratus rupiah) yang secara keseluruhan anggaran berasal dari APBD, APBN, dan Sumber Pendapaan Lain Yang Sah. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 75.954.600,00; untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 1.987.278.000,00; untuk Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 25.000.000,00; untuk Pelayanan Kesehatan Balita Rp. 61.915.600,00; untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 45.078.000,00; untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 166.322.900,00; untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut belum ada alokasi pada tahun 2021; untuk Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 166.322.900,00; untuk Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 3.051.982.100,00; untuk Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 230.006.800,00; untuk Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 166.322.900,00; dan untuk Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 181.743.600,00.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.4  
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran			Total
		APBD	APBN	Sumber Lain Yang Sah	
A.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	Rp. 75.954.600,00	Rp. 75.954.600,00

BAB IV





B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
1.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		-	Rp.1.987.278.000,00	Rp. 1.987.278.000,00
C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
1.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
D. Pelayanan Kesehatan Balita					
1.	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	Rp. 61.915.600,00	Rp. 61.915.600,00
E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
1.	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	Rp. 45.078.000,00	Rp. 45.078.000,00
F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
1.	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 166.322.900,00	-	-	Rp.166.322.900,00
G. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
1.	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	-	-

BAB IV



H.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus				
1.	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp.166.322.900,00	-	-	Rp.166.322.900,00
I.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis				
1.	Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 17.130.600,00	Rp.19.650.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rp. 2.993.471.500</li><li>• Rp. 21.730.000</li></ul>	Rp. 3.051.982.100,00
J.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )				
1.	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 42.376.800,00	-	Rp.187.630.000,00	Rp. 230.006.800,00
K.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
1.	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp.166.322.900,00	-	-	Rp.166.322.900,00
L.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				
1.	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 181.743.600,00	-	-	Rp.181.743.600,00
Jumlah		Rp. 6.157.927.400,00	-	-	Rp. 6.157.927.400,00

BAB IV



4.2.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. Rp. 4.903.891.067,00 (Empat milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah). Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terealisasi sebesar Rp. 59.763.600,00; untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin terealisasi sebesar Rp. 910.538.967,00; untuk Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terealisasi sebesar Rp. 23.046.600,00; untuk Pelayanan Kesehatan Balita terealisasi sebesar Rp. 56.935.200,00; unruk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar terealisasi sebesar Rp. 45.078.000,00; untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif teralisasi sebesar Rp. 153.322.900,00; untuk Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus terealisasi sebesar Rp. 153.322.900,00; untuk Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis terealisasi sebesar Rp. 2.974.590.900,00; untuk Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia terealisasi sebesar Rp. 230.006.800,00; untuk Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi terealisasi sebesar Rp. 153.322.900,00; untuk Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat terealisasi sebesar Rp. 143.962.300,00.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.5  
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 75.954.600,00	Rp. 59.763.600,00	78.68%
B.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
1.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp.1.987.278.000,00	Rp. 910.538.967,00	45.82%

C.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
1.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 25.000.000,00	Rp. 23.046.600,00	92.19%
D.	Pelayanan Kesehatan Balita			
1.	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 61.915.600,00	Rp. 56.935.200,00	91.96%
E.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
1.	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 45.078.000,00	Rp. 45.078.000,00	100%
F.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			
1.	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 166.322.900,00	Rp. 153.322.900,00	92.18%
G.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
1.	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	-
H.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus			
1.	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 166.322.900,00	Rp. 153.322.900,00	92.18%
I.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis			
1.	Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 3.051.982.100,00	Rp. 2.974.590.900,00	97.46%
J.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
1.	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 230.006.800,00	Rp. 230.006.800,00	100%
K	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			

BAB IV



				LPPD TA 2021
1.	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 166.322.900,00	Rp. 153.322.900,00	92.18%
L.	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</b>			
1.	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 181.743.600,00	Rp. 143.962.300,00	79.21%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 6.157.927.400,00</b>	<b>Rp. 4.903.891.067,00</b>	<b>87.44%</b>

#### 4.2.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan berasal dari personel Dinas Kesehatan. Adapun rincian personel pada Dinas Kesehatan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2.6**  
**Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Kesehatan**

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	1
4	Eselon IV.a	2
6	Pejabat Fungsional	-
7	Staf	10
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>

4.2.7. Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indicator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 yang tidak memenuhi target 100%, sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. K1 ibu hamil lebih dari 12 minggu; 2. Ibu bersalin premature; 3. Adanya zonasi wilayah Covid-19 (hanya desa zona hijau yang bisa membuka layanan);	1. Sosialisasi manfaat ANC (Antenatal Care) secara dini; 2. Penguatan skrining ANC; 3. Memberikan layanan dengan temu janji
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Adanya abortus dan kematian ibu pada masa kehamilan.	1. Meningkatkan skrining risiko tinggi kehamilan; 2. Mengadakan <i>rolling desk</i> .
3.	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	1. Ada kematian bayi 0-28 hari; 2. Belum mencapai layanan 28 hari bayi pindah.	1. Meningkatkan pelayanan bayi baru lahir.
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Adanya zonasi wilayah Covid-19 (hanya desa zona hijau yang bisa membuka layanan); 2. Saat usia 0-11 bulan belum mendapatkan pelayanan paripurna (sebagian bayi baru lahir dengan BBLR).	1. Memberikan layanan kepada bayi dan balita sesuai standar dengan temu janji.
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. Masih belum dilakukannya pembelajaran tatap muka secara menyeluruh sehingga petugas kesehatan kesulitan untuk melakukan skrining secara langsung.	1. Melakukan janji temu; 2. Memanfaatkan WAG untuk memberi informasi dan pengetahuan.

6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang maksimalnya pelaksanaan skrining;</li> <li>2. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya preventif PTM;</li> <li>3. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menstabilkan penyakit tidak menular;</li> <li>4. Adanya pandemi Covid – 19 membuat masyarakat takut untuk datang ke fasilitas kesehatan dalam rangka pemeriksaan rutin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi terus – menerus kepada masyarakat tentang pentingnya penstabilan penyakit tidak menular;</li> <li>2. dilakukan screening berkelanjutan untuk masyarakat yang merasa sehat;</li> <li>3. meyakinkan masyarakat akan rasa aman untuk datang ke faskes.</li> </ol>
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya zonasi wilayah Covid-19 (hanya desa zona hijau yang bisa membuka layanan posyandu lansia);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan skrining dengan temu janji.</li> </ol>
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang maksimalnya pelaksanaan skrining;</li> <li>2. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya preventif PTM;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi terus – menerus kepada masyarakat tentang pentingnya penstabilan penyakit tidak menular;</li> <li>2. Dilakukan screening berkelanjutan untuk masyarakat yang merasa sehat;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menstabilkan penyakit tidak menular;</li> <li>4. Adanya pandemi Covid – 19 membuat masyarakat takut untuk datang ke fasilitas kesehatan dalam rangka pemeriksaan rutin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meyakinkan masyarakat akan rasa aman untuk datang ke faskes.</li> </ol>

## BAB IV



9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang maksimalnya pelaksanaan skrining;</li> <li>2. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya preventif PTM;</li> <li>3. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menstabilkan penyakit tidak menular;</li> <li>4. Adanya pandemi Covid – 19 membuat masyarakat takut untuk datang ke fasilitas kesehatan dalam rangka pemeriksaan rutin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi terus – menerus kepada masyarakat tentang pentingnya penstabilan penyakit tidak menular;</li> <li>2. Dilakukan screening berkelanjutan untuk masyarakat yang merasa sehat;</li> <li>3. Meyakinkan masyarakat akan rasa aman untuk datang ke faskes.</li> </ol>
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuatnya stigma masyarakat tentang penyakit gangguan jiwa adalah penyakit kutukan;</li> <li>2. Kurang patuhnya ODGJ post pasung untuk minum obat teratur;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi ke masyarakat untuk merubah stigma masyarakat tentang kesehatan jiwa;</li> <li>2. Penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kegiatan screening</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kurangnya pengetahuan untuk petugas Keswa dan dokter Puskesmas untuk penanganan kasus Jiwa di masyarakat sehingga dibutuhkan pelatihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesehatan Jiwa;</li> <li>4. Pelatihan Petugas Keswa Puskesmas;</li> </ol>
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis (TB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peningkatan kasus Covid-19 dan gencarnya vaksin Covid-19 di semester pertama tahun 2021 seluruh petugas difokuskan untuk pelayan vaksin sehingga program TB terkesampingkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen SDM dan pemenuhan target dimulai sejak awal tahun sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.</li> </ol>
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulitnya penjangkauan terhadap populasi kunci terutama LSL dan Waria.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama lintas sektor dengan LSM.</li> </ol>

## BAB IV





4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- 3. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu setiap warga negara.

Tabel 4.3.1  
Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Setiap Warga Negara
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Setiap Warga Negara

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan pekerjaan umum dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Palayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.2  
Target SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No.	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %
B.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.3  
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

A.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari		
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	100 %
B.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	94.7 %

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 15.910.817.390,00 (Lima belas milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang secara keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lamongan tahun anggaran 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 14.634.184.390,00 dan untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 1.276.633.000,00

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.4  
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran			Total
		APBD	APBN	Sumber Lain Yang Sah	
A.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari				
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rp. 14.634.184.390,00	-	-	Rp. 14.634.184.390,00
B.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rp. 1.276.633.000,00	-	-	Rp. 1.276.633.000,00
Jumlah		Rp. 15.910.817.390,00	-	-	Rp. 15.910.817.390,00

4.3.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 147.491.029.000,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah). Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari terealisasi sebesar Rp. 25.391.550.448,00; dan untuk Pelayanan Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic terealisasi sebesar Rp. 1.225.667.500,00.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.5

Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari			
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rp. 14.634.184.390,00	Rp. 147.491.029.000,00	300.30%
B.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rp. 1.276.633.000,00	Rp. 1.225.667.500,00	97.79%
Jumlah		Rp. 15.910.817.390,00	Rp. 147.491.029.000,00	300.304%

4.3.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum berasal dari personel Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun rincian personel pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3.6

Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan

PNS	Non PNS	Total
8 Orang	14 Orang	22 Orang

4.3.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat pelayanan air minum yang masih rendah,
- 2. Kurangnya kualitas air baku yang memenuhi standart kualitas air minum;



3. Kurangnya kuantitas / ketersediaan air baku,
4. Terkendala oleh cuaca yang tidak menentu terutama pada saat curah hujan tinggi lokasi yang berada di wilayah yang rawan banjir menjadi terganggu karena beberapa lokasi pekerjaan ada yang terendam banjir;
5. Membutuhkan teknologi untuk proses pengolahan air yang layak minum
6. Terkendalanya sarana dan prasarana dalam pengolahan limbah
7. Kurangnya keahlian SDM mengenai pengolahan limbah
8. Belum terlaksananya pemeliharaan IPAL komunal yang sudah terbangun
9. Pengelolaan air limbah domestik belum optimal

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan air minum di seluruh wilayah Lamongan dengan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak ketiga;
2. Digunakan teknik pendugaan air bawah tanah (geo listrik) dengan biaya diambilkan dari pagu masing-masing desa. Namun hal ini tidak dapat berhasil 100 % dikarenakan ada beberapa lokasi desa yang memiliki air bawah tanah asin/ payau, keadaan asin/ payau tersebut tidak mampu dideteksi oleh alat geo listrik;
3. Berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai keberadaan air permukaan berupa waduk/ embung sebagai sumber air baku;
4. Meningkatkan pengetahuan / teknologi untuk pengolahan air minum agar sesuai standar
5. Peningkatan sarana dan sarana pada IPLT
6. Peningkatan SDM dengan pembekalan teknis pengolahan limbah
7. Sosialisasi ke masyarakat mengenai pengolahan air limbah domestik
8. Memelihara dan mengoptimalkan operasional IPAL komunal yang sudah ada

#### **4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

##### **4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar**

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena

#### **BAB IV**



relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

- 1. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- 2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.4.1

Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana kabupaten
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten

4.4.2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan perumahan rakyat dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Palayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.2

Target SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No.	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %

BAB IV



B.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %

4.4.3.Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Palayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.3.  
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No	Indikator SPM	Target	Realisa si
A	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
1.	Presentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %
B	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100 %

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 530.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang secara keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Kota dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 345.000.000,00; dan untuk pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dialokasikan sebesar Rp. 185.000.000,00.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.4.

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran			Total
		APBD	APBN	Sumber Lain Yang Sah	
A.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota				
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rp. 345.000.000,00	-	-	Rp. 345.000.000,00
B.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota				
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rp. 185.000.000,00	-	-	Rp. 185.000.000,00
Jumlah		Rp. 530.000.000,00			Rp. 530.000.000,00

BAB IV





4.4.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 147.491.029.000,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah). Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari terealisasi sebesar Rp. 25.391.550.448,00; dan untuk Pelayanan Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic terealisasi sebesar Rp. 1.225.667.500,00.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.5  
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota			
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rp. 345.000.000,00	Rp. 344.930.000,00	99.99%
B.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rp. 185.000.000,00	Rp. 183.733.560,00	99.46%
Jumlah		Rp. 530.000.000,00	Rp. 528.663.560,00	99.73%

4.4.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat berasal dari personel Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun rincian personel pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4.6  
Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan

PNS	Non PNS	Total
2 Orang	2 Orang	4 Orang

4.4.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data rumah yang menjadi korban bencana
2. Belum adanya Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam
3. Belum tersedianya kriteria penerima bantuan
4. Belum tersedianya SOP penanganan rumah korban bencana
5. Belum tersedianya anggaran yang spesifik untuk korban bencana
6. Belum tersedianya data rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
7. Belum adanya Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
8. Belum tersedianya kriteria penerima bantuan
9. Belum tersedianya SOP penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
10. Belum tersedianya anggaran yang spesifik untuk masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendataan rumah korban bencana
2. Koordinasi dengan dinas dan desa/ kecamatan terkait
3. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam
4. Menyusun Surat Keputusan yang berisi kriteria penerima bantuan
5. Menyusun SOP penanganan rumah korban bencana
6. Mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi penanganan rumah korban bencana
7. Pendataan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
8. Koordinasi dengan dinas dan desa/ kecamatan terkait
9. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
10. Menyusun Surat Keputusan yang berisi kriteria penerima bantuan
11. Menyusun SOP penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
12. Mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

#### **4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

##### **4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar**

SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi dan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi
2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu
3. Pelayanan informasi rawan bencana
4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

#### **BAB IV**



Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
3. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

**Tabel 4.5.1**  
**Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Warga Negara/ Masyarakat
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Warga Negara/ Masyarakat
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Warga Negara di kawasan rawan benacana
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)

6.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penduduk yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran
----	--	---

4.5.2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target SPM pada pelayanan bidang pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Palayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5.2

Target SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	
1.	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	1 Warga
B.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	
1.	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	164 Kegiatan
C.	Pelayanan informasi rawan bencana	
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	588.635 Warga
D.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.667.789 Warga
E.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.771.661 Warga
F.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	51 Korban
----	--	-----------

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5.3.

Realisasi SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator SPM	Target	Realisasi
A.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		
1.	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100%	100%
B.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		
1.	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100%	100%
C.	Pelayanan informasi rawan bencana		
1.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
D.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	100%	81.77 %
E.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 857.758.000,00 (Depalapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang berasal dari dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lamongan tahun anggaran 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 65.000.000,00; untuk Pelayanan informasi rawan bencana dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 115.000.000,00; untuk Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 627.758.000,00; dan untuk Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,00.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5.4.

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator SPM	Alokasi Anggaran			Total
		APBD	APBN	Sumber Lain Yang Sah	
A.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi				
1.	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	-	-	-	-

B.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu				
1.	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Rp. 65.000.000,00			Rp. 65.000.000,00
C.	Pelayanan informasi rawan bencana				
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Rp. 115.000.000,00			Rp. 115.000.000,00
D.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp. 20.000.000,00	Rp. 607.758.000,00	-	Rp. 627.758.000,00
E.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp. 50.000.000,00	-	-	Rp. 50.000.000,00
F.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	-	-	-
Jumlah		Rp.250.000.000,00	Rp.607.758.000,00	-	Rp. 857.758.000,00

BAB IV





4.5.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah). Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu terealisasi sebesar Rp. 65.000.000,00; dan untuk Pelayanan informasi rawan bencana terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5.5.  
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			
1.	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	-	-	-
B.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			
1.	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Rp. 65.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	100%
C.	Pelayanan informasi rawan bencana			
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100%
D.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
1.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-
E.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	-	-	-
F.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			

1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	-	-
Jumlah		Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	100%

4.5.6.Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat berasal dari personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun rincian personel pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5.6.

Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

NO		JUMLAH
1.	PNS	54 anggota
2.	CPNS	2 anggota
3.	TKK Pemkab	66 anggota
4.	TKK Kantor	114 anggota

4.5.7.Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pada tahapan pengumpulan data masih ada data yang belum terkelola dengan baik oleh bidang
2. Kurang optimalnya anggaran untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM pada program maupun kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
3. Belum adanya anggaran yang mendukung pada jenis layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat sebagai akibat/korban atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
4. Masih kurangnya sosialisasi maupun bimbingan teknis penyusunan laporan SPM yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbaikan system pelaporan dari masing-masing bidang selaku pelaksana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya penegakan perda
2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, sebagai upaya terwujudnya pelaksanaan kegiatan
3. Mengusulkan jenis kegiatan baru yang menghimpun korban sebagai dampak atas pelaksanaan kegiatan penegakan perda
5. Mengupayakan sosialisasi maupun bimbingan teknis penyusunan SPM

## **4.6. URUSAN SOSIAL**

### **4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2021 berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 10 ayat (2) jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial tersebut meliputi :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti

## **BAB IV**



- 3. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- 4. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- 5. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

**Tabel 4.6.1.**  
**Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Anak Terlantar
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Lanjut usia terlantar
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Gelandangan dan Pengemis
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana kabupaten

**4.6.2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan sosial dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Palayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6.2.  
Target SPM Bidang Pelayanan Sosial

No.	Indikator SPM	Target Daerah
A.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti</b>	
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
B.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti</b>	
1.	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
C.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti</b>	
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
D.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti</b>	
1.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
E.	<b>Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>	
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota	

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Palayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6.3.  
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Sosial

No.	Indikator SPM	Target	Target	Realisa si	Realisa si
A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti				
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	5.365	100%	5.365
B.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti				
1.	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	10.153	99.99%	10.152
C.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti				
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	8.422	99.75%	8.401
D.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti				
1.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	25	100%	25
E.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota	100%	49.363	100%	49.363

4.6.4.Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 65.375.090.774,00 (Enam puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang secara keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lamongan tahun anggaran 2021 pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

Terlantar Di Luar Panti dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 16.056.925.000,00; untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 21.781.082.000,00; untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 26.416.265.000,00; untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 21.000.000,00; dan untuk Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 1.099.818.774,00.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6.4.**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Sosial**

No.	Indikator SPM	Alokasi Anggaran			Total
		APBD	APBN	Sumber Lain Yang Sah	
A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti				
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rp. 867.050.000,00	Rp. 14.940.950.000,00	Rp. 248.925.000,00	Rp. 16.056.925.000,00
B.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti				
1.	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rp. 1.173.500.000,00	Rp. 20.271.182.000,00	Rp. 336.400.00,00	Rp. 21.781.082.000,00
C.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti				
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rp. 1.021.450.000,00	Rp. 24.886.170.000,00	Rp. 295.145.000,00	Rp. 26.416.265.000,00
D.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti				

1.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Rp. 21.000.000,00	-	-	Rp. 21.000.000,00
E.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota	Rp. 37.500.000,00	Rp. 1.062.318.774,00	-	Rp. 1.099.818.774,00
Jumlah		Rp. 3.120.500.000,00	Rp. 61.160.620.774,00	Rp. 880.470.000,00	Rp. 65.375.090.774,00

4.6.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 65.116.605.074,00 (Enam puluh lima milyar seratus enam belas juta enam ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah). Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti terealisasi sebesar Rp. 16.043.063.375,00; untuk Pelayanan Rehabilitas sosial anak terlantar di luar panti terealisasi sebesar Rp.21.766.715.725,00; untuk Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti terealisasi sebesar Rp. 26.193.753.375,00; untk Pelayanan rehabilitasi sosial daar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti terealisasi sebesar Rp. 15.593.025,00; untuk Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana terealisasi sebesar Rp. 1.097.479.574,00.



Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6.5.**  
**Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Sosial**

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
<b>A.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti</b>			
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rp. 16.056.925.000,00	Rp. 16.043.063.375,00	99.91%
<b>B.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti</b>			
1.	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rp. 21.781.082.000,00	Rp. 21.766.715.725,00	99.93%
<b>C.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti</b>			
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rp. 26.416.265.000,00	Rp. 26.193.753.375,00	99.16%
<b>D.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti</b>			
1.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Rp. 21.000.000,00	Rp. 15.593.025, 00	74.25%
<b>E.</b>	<b>Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>			

1.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota	Rp. 1.099.818.774,00	Rp. 1.097.479.574,00	99.79%
		Rp. 65.375.090.774,00	Rp. 65.116.605.074,00	94.61%

4.6.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan berasal dari personel Dinas Pendidikan. Adapun rincian personel pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6.6.

Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4
4	Eselon IV.a	15
6	Pejabat Fungsional	-
7	Staf PNS	4
8	TKK	20
Jumlah		45

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh formasi jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sudah terisi. Formasi jabatan yang telah terisi secara keseluruhan tersebut sangat menunjang kinerja instansi, dimana kerangka kebijakan strategis diambil oleh Kepala Badan/ Eselon II.b, pada tataran taktis diarahkan oleh para Kepala Bidang/

Eselon III.b dan dikoordinasikan oleh Sekretaris/ Eselon III.a, dan tataran teknis operasional dilaksanakan oleh para Kasubbag dan Kasubbid/ Eselon IV.a beserta para Stafnya. Namun demikian, perlu dilakukan penambahan jumlah Staf sehingga dapat menunjang kinerja dinas dimaksud dalam tataran operasional.

#### 4.6.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Data dimiliki oleh masing-masing operator program dan kegiatan pada masing-masing bidang, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik
2. Perhitungan kebutuhan untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti relatif susah dilakukan, karena umumnya gepeng dan pengemis hidup tidak menetap (berpindah-pindah)
3. Keterbatasan dukungan dana dan fasilitas
4. Dalam Aspek Pelaksanaan
  - Sarana dan Prasarana LIPOSOS belum memadai
  - Fasilitas penyelenggaraan panti sosial untuk kegiatan usaha produktif belum tercukupi
  - Santunan Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis dan Bekas Narapidana belum memadai
  - Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada tokoh masyarakat, LSM dan PPKS yang berpotensi melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan masih terbatas
  - Pemberian bantuan penanggulangan bencana masih belum optimal
  - Sarana dan prasarana pemberdayaan generasi muda masih belum memadai

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar operator program dan kegiatan pada masing-masing Bidang

## BAB IV



2. Koordinasi dengan berbagai OPD terkait
3. Identifikasi dan usulan prioritas untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas
4. Dalam aspek pelaksanaan
  - Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya dan manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
  - Penerapan prinsip nilai (transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas) tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
  - Peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
  - Identifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi tantangan dan potensi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan berbasis data yang valid dan update;
  - Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  - Sosialisasi kepada sektor swasta dan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
  - Pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

#### 4.6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun berbagai proram dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

##### 1) Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

## BAB IV



Tabel 4.6.1  
Program Kegiatan Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
2.	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biayan Personil Peserta Didik
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
3.	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan perlengkapan pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Penyelenggaraan proses belajar Nonformal/ Kesetaraan

2) **Urusan Kesehatan**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.2.  
Program Kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

BAB IV



2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
4.	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Tidak Ada Program	Tidak Ada Program
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

## BAB IV



11.	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus - Pengadaan Bahan Habis Pakai
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi ( <i>Human Immundeficiency Virus</i> )	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

3) **Urusan Pekerjaan Umum**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6.3.**

**Program Kegiatan Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum**

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
A.	<b>Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>		
1.	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
B.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik		
1.	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.4.

Program Kegiatan Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
A.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten		
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana



	penyediaan rumah yang layak huni		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten
B.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten		
1.	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	Sosialisasi dan persiapan	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
		Pemyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

5) UrusanTrantibumlinmas

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daeah Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.5.  
Program Kegiatan Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum  
dan Perlindungan Masyarakat – Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
A.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		
1.	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penengakan Peratuaran Daearah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Tabel 4.6.6  
Program Kegiatan Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum  
dan Perlindungan Masyarakat - Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
A.	Pelayanan informasi rawan bencana		
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)
B.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
1.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Kontijensi
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

6) Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.6.

Program Kegiatan Bidang Pelayanan Sosial

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
A.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Reunifikasi Keluarga
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar

			Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Layanan Rujukan
		Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Perorangan (ASPD)	-
		Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan Jaminan Sosial Lanjut Usia (PKH Plus Jaslut), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	-
		<b>B. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti</b>	
1.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan;
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Reunifikasi Keluarga
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

BAB IV



			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar
			Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Layanan Rujukan
		Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	-
<b>C. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti</b>			
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Reunifikasi Keluarga
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar
			Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA

BAB IV



			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Layanan Rujukan
		Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	-
D.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
1.	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Reunifikasi Keluarga
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar
			Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

BAB IV



			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Layanan Rujukan
E.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota		
1.	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
			Cadangan beras Pemerintah untuk korban bencana
		Program Kenangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Kota Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal



## BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), selain substansi tersebut LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil pembangunan di Kabupaten Lamongan pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kabupaten Lamongan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan lainnya.

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2021, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2021 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

---

### BAB V

---



Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

BUPATI KAMONGAN



# **INDIKATOR KINERJA MAKRO** **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** **TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

**KABUPATEN LAMONGAN**

No.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	DEFINISI	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya	$\frac{\text{IPM Tahun 2021} - \text{IPM Tahun 2020}}{\text{IPM Tahun 2020}} \times 100 \%$	$\frac{73.12}{72.58} - 72.58 = 0.7440 \%$	BAPPEDA
2	Angka Kemiskinan	Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.	$\frac{\text{Angka Kemiskinan Tahun 2021} - \text{Angka Kemiskinan Tahun 2020}}{\text{Angka Kemiskinan 2020}} \times 100 \%$	$\frac{13.85}{13.85} - 13.86 = -0.0722 \%$	BAPPEDA
3	Angka Pengangguran	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.	$\frac{\text{Angka Pengangguran Tahun 2021} - \text{Angka Pengangguran Tahun 2020}}{\text{Angka Pengangguran Tahun 2020}} \times 100 \%$	$\frac{4.90}{5.13} - 5.13 = -4.4834 \%$	BAPPEDA
4	Pertumbuhan Ekonomi	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB :	$\frac{\text{Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021} - \text{Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020}}{\text{Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020}} \times 100 \%$	$\frac{41.04}{39.17} - 39.17 = 4.7741 \%$	BAPPEDA

No.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	DEFINISI	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		a. Atas dasar harga berlaku - Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi b. Atas dasar harga konstan - Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun	----- ----- x 100 % Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020		
5	Pendapatan Per Kapita	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan : a. PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga b. PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.	Pendapatan Per Kapita Tahun 2021 - Pendapatan Per Kapita Tahun 2020 ----- ----- x 100 % Pendapatan Per Kapita Tahun 2020	$\frac{30.27}{32.93} - 32.93 = -8.0777 \%$	BAPPEDA
6	Ketimpangan Pendapatan	Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan gini ratio. Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2021 - Ketimpangan Pendapatan Tahun 2020 ----- ----- x 100 % Ketimpangan Pendapatan Tahun 2020	$\frac{0.292}{0.296} - 0.296 = -1.3514 \%$	BAPPEDA

LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME(HASIL) DAN OUTPUT(KELUARAN)  
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
TERHADAP LPPD TAHUN 2021

KABUPATEN LAMONGAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	$\frac{27,554}{27,554} = 100 \%$	DINAS PENDIDIKAN
				1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	436 Unit	DINAS PENDIDIKAN
				2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	27544 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	2754 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD ( Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	2307 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	2053 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	1874 Orang	DINAS PENDIDIKAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			
				7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Sebanyak .....	1006 Orang	DINAS PENDIDIKAN
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	$\frac{51,471}{51,471} = 100 \%$	DINAS PENDIDIKAN
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	$\frac{34,639}{34,639} = 100 \%$	DINAS PENDIDIKAN
				1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sebanyak .....	784 Unit	DINAS PENDIDIKAN
				2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	51471 Orang	DINAS PENDIDIKAN



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	34639 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	5147 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	3464 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	5844 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	3445 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	4939 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	2670 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	1270 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	2703 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				12. Jumlah tenaga kependidikan	Sebanyak .....	826 Orang	DINAS PENDIDIKAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pada jenjang sekolah dasar			
				13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	758 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak .....	4639 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak .....	2576 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak .....	635 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak .....	159 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sebanyak .....	121 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sebanyak .....	244 Orang	DINAS PENDIDIKAN



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	$\frac{2,758}{2,758} = 100 \%$	DINAS PENDIDIKAN
				1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	5 Unit	DINAS PENDIDIKAN
				2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	2758 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	276 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	56 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	58 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana	Sebanyak .....	46 Orang	DINAS PENDIDIKAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				(S1)			
				7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak .....	635 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sebanyak .....	36 Orang	DINAS PENDIDIKAN
2	KESEHATAN	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100% Jumlah Penduduk di Kabupaten	$\frac{1,555}{1,380,145} = 0.1127 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sebanyak .....	16 Unit	DINAS KESEHATAN
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100% Jumlah RS di kabupaten	$\frac{11}{16} = 68.75 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sebanyak .....	11 Unit	DINAS KESEHATAN
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100% Jumlah ibu hamil di kabupaten	$\frac{15,220}{16,273} = 93.5292 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	1.498.747	DINAS KESEHATAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dukungan Logistik seperti : 1 . Vaksin Tetanus Difetri (Td) 2 . Tablet Tambah Darah 3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin 4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu 5 . Buku KIA , dll		
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten	$\frac{15,496}{15,534} = 99.7554 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Formulir Fotograf 2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) 3 . Buku KIA , dll	48.242	DINAS KESEHATAN
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah bayi baru lahir yang mendaatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di kabupaten	$\frac{14,587}{14,794} = 98.6008 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik	Jumlah dukungan logistik kesehatan	71.635	DINAS KESEHATAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kesehatan yang tersedia	yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Vaksin Hepatitis BO 2 . Vitamin K1 Injeksi 3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik 4 . Formulir Bayi Baru Lahir , 5. Formulir MTBM 6 . Buku KIA , dll		
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah balita di kabupaten	$\frac{57,133}{60,750} = 94.0461 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Kuisi oner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 2 . Formulir DDTK 3 . Vitamin A Biru , Vitamin A Merah 4 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell , 5. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella 6 . Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik, Buku KIA , dll	352.290	DINAS KESEHATAN
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				standar			
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten	$\frac{117,943}{122,724} = 96.1043 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Buku Raport Kesehatanku 2 . Buku Pemantauan Kesehatan 3 . Kuesioner Skrining Kesehatan 4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 6 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah , dll	589.715	DINAS KESEHATAN
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten	$\frac{718,325}{772,932} = 92.9351 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti :	66	DINAS KESEHATAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					1 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) , Dll		
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga Negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten	$\frac{176,200}{192,635} = 91.4683 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3 . Buku Kesehatan Lansia , Dll	545.035	DINAS KESEHATAN
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Kabupaten	$\frac{332,084}{335,813} = 98.8896 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 2 . Tensimeter 3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM , DII	67	DINAS KESEHATAN
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di kabupaten	$\frac{22,580}{23,226} = 97.2186 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM 3 . Pedoman dan Media KIE , DII	67	DINAS KESEHATAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ di kabupaten	$\frac{2,259}{2,288} = 98.7325 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia 2 . Kit Berisi 2 Alat Fiksasi 3 . Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 4 . Media KIE , DII	99	DINAS KESEHATAN
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten	$\frac{12,470}{13,219} = 94.3339 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti :	8775	DINAS KESEHATAN



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 2 . Reagen Zn TB 3 . Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 4 . Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering 5 . Catridge Tes Cepat Molekuler 6 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur , DII		
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV Di Kabupaten	$\frac{17,923}{18,868} = 94.9915 \%$	DINAS KESEHATAN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner 2 . Tes Cepat HIV (RDT) Pertama 3 . Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan jarum	33.321	DINAS KESEHATAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 4 . Lainnya...		
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	33 Orang	DINAS KESEHATAN
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	$\frac{259.84}{1,307.80} = 19.8685 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m2) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m2)	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas .....	1307.80 Ha	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang ....	199000 Meter	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas .....	0 Ha	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang ....	0 Meter	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Ada	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Ada	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	5 Sarpras	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),	$\frac{9,406}{10,640} = 88.4023 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			dilayani oleh jaringan irigasi		direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		
				1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	$\frac{95,323}{181,721} = 52.4557 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	$\frac{149,220}{278,880} = 53.5069 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut	$\frac{303,327}{303,327} = 100 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				1. Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Adanya dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Tidak	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Ada	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan	Sebanyak .....	1 BUMD/UPTD	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				SPAM			
				4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Sebanyak .....	2 Izin	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Sebanyak .....	1 Kerjasama	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten	$\frac{303,327}{303,327} = 100 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	Sebanyak .....	289553 Rumah	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sebanyak .....	12569 Rumah	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Sebanyak .....	302122 Rumah	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sebanyak .....	1205 Rumah	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	Sebanyak .....	1205 Rumah	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sebanyak .....	1205 Rumah	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\Sigma$ Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ..... X 100% $\Sigma$ Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha	$\frac{289,553}{1} = 28,955,300 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\Sigma$ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT ..... X 100% $\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha	$\frac{1,205}{303,327} = 0.3973 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\Sigma$ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ..... X 100% $\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALD T	$\frac{12,569}{42,495} = 29.5776 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				10. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	$\Sigma$ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	$\frac{289,553}{1} = 109.8256 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					----- X 100% Σ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	$\frac{263,648}{263,648}$	
				11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Σ Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia ----- X 100% Σ Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota	$\frac{3}{27} = 11.1111 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Σ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia ----- X 100% Σ Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten/Kota	$\frac{20}{1,080} = 1.8519 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Σ Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD ----- X 100% Σ Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kabupaten/Kota	$\frac{12,569}{12,569} = 100 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Σ Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot ----- X 100% Σ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S	$\frac{1,205}{263,648} = 0.4570 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100% Jumlah IMB yang berlaku	$\frac{281}{281} = 100 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				1.Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah	Σ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah	$\frac{20}{20} = 100 \%$	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				deret sederhana) yang laik fungsi	deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku ----- X 100% $\sum$ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	$\frac{\quad}{20}$	
				2.Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun eksisting	Sebanyak .....	281 Izin	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				3.Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				4.Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan Keputusan (Ada/Tidak)	Ada	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				5.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sebanyak .....	0 Bangunan	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				6.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan srategis daerah provinsi	Sebanyak .....	0 Bangunan	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				7.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	1368 Bangunan	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
				8.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	Sebanyak .....	0 Bangunan	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap	$\frac{586,915}{\quad} = 87.5472 \%$	DINAS PU. BINA MARGA



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					----- x 100% Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten	$\frac{\quad}{670,398}$	
				1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kabupaten/Kota	Sepanjang ....	665.475 KM	DINAS PU. BINA MARGA
				2. Panjang jalan yang dibangun	Sepanjang ....	0 KM	DINAS PU. BINA MARGA
				3. Panjang jembatan yang dibangun	Sepanjang ....	0 Meter	DINAS PU. BINA MARGA
				4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sepanjang ....	7683 KM	DINAS PU. BINA MARGA
				5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sepanjang ....	0 Meter	DINAS PU. BINA MARGA
				6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	Sepanjang ....	2117 KM	DINAS PU. BINA MARGA
				7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sepanjang ....	0 Meter	DINAS PU. BINA MARGA
				8. Panjang jalan yang dipelihara	Sepanjang ....	76.370 KM	DINAS PU. BINA MARGA
				9. Panjang jembatan yang dipelihara	Sepanjang ....	144.65 Meter	DINAS PU. BINA MARGA
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten	$\frac{112}{700} = 16 \%$	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	1 Orang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	112 Orang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	112 Orang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				4. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				8. Tersedianya data dan informasi	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Ada/Tidak	Ada	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah	Ada/Tidak	Ada	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kabupaten/Kota			KARYA
				14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segementasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	690 Badan Usaha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	0 Badan Usaha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				20. Jumlah badan usaha yang	Sebanyak .....	0 Badan Usaha	DINAS PERUMAHAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten/Kota			RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	45 Badan Usaha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sebanyak .....	0 Izin	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak .....	0 Pengawasan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak .....	0 Kecelakaan Konstruksi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
				25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak .....	0 Pengawasan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{145}{145} = 100 \%$	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			kecelakaan konstruksi		----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		KARYA
4	PERUMAHAN RAKYAT	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020 ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020	$\frac{9}{24} = 37.5 \%$	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sebanyak .....	24 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sebanyak .....	24 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sebanyak .....	24 Orang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak .....	9 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak .....	0 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak .....	0 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sebanyak .....	0 Unit	DINAS PERUMAHAN RAKYAT

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sebanyak .....	9 Orang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Seluas .....	0 Ha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rumah Tangga penerima fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	0 Rumah Tangga	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	0 Rumah Tangga	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	0 Rumah Tangga	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah	Sebanyak .....	0 Rumah Tangga	DINAS PERUMAHAN RAKYAT

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
				5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	0 Rumah Tangga	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Seluas .....	0 Ha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	$\frac{115.30}{394.55} = 29.2232 \%$	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				1.Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Seluas .....	394.55 Ha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sebanyak .....	532 Unit	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Seluas .....	115.28 Ha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% Jumlah total unit rumah kabupaten	$\frac{13,226}{303,327} = 4.3603 \%$	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				1. Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	303327 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Sebanyak .....	532 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				3. Jumlah rumah tidak layak huni	Sebanyak .....	13266 Rumah	DINAS PERUMAHAN



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							RAKYAT
				4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sebanyak .....	0 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				5. Rasio rumah dan KK	Jumlah KK ----- x 100% Jumlah total unit rumah	$\frac{414,850}{303,327} = 136.7666 \%$	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				6. Jumlah rumah pembangunan baru	Sebanyak .....	0 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah Unit Rumah Kabupaten	$\frac{204,182}{303,327} = 67.3142 \%$	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sebanyak .....	78 Perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sebanyak .....	204182 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sebanyak .....	204182 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Sebanyak .....	204182 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sebanyak .....	204182 Perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sebanyak .....	204182 Rumah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sebanyak .....	23 Pengembang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sebanyak .....	78 Pengembang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
				9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sebanyak .....	0 Pengembang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	$\frac{86}{86} = 100 \%$	SATPOL PP
				1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	Sebanyak .....	86 Pelanggaran dan Pengaduan	SATPOL PP
				2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sebanyak .....	27 Orang	SATPOL PP
				3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sebanyak .....	9 Perda & Perkada	SATPOL PP
				4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sebanyak .....	4 Orang	SATPOL PP
				5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguam trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguam trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada Ada Sebanyak 4 SOP	SATPOL PP
				6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedianya sarana prasarana minimal (Dibuat dalam bentuk daftar)	Ada	SATPOL PP
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	$\frac{9}{9} = 100 \%$	SATPOL PP

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak .....	588.635 Orang	BPBD
				1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	$\frac{1}{1} = 100 \%$	BPBD
				2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100% Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{588,635}{588,635} = 100 \%$	BPBD
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak .....	287.644 Orang	BPBD
				1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	$\frac{1}{1} = 100 \%$	BPBD
				2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan	$\frac{1}{1} = 100 \%$	BPBD
				3. Persentase jumlah aparatur dan	jumlah aparatur dan warga negara	$\frac{287,524}{\phantom{000000}} = 48.8459 \%$	BPBD

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				warga Negara yang ikut pelatihan	yang ikut pelatihan ----- X 100% jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	$\frac{588,635}{588,635}$	
				4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{287,444}{588,635} = 48.8323 \%$	BPBD
				5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{357,868}{588,635} = 60.7962 \%$	BPBD
				6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{588,635}{588,635} = 100 \%$	BPBD
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak .....	391.516 Orang	BPBD
				1.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- X 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	$\frac{1}{1} = 100 \%$	BPBD
				2.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana ----- X 100%	$\frac{58}{58} = 100 \%$	BPBD

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana		
				3.Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- X 100% jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	$\frac{43}{43} = 100 \%$	BPBD
				4.Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- X 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	$\frac{391,516}{391,516} = 100 \%$	BPBD
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten	$\frac{51}{51} = 100 \%$	SATPOL PP
				1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran	Sebanyak .....	103 Layanan	SATPOL PP

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota			
				2.Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	SATPOL PP
				3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	SATPOL PP
				4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Sebanyak ..... (Dibuat dalam bentuk daftar)	3 Pos	SATPOL PP
				5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sebanyak ..... (Dibuat dalam bentuk daftar)	46 Sarpras	SATPOL PP
				6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sebanyak .....	75 Orang	SATPOL PP
				7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sebanyak .....	0 Orang	SATPOL PP
				8. Jumlah peningkatan kapasitas	Sebanyak .....	35 Kegiatan	SATPOL PP

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				aparatur pemadam kebakaran			
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	15 Menit	SATPOL PP
6	SOSIAL	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	$\frac{23,923}{23,965} = 99.8247 \%$	DINAS SOSIAL
				1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sejumlah .....	1 Layanan	DINAS SOSIAL
				2. Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Sebanyak .....	23965 Orang	DINAS SOSIAL
				3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Sebanyak .....	0 Tim	DINAS SOSIAL
				4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sebanyak .....	23.923 Orang	DINAS SOSIAL
				5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sebanyak .....	1 Unit	DINAS SOSIAL
				6. Jumlah penyandang disabilitas	Sebanyak .....	0 Orang	DINAS SOSIAL

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket Permakanan sesuai standar gizi			
				7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sebanyak .....	0 Unit	DINAS SOSIAL
				8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Sebanyak .....	80 Orang	DINAS SOSIAL
				9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sebanyak .....	5 Orang	DINAS SOSIAL
				10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Sebanyak .....	0 Peralatan	DINAS SOSIAL
				11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Sebanyak .....	0 Paket	DINAS SOSIAL
				12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sebanyak .....	0 Orang	DINAS SOSIAL
				13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sebanyak .....	0 Orang	DINAS SOSIAL
				14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	Sebanyak .....	37 Orang	DINAS SOSIAL



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Sebanyak .....	0 Orang	DINAS SOSIAL
				16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sebanyak .....	0 Kegiatan	DINAS SOSIAL
				17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sebanyak .....	11 Orang	DINAS SOSIAL
				18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Sebanyak .....	15 Orang	DINAS SOSIAL
				19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	Sebanyak .....	39 Orang	DINAS SOSIAL
				20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sebanyak .....	35 Orang	DINAS SOSIAL
				21. Jumlah penyandang disabilitas	Sebanyak .....	11 Orang	DINAS SOSIAL

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	$\frac{49,363}{49,363} = 100 \%$	DINAS SOSIAL
				1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sebanyak .....	49363 Orang	DINAS SOSIAL
				2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sebanyak .....	0 Orang	DINAS SOSIAL
				3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sebanyak .....	0 Penampungan	DINAS SOSIAL
				4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sebanyak .....	0 Paket	DINAS SOSIAL
				5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Sebanyak .....	0 Orang	DINAS SOSIAL
				6. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	Sebanyak .....	67 Orang	DINAS SOSIAL
7	TENAGA KERJA	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100%	$\frac{22}{22} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten		
				1. Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota (Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku)	Ada	DINAS TENAGA KERJA
				2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%  realisasi indikator - Target indikator ----- X 100% Realisasi	$\frac{2,333,900}{2,333,900} - \frac{2,252,380}{2,333,900} = \frac{3.492}{9} \%$	DINAS TENAGA KERJA
				3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	429 Perusahaan	DINAS TENAGA KERJA
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah tenaga kerja yang memilki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga keseluruhan	$\frac{246,996}{649,929} = 38.0035 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n ----- X 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	$\frac{1}{1} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				2. Persentase instruktur	Jumlah instruktur bersertifikat	$\frac{9}{9} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				bersertifikat kompetensi	kompetensi pada tahun n ----- X 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	$\frac{9}{9}$	
				3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ----- X 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	$\frac{9}{440} = 2.0455 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				4. Persentase LPK yang terakreditasi	LPK yang terakreditasi pada tahun n ----- X 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n	$\frac{1}{54} = 1.8519 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				5. Persentase LPK yang memiliki	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n ----- X 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	$\frac{54}{54} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				6. Jumlah penganggur yang dilatih	Sebanyak .....	96 Orang	DINAS TENAGA KERJA
				7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n ----- X 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	$\frac{96}{96} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				8. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ----- X 100% jumlah lulusan pada tahun n	$\frac{96}{96} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				9. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- X 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	$\frac{96}{96} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih ----- X 100% Jumlah CPMI terdaftar	$\frac{41}{41} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah Pelatihan CPMI yang dilaksanakan ... ----- X 100% Jumlah Pelatihan CPMI yang direncanakan pada tahun n  Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	$\frac{8}{8} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- Jumlah tenaga kerja	$\frac{27,896,543.03 \text{ Ket. A}}{649,929 \text{ Ket. B}} = 42.9224 \text{ Ket. D}$	DINAS TENAGA KERJA
				1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	$\frac{14}{492} = 2.8455 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				2. Data tingkat produktivitas total	Data tingkat produktivitas total (Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)).	0	DINAS TENAGA KERJA
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah perusahaan	$\frac{462}{492} = 93.9024 \%$	DINAS TENAGA KERJA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	$\frac{86}{492} = 17.4797 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB	$\frac{13}{30} = 43.3333 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sebanyak .....	4374 SP/SB	DINAS TENAGA KERJA
				4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah... ----- X 100% Jumlah Perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)	$\frac{86}{99} = 86.8687 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ----- X 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	$\frac{462}{492} = 93.9024 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	$\frac{6}{492} = 1.2195 \%$	DINAS TENAGA KERJA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				7. Jumlah mogok kerja	Sebanyak .....	0 Mogok Kerja	DINAS TENAGA KERJA
				8. Jumlah penutupan perusahaan	Sebanyak .....	0 Perusahaan	DINAS TENAGA KERJA
				9. Jumlah perselisihan kepentingan	Sejumlah .....	1 Perselisihan	DINAS TENAGA KERJA
				10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sejumlah .....	0 Perselisihan	DINAS TENAGA KERJA
				11. Jumlah perselisihan PHK	Sejumlah .....	6 Perselisihan	DINAS TENAGA KERJA
				12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sebanyak .....	615 Orang	DINAS TENAGA KERJA
				13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sejumlah .....	0 Perselisihan	DINAS TENAGA KERJA
				14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Ada/Tidak	Ada	DINAS TENAGA KERJA
				15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah penjanjian bersama ----- X 100% Jumlah kasus perselisihan	$\frac{6}{6} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA
		46	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	$\frac{2,716}{3,700} = 73.4054 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	103 Lowongan Kerja	DINAS TENAGA KERJA
				2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	3700 Orang	DINAS TENAGA KERJA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	37 BKK	DINAS TENAGA KERJA
				4. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	0 Orang	DINAS TENAGA KERJA
				5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Sebanyak .....	0 Orang	DINAS TENAGA KERJA
				6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	0 Lembaga	DINAS TENAGA KERJA
				7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	8638 Perjanjian	DINAS TENAGA KERJA
				8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Sebanyak .....	70 Orang	DINAS TENAGA KERJA
				9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ----- X 100% Jumlah CPMI/CTKI	$\frac{41}{41} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata sebanyak .....	41 Orang	DINAS TENAGA KERJA
				11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan ----- X 100% Jumlah PMI yang pulang	$\frac{5}{11} = 45.4545 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				12. Jumlah Calon Pekerja Migran	Jumlah PMI dan TKI yang	$\frac{41}{41} = 100 \%$	DINAS TENAGA KERJA



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ----- X 100% Jumlah PMI/TKI	41	
				13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan ----- X 100% Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya	$\frac{0}{789} = 0 \%$	DINAS TENAGA KERJA
				14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Jumlah LTSA yang terbentuk ----- X 100% Jumlah daerah kantong PMI/TKI	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS TENAGA KERJA
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	$\frac{1,636,441,684,9}{57} = 81.9786 \%$	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	Sebanyak .....	60 Lembaga	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	225/357 Program/Kegiatan	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi ----- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) di Kabupaten	$\frac{27}{97,955} = 0.0276 \%$	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				1. Jumlah media massa (cetak,	Sebanyak .....	0 Media Massa	PERLINDUNGAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				elektronik) yang bekerja sama dengan pemKabupaten/Kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sebanyak .....	2 Lembaga	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- X 100% Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten/Kota	$\frac{27}{27} = 100 \%$	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sebanyak .....	27 Lembaga	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota)	Sebanyak .....	1 Lembaga	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	$\frac{15 \text{ Orang}}{688,73 \times \frac{100,00}{4 \text{ Orang}}} = \frac{2.177}{9}$	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	Sebanyak .....	1 Organisasi	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	Sebanyak .....	27 Orang	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sebanyak .....	0 Lembaga	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	0 Lembaga	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sebanyak .....	2 Kebijakan/Program	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Sebanyak .....	1 Lembaga	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan ----- X 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	$\frac{15}{15} = 100 \%$	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	PANGAN	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah cadangan pangan ----- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	$\frac{1,401,983,64}{2} = 1,103.08$ $\frac{127,096,862.98}{98} = 28 \%$	DINAS KETAHANAN PANGAN
				1. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada	DINAS KETAHANAN PANGAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				penyimpanan cadangan pangan			
				2. tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	DINAS KETAHANAN PANGAN
				3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak	DINAS KETAHANAN PANGAN
				4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	DINAS KETAHANAN PANGAN
				5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	DINAS KETAHANAN PANGAN
				6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan pangan	Ada	DINAS KETAHANAN PANGAN
				7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	DINAS KETAHANAN PANGAN
				8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Tidak	DINAS KETAHANAN PANGAN
10	PERTANAHAN	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ----- x 100% Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	$\frac{506,260}{506,260} = 100 \%$	PERTANAHAN
				1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----- X 100%	$\frac{25}{25} = 100 \%$	PERTANAHAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun		
				2. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee ----- X 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	tidak ada  $\frac{71}{71} = 100 \%$	PERTANAHAN
				3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan mksimum/absentee ----- X 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	tidak ada  $\frac{0}{1} = 0 \%$	PERTANAHAN
				4. Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- x 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	ADA  $\frac{10}{10} = 100 \%$	PERTANAHAN
				5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- X 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	tidak ada  $\frac{0}{1} = 0 \%$	PERTANAHAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ADA $\frac{33,930}{33,930} = 100 \%$	PERTANAHAN
		53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{352,316}{352,316} = 100 \%$	PERTANAHAN
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar semua dengan 0,5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	TIDAK ADA $\frac{0}{1} = 0 \%$	PERTANAHAN
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ----- x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	ADA $\frac{8,430}{8,430} = 100 \%$	PERTANAHAN
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	ADA $\frac{1}{1} = 100 \%$	PERTANAHAN
11	LINGKUNGAN HIDUP	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	IKLH Kabupaten/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).	64,92 Indeks Kualitas Pencemaran Air 22,38 Indeks Kualitas Pencemaran Udara 34,004 Indeks Tutupan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hutan/Lahan 8,51	
				1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	64,92 Indeks Kualitas Pencemaran Air 59,52 Indeks Kualitas Pencemaran Udara 84,04 Indeks Tutupan Hutan/Lahan 38,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Total Volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total Volume Timbunan sampah kabupaten	$\frac{1,238,017.95}{1,258,911.28} = 98.3404\%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah Ada 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah Ada 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan Ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	$\frac{3}{23} = 13.0435\%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi	$\frac{49}{49} = 100 \%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PPLHD yang ada ----- X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	$\frac{4}{37} = 10.8108 \%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah MHA yang diakui ----- X 100% Jumlah usulan MHA	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- X 100% Jumlah MHA yang ada	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- X 100% target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	pengaduan masyarakat yang ditangani ----- X 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	$\frac{14}{14} = 100 \%$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	ADMINISTRASI	60	Perekaman KTP	-- Indikator Kinerja Kunci	Jumlah penduduk berumur 17 tahun	$1,039,035 = 96.9719 \%$	DINAS KEPENDUDUKAN



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Elektronik	Outcome/Hasil --	ke atas yang memilki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	$\frac{1,071,481}{1,071,481}$	DAN CATATAN SIPIL
				1. Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	$\frac{7}{7} = 100 \%$	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				2. Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan	$\frac{16}{16} = 100 \%$	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				3. Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan	$\frac{14,017}{14,048} = 99.7793 \%$	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				4. Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam satu tahun ----- X 100% 2 (kali/ Dilaporkan Per Semester)	$\frac{62}{93} = 66.6667 \%$	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	$\frac{140,121}{308,685} = 45.3929 \%$	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		62	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	$\frac{344,242}{349,247} = 98.5669 \%$	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100%	$\frac{7}{76} = 9.2105 \%$	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			kerja sama		Jumlah OPD		
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah Desa Tertinggal (per-awal tahun 2020)	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS PMD
		65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun 2020)	$\frac{1}{324} = 0.3086 \%$	DINAS PMD
				1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sebanyak .....	31 Desa	DINAS PMD
				2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sebanyak .....	18 Desa	DINAS PMD
				3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sebanyak .....	0 Lembaga	DINAS PMD
				4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sebanyak .....	0 Desa	DINAS PMD

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	TFR (Angka Kelahiran Total) $5\sum ASFR$	2.03	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di- Perdakan	Ada / Tidak Dokumen GDPK	Ada	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	3340	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	12.27	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) ----- X 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{9,153}{9,153} = 100 \%$	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Sebanyak .....	3721 Stakeholder	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100%	$\frac{163,383}{163,383} = 77.7996 \%$	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{\quad}{210,005}$	KELUARGA BERENCANA
				1. Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ----- X 100% Jumlah faskes	$\frac{59}{59} = 100 \%$	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif ----- X 100% Jumlah pasangan usia subur	$\frac{29,422}{210,005} = 14.0101 \%$	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Sebanyak .....	2 Kelompok Kerja KKBPK	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ----- X 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan  KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	$\frac{1,674}{3,484} = 48.0482 \%$	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		68	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{22,555}{210,005} = 10.7402 \%$	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki persentase Kesertaan KB paling rendah dalam Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten/Kota	$\frac{0}{474} = 0 \%$	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	<p>Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI ----- X 100% Jumlah keluarga PBI</p> <p>Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.</p>	$\frac{14,069}{15,721} = 89.4918 \%$	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	PERHUBUNGAN	69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	<p>Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan)</p> <p>o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut</p> <p>o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut )</p> <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</li> <li>• Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</li> </ul>	27,8	DINAS PERHUBUNGAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</li><li>• Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</li></ul> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 70, bobot angkutan jalan =30)</li><li>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan=50)</li><li>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=30 (bobot angkutan jalan=70)</li><li>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan= 100)</li></ol> <p>Bobot trayek atau lintas:</p> <p>a) Bobot Trayek atau Lintas dengan</p>		

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot= 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot=0.5		
				1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia ----- X 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	$\frac{22}{23} = 95.6522 \%$	DINAS PERHUBUNGAN
				2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- X 100% Jumlah kendaraan wajib uji	$\frac{11,134}{17,120} = 65.0350 \%$	DINAS PERHUBUNGAN
				3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan ----- X 100% Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	$\frac{1}{7} = 14.2857 \%$	DINAS PERHUBUNGAN
				4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ----- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{9}{9} = 100 \%$	DINAS PERHUBUNGAN
		70	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,41	DINAS PERHUBUNGAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ----- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{9}{9} = 100 \%$	DINAS PERHUBUNGAN
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	$\frac{76}{76} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{76}{76} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{76}{76} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada / Tidak	Ada	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{14}{24} = 58.3333 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			secara online dan terintegrasi		----- x 100% Jumlah Layanan Publik		
				1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 ----- X 100% Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	$\frac{1}{1} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{76}{76} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{50}{76} = 65.7895 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- X 100% Jumlah Layanan	$\frac{41}{41} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- X 100% Jumlah layanan	$\frac{2}{2} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ----- x 100% Jumlah sistem elektronik	$\frac{1}{38} = 2.6316 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ----- X 100% layanan publik dan layanan administrasi	$\frac{14}{24} = 58.3333 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{76}{76} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{23}{76} = 30.2632 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ----- X 100%	$\frac{76}{76} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah perangkat daerah		
				11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- X 100% Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah	$\frac{4}{4} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{76}{76} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah ASN pengelola TIK	$\frac{7}{7} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: ♣ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ♣ Penganggaran ♣ Strategi ♣ Peta Jalan ♣ Arah Kebijakan ♣ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan	Ada	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tugas dan tanggung jawab		
		73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ----- x 100% Jumlah Penduduk	$\frac{1,179,156}{1,380,145} = 85.4371 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah ----- X 100% Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota	$\frac{56}{56} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ----- X 100% Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{3,766}{4,208} = 89.4962 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP ----- X 100% Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	$\frac{65}{81} = 80.2469 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	KOPERASI, USAHA	74	Meningkatnya	-- Indikator Kinerja Kunci	Jumlah koperasi yang meningkat	$\frac{515}{1320} = 39.1040 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KECIL DAN MENENGAH		Koperasi yang berkualitas	Outcome/Hasil --	kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	$\frac{1,317}{1,317}$	KECIL DAN MENENGAH
				1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- X 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	$\frac{48}{1,317} = 3.6446 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----- X 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	$\frac{48}{70} = 68.5714 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{6}{1,317} = 0.4556 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- X 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	$\frac{6}{1,317} = 0.4556 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- X 100%	$\frac{220}{1,317} = 16.7046 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang ada		
				6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- X 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	$\frac{1,100}{91,451} = 1.2028 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{220}{1,317} = 16.7046 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (tidak perlu diisi)	2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{499}{1,317} = 37.8891 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{2}{1,317} = 0.1519 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{31}{1,317} = 2.3538 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{31}{1,317} = 2.3538 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{2}{1,317} = 0.1519 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	$\frac{228,676}{252,386} = 90.6057 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- X 100% Jumlah wirausaha yang ada	$\frac{90}{252,386} = 0.0357 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{244,309}{252,386} = 96.7997 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	jumlah usaha mikro yang bermitra ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{100}{252,386} = 0.0396 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	$\frac{70}{252,386} = 0.0277 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	$\frac{100}{252,386} = 0.0396 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{40}{252,386} = 0.0158 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{55,904}{252,386} = 22.1502 \%$	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	PENANAMAN MODAL	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(Jumlah Investasi tahun 2021 - jumlah Investasi tahun 2020) di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Investasi tahun 2020 di Kabupaten/Kota	$\frac{384,438,700}{489,289,200} - \frac{489,289,200}{489,289,200} = \frac{-}{291} = 21.4 \%$	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak serta Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor sebanyak .....	Tidak Belum ada	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Tidak Belum ada	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Sebanyak .....	0 Laporan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Sebanyak .....	0 Kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				5. Kegiatan pameran penanaman modal	Sebanyak .....	0 Kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Sebanyak .....	0 Kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak .....	99 Konsultasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak .....	5417 Izin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak .....	Laporan Realisasi Penanaman Modal Rp. 384438400000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebanyak .....	42 Aparatur	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak .....	178 Perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
				12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima sebanyak .....	Ada 63	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	$\frac{42,084}{307,614} = 13.6808 \%$	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Sebanyak .....	53 Orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Sebanyak .....	0 Orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	$\frac{153,682}{307,614} = 49.9594 \%$	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Sebanyak .....	28 Orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Sebanyak .....	28 Orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		79	Peningkatan prestasi olahraga	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	3 Medali/Penghargaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan sebanyak ..... Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki	28 Orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga		
				2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Sebanyak .....	14 Event/Kegiatan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
20	STATISTIK	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	$\frac{34}{76} = 44.7368 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				1. Tersedianya buku profil daerah	Tersedianya buku profil daerah	Ada	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak .....	34 Survey	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak .....	8 Kompilasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Sebanyak .....	34 Survey	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Sebanyak .....	8 Kompilasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ----- X 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral	$\frac{34}{34} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata Indikator statistik sektoral ----- X 100% Jumlah indikator statistik sektoral	$\frac{34}{34} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	$\frac{76}{76} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21	PERSANDIAN	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	$\frac{76}{76} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----- X 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada  Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis, Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun	$\frac{76}{76} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan		
				2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	<p>Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- X 100%</p> <p>Jumlah SE yang ada</p> <p>Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll</p> <p>Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan</p> <p>Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan,</p>	$\frac{2}{2} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai		
				3. Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- X 100% Jumlah SE yang ada  Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan	$\frac{2}{2} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan ----- X 100% Jumlah titik pada PHKS  Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian.	$\frac{27}{27} = 100 \%$	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi. PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi</p> <p>Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi</p>		
22	KEBUDAYAAN	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	<p>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah cagar budaya yang terdata</p>	$\frac{102}{102} = 100 \%$	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				1.Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) sebanyak .....	11 Obyek	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) sebanyak .....	383 Obyek	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan	Jumlah objek dimanfaatkan sebanyak .....	383 Obyek	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kesejahteraan masyarakat)			
				4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola sebanyak .....	0 Orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan sebanyak .....	25 Cagar Budaya	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				6. Perlindungan cagar budaya Kabupaten/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) sebanyak .....	25 Cagar Budaya	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota sebanyak .....	0 Cagar Budaya	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) sebanyak .....	1 Cagar Budaya	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan sebanyak .....	3 Cagar Budaya	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) sebanyak .....	188 Koleksi	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				11a. Peningkatan akses masyarakat dalam	Jumlah pengunjung museum sebanyak .....	235977 Orang	



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			
				11b. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum sebanyak .....	11 Orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	(tidak perlu di isi)	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Kabupaten/Kota	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya sebanyak .....	0 Tim	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				14. Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB sebanyak .....	0 Tim	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi sebanyak .....	0 Orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah sdm Museum sebanyak .....	11 Orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) sebanyak .....	2 Orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) sebanyak .....	2 Unit	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				19. Penyelenggaraan kegiatan	Jumlah kegiatan museum yang	3 Kegiatan	DINAS PARIWISATA DAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				museum yang melibatkan masyarakat	melibatkan masyarakat sebanyak .....		KEBUDAYAAN
23	PERPUSTAKAAN	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	63,4	DINAS PERPUSTAKAAN
				1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	$\frac{7,979,743}{1,380,145} = 578.1815 \%$	DINAS PERPUSTAKAAN
				2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya	$\frac{844,602}{1,380,145} = 61.1966 \%$	DINAS PERPUSTAKAAN
				3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	$\frac{4,432}{1,380,145} = 0.3211 \%$	DINAS PERPUSTAKAAN
				4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- X 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya  Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan	$\frac{44}{1,968} = 2.2358 \%$	DINAS PERPUSTAKAAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.		
				5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Sebanyak .....	19	DINAS PERPUSTAKAAN
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan</p> <p>UPLM 2 = Ketercukupan koleksi</p> <p>UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan</p> <p>UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan</p> <p>UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP</p> <p>UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan</p> <p>UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p>	85,40	DINAS PERPUSTAKAAN
				1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Sebanyak .....	2 Naskah Kuno	DINAS PERPUSTAKAAN
				2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Sebanyak .....	2 Naskah Kuno	DINAS PERPUSTAKAAN
				3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	<p>Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) sebanyak .....</p> <p>Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah</p>	1 Budaya Etnis	DINAS PERPUSTAKAAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan		
24	KEARSIPAN	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$T = (a+i+s+j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip I = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN	$\frac{100 + 100 + 72 + 1}{4} = 68.25$	DINAS KEARSIPAN
				1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- X 100% Jumlah seluruh arsip aktif  Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan	$\frac{553}{553} = 100 \%$	DINAS KEARSIPAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012		
				2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<p>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip  <div>-----</div> X 100%  Jumlah seluruh arsip inaktif</p> <p>Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier  Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>	$\frac{15,627}{15,627} = 100 \%$	DINAS KEARSIPAN
				3. Persentase arsip statis yang	Jumlah arsip statis yang telah	$9,158 = 72.4525 \%$	DINAS KEARSIPAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<p>dibuatkan sarana bantu temu balik ----- X 100% Jumlah seluruh arsip statis</p> <p>Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012</p>	12,640	
				4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	<p>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----- X 100% Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN</p>	$\frac{152}{13,193} = 1.1521 \%$	DINAS KEARSIPAN
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	<p><math>T = (m+b+g+a+c+i)/6</math> T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p>	209	DINAS KEARSIPAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		<p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah preovinsi yang digabung dan/atau dibuabrkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK</p> <p>a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>l= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>		
				1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Jumlah Arsip)	0 Arsip	DINAS KEARSIPAN
				2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	0 Arsip	DINAS KEARSIPAN
				3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Jumlah Arsip)	1247 Arsip	DINAS KEARSIPAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik (Jumlah Arsip)	0 Arsip	DINAS KEARSIPAN
				5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Jumlah Arsip)	5 Arsip	DINAS KEARSIPAN
				6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis (Jumlah Arsip)	0 Arsip	DINAS KEARSIPAN
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (Ton) (sumber data: one data KKP)	145897,96 Ton	DINAS PERIKANAN
				1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Sebanyak .....	982 Rumah Tangga	DINAS PERIKANAN
				2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional ----- X 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{5}{5} = 100 \%$	DINAS PERIKANAN
				3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Sebanyak .....	0 Izin	DINAS PERIKANAN
				4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan	Sebanyak .....	80 Pembudidaya	DINAS PERIKANAN



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan			
				5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun sebanyak .....	1.036.626.633 Ekor	DINAS PERIKANAN
26	PARIWISATA	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah wisatawan tahun 2021 - Jumlah wisatawan tahun 2020 ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2020	$\frac{28}{45} - 45 = -37.7778 \%$	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi sebanyak .....  Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta	16 Kawasan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				2.Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebanyak ..... • Fasilitas umum adalah sarana	9 Sarpras	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata		
				3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota sebanyak .....  o Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa	176 TDUP	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Sebanyak .....	28 Orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Sebanyak ..... (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	2 Kegiatan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Sebanyak ..... (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	0 Kegiatan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri sebanyak ..... Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	0 Industri	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi ----- X 100% Jumlah tenaga kerja pariwisata  Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi	$\frac{127}{1,403} = 9.0520 \%$	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ----- X 100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{95}{95} = 100 \%$	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Sebanyak .....	0 Lokasi	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun 2021} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2020}}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2020}} \times 100\%$	$\frac{1,641,160}{1,028,844} \times 100\% = 59.51\%$	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		91	Tingkat Hunian Akomodasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	$\frac{25,047}{126,290} = 19.8329\%$	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB (dalam satuan Rupiah) dari sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB (dalam satuan Rupiah)}} \times 100\%$	$\frac{434,563.9}{27,896,543.2} = 1.5578\%$	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$\frac{\text{Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD}}{\text{Jumlah total PAD}} \times 100\%$	$\frac{691,392,000}{604,588,137,655.78} = 0.1144\%$	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
27	PERTANIAN	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton)}}{\text{Luas panen (ha)}} \times 100\%$	$\frac{1,775,915}{217,394} = 816.9108\%$	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURAL DAN PERKEBUNAN
				1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan sebanyak .....	30 Unit	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURAL DAN PERKEBUNAN
				2. Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan sebanyak .....	150 Unit	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURAL DAN PERKEBUNAN
				3. Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian sebanyak .....	0 Dokumen	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURAL DAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							PERKEBUNAN
				4. Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- X 100% Jumlah prasarana yang dibangun	$\frac{143}{143} = 100 \%$	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURAL DAN PERKEBUNAN
				5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah usulan yang difasilitasi ----- X 100% Jumlah usulan usaha pertanian	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURAL DAN PERKEBUNAN
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kejadian penyakit/kasus Tahun 2021 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2020 ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2020	$\frac{778}{1,016} - 1,016 = -23.4252 \%$	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ----- X 100% Luas area terkena bencana  Bencana yang dimaksud adalah becana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	$\frac{617.56}{617.56} = 100 \%$	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
28	KEHUTANAN	96	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Tidak Karena bukan wewenang Kabupaten	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURAL DAN PERKEBUNAN
				2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi sebanyak .....	0 Kelompok Masyarakat	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURAL DAN PERKEBUNAN
				3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi	0 Ha	DINAS TANAMAN PANGAN,

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					maupun restorasi .....ha		HOLTIKULTURAL DAN PERKEBUNAN
				4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	0 Kejadian	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURAL DAN PERKEBUNAN
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	Tidak ada $\frac{0}{0} = 0 \%$	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
				1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota sebanyak .....	Tidak Tidak terdapat potensi alam sumber panas	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
30	PERDAGANGAN	98	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten	$\frac{118}{118} = 100 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	$\frac{1}{1} = 100 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				--	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	$\frac{22}{22} = 100 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan TDG	$\frac{3}{3} = 100 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG ----- X 100% Jumlah gudang yang ada di Kabupaten/Kota	$\frac{3}{250} = 1.2 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :  Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				--	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri :  Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri	$\frac{3}{3} = 100 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				--	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :  Jumlah STPW untuk penerima	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri		
				5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	100 %	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				8. Persentase koefisien variasi	Persentase koefisien variasi harga	1,988 %	DINAS PERINDUSTRIAN



No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				harga antar waktu	antar waktu per komoditas bahan pokok		DAN PERDAGANGAN
		99	Persentase kinerja realisasi pupuk	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Realisasi ----- x 100% RDKK	$\frac{204,972.15}{326,708.86} = 62.7385 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(bxc) \times 100$  X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	0,05 %	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		100	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{1,680}{11,425} = 14.7046 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan ----- X 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{1,680}{11,425} = 14.7046 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- X 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	$\frac{45}{45} = 100 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
31	PERINDUSTRIAN	101	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021 - Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2020) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020	$\frac{17,456}{17,212} - 17,212 = 1.4176\%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{0}{1} = 0\%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		102	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK ----- x 100% Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIP	$\frac{13}{16} = 81.25\%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	5 a. Tersusunnya naskah akademik (30%) Ya b. Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) Ya c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) Ya d. Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) Ya e. Penetapan Perda RPIK (10%) Ya	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{11}{11} = 100 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{11}{11} = 100 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{11}{11} = 100 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		105	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{0}{1} = 0 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		106	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-- 7 Informasi industri secara lengkap dan terkini --	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	6 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) Ada 2. Tersedianya informasi	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Ada 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada 5. Informasi bahan bakar/energi (10%) Ada 6. Informasi tenaga kerja (10%) Ada 7. Informasi Investasi (10%) Ada	
				1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas ----- X 100% Total Populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{1}{505} = 0.1980 \%$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
32	TRANSMIGRASI	107	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	0 Kawasan	DINAS TENAGA KERJA
				2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak .....	0 Permukiman	DINAS TENAGA KERJA

No.	URUSAN	No.	IKK OUTCOME/HASIL	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					(Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga)		
				3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah satuan pemukiman yang dibina sebanyak .....	0 Permukiman	DINAS TENAGA KERJA

LAMPIRAN 3

**INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG  
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

**KABUPATEN LAMONGAN**

No.	FUNGSI PENUNJANG	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PERENCANAAN KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{625,023,376,845}{3,022,672,092,110} = 20.6778\%$	BPKAD
		2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$	$\frac{604,588,137,655.78}{2,934,153,593,504} = 20.6052\%$	BPKAD
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Ada LEVEL 3	Inspektorat
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Ada LEVEL 3	Inspektorat
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	$\frac{1,930,779,334,726}{287,106,258,319,856} - 856,586,351,001 = 0.3741\%$	BPKAD
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	Opini Laporan Keuangan dalam 10 Tahun Terakhir : 6 WTP 1. Opini BPK Tahun 2021 : WTP 2. Opini BPK Tahun 2020 : WTP 3. Opini BPK Tahun 2019 : WTP 4. Opini BPK Tahun 2018 : WTP	BPKAD

No.	FUNGSI PENUNJANG	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
					5. Opini BPK Tahun 2017 : WTP 6. Opini BPK Tahun 2016 : WTP 7. Opini BPK Tahun 2015 : WDP 8. Opini BPK Tahun 2014 : WDP 9. Opini BPK Tahun 2013 : WDP 10. Opini BPK Tahun 2012 : WDP	
2	PENGADAAN	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021 ----- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2021	$\frac{0}{1} = 0 \%$	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	$\frac{146}{146} = 100 \%$	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- x 100% Total belanja langsung	$\frac{1,133,000,000,000}{1,133,000,000,000} = 100 \%$	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3	KEPEGAWAIAN	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- x 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	$\frac{1,644}{685} = 240 \%$	BKPSDM
		11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{515}{2,967} = 17.3576 \%$	BKPSDM

No.	FUNGSI PENUNJANG	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{228}{515} = 44.2718 \%$	BKPSDM
4	MANAJEMEN KEUANGAN	13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi (----- --- - 1) X 100% Total belanja APBD (Sebelum Perubahan)	$\frac{2,871,062,583,199.56}{2,938,937,199,701} - 1 = 2.3095 \%$	BPKAD
		14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi (----- --- - 1) X 100% Total PAD dalam APBD (Sebelum Perubahan)	$\frac{604,588,137,656.78}{467,688,539,768} - 1 = 29.2715 \%$	BPKAD
		15	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4 Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran ? Ya	BPKAD
		16	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA ----- x 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya	$\frac{51,424,446,606.49}{2,823,137,926,114.77} = 1.8215 \%$	BPKAD



No.	FUNGSI PENUNJANG	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya) ----- x 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya)	$\frac{3,022,672,092,110}{2,871,062,583,199} = 105.2806\%$	BPKAD
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci (12 Dokumen) Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD	$\frac{12}{12} = 100\%$	BPKAD